

364.36

RAU

k.

1998



**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN PELAJAR**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Dey Ravena, S.H.
B. 002.95.0121**

Pembimbing

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.

**PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1998

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN PELAJAR**

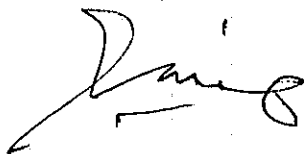
Disusun Oleh :

**DEY RAVENA, S.H.
B.002.95.0121**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 28 Juli 1998**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.
Nip. 130.350.519**

**Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Hk Purwahid Patrik, S.H.
Nip. 130.307.058**

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Wr Wb.**

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini pada akhirnya dapat juga selesai ditulis.

Motivasi yang mendorong ditulisnya tesis ini adalah semata-mata karena penulis ingin turut berperan serta pada membangun hari esok yang lebih baik bagi kita semua, betapun kecilnya, sekalipun hasilnya ternyata hanya sekedar mampu menawarkan sebutir pasir pada pantai di laut. Bagi penulis yang sangat penting adalah bahwa penulis yakin telah melakukannya secara ikhlas dengan berikhtiar mengerahkan seluruh kemampuan yang penulis punyai.

Dalam ikhtiar untuk berperan serta itu, penulis melihat adanya peluang sehubungan dengan tuntutan kenyataan bahwa membangun hari esok yang lebih baik bagi bangsa dan negara perlu memanfaatkan ilmu pada bidang yang yang bersangkutan. Untuk itu dalam karya tulis ini penulis

memusatkan perhatian untuk mencoba menelaah dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini, dengan judul :

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PELAJAR**

Penulis merasa sangat yakin bahwa tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta bantuan dan dorongan semangat banyak pihak yang diberikan kepada penulis, maka tesis ini tidak akan pernah selesai ditulis. Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Letjen TNI AD (Purn) H. Ahmad Tirtosudiro, mantan Rektor Universitas Islam Bandung, yang ketika mengemban jabatannya itu memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. Selaku Pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan, dan selain itu selalu mendorong dan terutama di saat kritisnya kondisi fisik penulis, membangkitkan semangat penulis yang memungkinkan tulisan ini pada akhirnya dapat diselesaikan juga;

3. Bapak Prof. Purwahid Patrik, S.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Eddi Setiadi HZ, S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
5. Bapak Ahmad S. Abdulah, S.H. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Bapak Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Yang telah memberikan semangat kepada penulis dikala penulis terbaring dirumah sakit.
7. Bapak Kolonel (Pol) Erwin Mapaseng, Selaku Kapolwiltabes Bandung, Beserta Stafnya.
8. Sdr. Nandang Sambas, S.H., MH.. Atas masukan dan diskusinya.
9. Sdr. Agus Takariawan, S.H. Selaku teman akrab penulis selama di Semarang, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, khususnya dikala penulis masih terbaring di Rumah Sakit.
10. Bapak serta ibu Staf Administrasi Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang selama ini telah membantu penulis dalam urusan administrasi.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada, Sdr. Ridwan Muhamad, S.H., Sdr. Sigid Suseno, S.H., Sdr.

Arief Agus Pramuka, S.H.. (Aap), yang selalu setia mengantar, menemani penulis berobat dikala penulis sakit lumpuh, serta memberikan motivasi agar penulis bisa tetap menyelesaikan tulisan ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus pula kepada Mamah dan Ema dengan caranya yang berbeda telah memberikan perhatian yang tulus kepada penulis dan keluarga penulis. Serta Kakaku yang begitu telatennya memperhatikan penulis dalam upaya menyelesaikan pendidikan ini, dengan memberikan dorongan moril dan dukungan materil. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Iwan Hemawan yang telah membantu penulis dalam proses pencetakan dan penggandaan tesis ini.

Akhirnya penulis sangat berterima kasih kepada Istriku E. Rochayatai, S.H. dan kedua anakku yang tercinta Muhammad Iqbal dan Muhammad Ilham, yang dengan caranya yang khas tersendiri memberikan dukungan dan berusaha mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Mudah-mudahan segala amal baik Saudara yang disebutkan penulis diatas dapat diterima oleh Allah SWT. Amiin.

Tentu saja apa yang tersaji dalam tesis ini masih jauh dari sempurna, dan mengandung banyak kekurangan, meskipun telah banyak menerima

masuk dari berbagai pihak. Namun semua kekurangan yang terdapat
didalamnya disebabkan kelemahan penulis sendiri.

Bandung, Juli 1998.

Dey Ravena

RINGKASAN

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan seorang pelajar dalam suatu bangsa merupakan sumber daya terdidik yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan bangsa di masa-masa yang akan datang. Sebagai manusia terdidik mereka menjadi tumpuan dan harapan bagi suatu bangsa. Namun demikian, dalam kaitannya dengan studi tentang kejahatan, status pelajar sebagai masyarakat yang terdidik, tidak selamanya akan memberikan jaminan bahwa ia dapat menjadi tauladan bagi warga masyarakatnya, dimana seorang pelajar dapat terlibat didalam suatu perilaku jahat, dimana kejahatan yang dilakukan oleh pelajar tersebut pada umumnya jarang ditemui motif khusus kenapa mereka melakukan kejahatan, serta mengingat sifat usia, karakter serta kausa kejahatan tidak sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka perlakuan terhadap kejahatan yang dilakukan pelajar dengan melihat sifat, karakter serta kausa kejahatan tersebut akan mengakibatkan adanya keterpaduan upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal.

Dari hasil penelitian terungkap ada dua hal yang merupakan titik tolak timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, yaitu :

1. Problema khas remaja/pelajar yang bersifat universal pada kehidupannya yang berkaitan dengan perkembangan kejiwaan yang terjadi dimanapun juga.
2. Problema remaja/pelajar yang timbul karena keadaan tertentu dilingkungan sosial baik yang terjadi dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bertitik tolak dari kondisi diatas, maka kebijakan penanggulangan yang dilaksanakan oleh POLRI baik dengan sarana penal maupun non penal, membawa konsekwensi bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang sangat mendasar mengingat kedudukan pelajar tersebut. Hal inipun tergambarkan dalam kebijakan yang telah dilaksanakan oleh POLRI C.q. Polwiltabes Bandung terhadap pelajar yang melakukan kejahatan, dimana peran normatif polisi (wujudnya lebih menekankan pada sarana hukum pidana) tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenangnyanya sebagaimana diatur didalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI, karena adanya kesenjangan antara yang ditangkap, ditahan dan diajukan ke penuntut umum, serta adanya seleksi perkara melalui wewenang diskresi.

Daftar Isi

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	viii
Daftar Isi	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.	20
D. Kegunaan Penelitian	20
E. Kerangka Pemikiran	21
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	34
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 36
A. Tugas dan Wewenang Polri	36
B. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan	49
C. Pengertian dan Karakteristik Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar	76
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal	108
E. Kebijakan Penal dan Non Penal Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan	120

BAB	III :	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	135
	A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	135
	B.	Karakteristik Responden	157
	1.	Karakteristik Responden Polisi.....	157
	2.	Karakteristik Responden Pelajar	161
	C.	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Yang Telah Ditempuh Polri Selama Ini Terhadap Pelajar Yang Melakukan Kejahatan	168
	1.	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal	168
	2.	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Non Penal	198
	D.	Evaluasi Penanggulangan Kejahatan Yang Telah Ditempuh Oleh Polri Selama Ini, Serta Prospeknya Di Masa Yang Akan Datang	220
BAB	IV :	PENUTUP	231
	4.1	Kesimpulan	231
	4.2	Rekomendasi	237
DAFTAR PUSTAKA			238
DAFTAR SINGKATAN			247

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Pembangunan Nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

UPT-PUSTAK-UNDIP

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan sebagainya. Di sektor pembinaan generasi muda, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) khususnya dalam Pembangunan Jangka Panjang II, bahwa pembinaan pemuda sebagai generasi penerus bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, sikap keteladanan dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dilaksanakan sedini mungkin di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.¹

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan untuk mencapai sasaran serta kebijaksanaan Pelita Keenam yang telah ditetapkan dalam GBHN 1993, maka dalam Repelita VI dirumuskan berbagai kebijaksanaan yang, antara lain, meliputi peningkatan status gizi dan kesehatan, peningkatan pendidikan, penumbuhan wawasan iptek, penumbuhan dan peningkatan idealisme serta patriotisme, peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan

¹ Lihat Tap MPR No. II/MPR/1993 *Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Bab. III Huruf F Angka 14.

lingkungan, peningkatan keluarga dan masyarakat, serta pembinaan dan perlindungan hukum anak dan remaja.

Berdasarkan rumusan dalam GBHN tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan generasi muda diarahkan untuk menjadi penerus perjuangan bangsa. Namun demikian dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta semakin cepatnya perkembangan informasi sebagai akibat arus globalisasi, telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Sebagai ilustrasi, kita menyadari bahwa kemajuan pesat yang diperoleh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern membawa perubahan-perubahan besar lagi mendasar dalam segala kehidupan manusia. Terdapat krisis dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, kondisi-kondisi tersebut sangat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia khususnya para remaja/pelajar. Proses perubahan tersebut seringkali melahirkan akibat-akibat yang berada di luar kehendak masyarakat, Hal tersebut menggambarkan semakin banyaknya remaja/pelajar terlibat dalam kasus-kasus pembunuhan, perampokan, penganiayaan, sindikat pencurian motor/mobil, perkelahian masal antar kelompok pelajar, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Hal ini menunjukkan betapa

cepatnya bentuk-bentuk kriminalitas/kejahatan yang dilakukan oleh remaja/pelajar. Hal ini dapat dikatakan sebagai dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan, yang dapat menimbulkan faktor kriminogen sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** yang merangkum pernyataan dari hasil Kongres PBB,² yaitu :

1. Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial
2. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu :
 - a. Tidak direncanakan secara rasional;
 - b. Perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
 - c. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
 - d. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan masalah dalam seluruh sektor pembangunan, sebagai akibat dari pembangunan yang tidak direncanakan secara baik. Oleh sebab itu untuk mengkaji penyebab timbulnya kejahatan tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang terdapat dalam pembangunan itu sendiri. Dalam Kongres PBB ke-8 telah diidentifikasi faktor-faktor

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 1996, Hal.10.

kondusif penyebab timbulnya kejahatan (khususnya dalam masalah

"Urban Crime"),³ Antara lain :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam bidang/lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakainya juga di perluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat-bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media massa) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Selanjutnya sebagaimana diketahui bahwa kedudukan seorang pelajar dalam suatu bangsa merupakan sumber daya terdidik

³ Ibid, Halaman 13-14

yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan bangsa di masa-masa yang akan datang. Sebagai manusia terdidik (terpelajar), mereka menjadi tumpuan dan harapan bagi suatu bangsa untuk lebih meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, semakin banyak sumber daya manusia terdidik yang dimiliki oleh suatu bangsa, diharapkan akan semakin ringan beban bangsa tersebut dalam memikul tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang.

Mengingat kedudukan pelajar sebagai calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang, maka tidaklah berlebihan apabila pelajar dikatakan mempunyai posisi sentral dalam masyarakat. Dalam posisinya sebagai calon pemimpin bangsa itulah seorang pelajar dituntut mempunyai perilaku yang dapat dijadikan tauladan bagi anggota masyarakat lainnya.

Namun demikian, dalam kaitannya dengan studi tentang kejahatan, status pelajar sebagai warga masyarakat yang terdidik, tidak selamanya akan memberikan jaminan bahwa ia dapat menjadi tauladan bagi warga masyarakat lainnya. Terkadang karena terdorong oleh sesuatu hal atau karena keadaan tertentu, seorang pelajar dapat terlibat dalam suatu perilaku jahat yang merugikan masyarakat . Dan keadaan

ini memberikan kesan bahwa mereka itu tidak dapat diharapkan akan menjadi pemimpin bangsa yang baik di masa yang akan datang.

Kalau kita perhatikan masalah kejahatan yang dilakukan oleh pelajar (remaja) pada akhir-akhir ini sudah berulang kali menjadi bahan sorotan dan pembahasan, dimana hal ini yang semula hanya merupakan masalah lokal kota besar, namun sekarang telah berkembang di berbagai kota pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, meskipun dalam kadar dan ruang lingkup yang berbeda-beda. Semula kenakalan remaja yang terjadi hanya melibatkan remaja (pelajar) dari golongan ekonomi lemah dengan latar belakang sosial ekonomi, namun sekarang telah berkembang dilakukan pula oleh remaja (pelajar) dari berbagai golongan ekonomi menengah dan kuat.

Sementara itu pada bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran susila serta kejahatan dengan kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, yang semula dilakukan oleh kebanyakan remaja (pelajar) dari golongan ekonomi kuat dan berkedudukan sosial dengan status tinggi menengah, dalam perkembangannya pada saat ini telah melibatkan pula sebagian remaja (pelajar) dari golongan lemah dengan status sosial yang rendah.

Di dalam perkembangan selanjutnya tidak dapat disangkal lagi bahwa masalah kenakalan remaja dan kejahatan yang dilakukan pelajar, telah bergerak secara vertikal maupun horizontal. Timbul keresahan dikalangan pendidik, orang tua dan masyarakat. Menanggapi masalah ini, Presiden Suharto melalui Menkokesra mengintruksikan : ⁴

“Agar aparaturnegara mengawasi secara sungguh-sungguh serta langsung mengambil langkah-langkah preventif represif supaya tidak lagi terjadi atau terulang lagi kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, juga menekankan agar departemen pendidikan dan kebudayaan, persatuan orang tua murid dan aparaturnegara betul-betul bekerja sama untuk mengawasi mereka “.

Hal ini sejalan dengan Sidang Komisi Pencegahan dan Peradilan Pidana yang dilaksanakan di Wina pada tanggal 21 s/d 31 Mei 1996, dari prioritas pembicaraan menunjukkan perkembangan mutakhir kejahatan-kejahatan yang harus diwaspadai adalah : ⁵

“Kejahatan transnasional (terorganisasi), kejahatan ekonomi termasuk pemutihan uang, kejahatan lingkungan hidup (eco-crime), kejahatan perkotaan, kejahatan kekerasan, kejahatan yang dilakukan oleh remaja, perdagangan senjata api, kekerasan terhadap wanita, anak-anak, penyelundupan imigran gelap dan tindak pidana korupsi.”

Mengingat pelajar adalah sebagai potensi bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang dan kalau kita perhatikan

⁴ Harian Pikran Rakyat, 1995. Halaman 1.

⁵ Muladi, *Pendekatan Non Penal Dalam penanggulangan Kejahatan Dari Aspek Instrumen Internasional*, Kertas Kerja pada Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September 1996, Halaman 5.

dari segi usia masih dapat di golongankan sebagai anak-anak atau remaja, maka kejahatan yang di lakukan pelajar pada umumnya jarang ditemui adanya motif khusus mengapa pelajar melakukan kejahatan, hal ini sangat berbeda dengan motif kejahatan yang di lakukan oleh orang dewasa pada umumnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan oleh pelajar terjadi sebagai akibat dari ekses “kenakalan” sesuai dengan usianya yang masih remaja, sehingga dikenal dengan istilah “kenakalan remaja”

Selanjutnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi terdapat suatu pemikiran bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal yang bersifat “welfare” dengan sarana penal, tidak setiap pelaku kejahatan akan memperoleh perlakuan yang sama antara penjahat yang satu dengan penjahat yang lainnya. Perbedaan perlakuan itu dilakukan mengingat sifat, karakter serta kausa kejahatan tidak selalu sama. Berkaitan dengan perbedaan perlakuan itu, maka perlakuan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dengan melihat sifat, karakter serta kausa kejahatan tersebut akan mengakibatkan adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal.

Kegiatan penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal pada dasarnya adalah semua bentuk aktivitas yang bermuara pada perlindungan masyarakat dari kejahatan, yang tidak menggunakan sarana hukum pidana (penal).

Menurut **G.P. Hoefnagel** kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui cara : ⁶

1. *Criminal Law Application* / penerapan hukum pidana
2. *Prevention Without Punishment* / pencegahan tanpa pidana
3. *Influencing Views of Society on Crime and Society Crime and Punishment* / Mass Media, mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan.

Dengan melihat upaya penanggulangan tersebut, secara garis besar bahwa upaya itu dapat dibagi dua, yaitu :

1. Penanggulangan dengan sarana penal
2. Penanggulangan dengan sarana non penal

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, seperti yang telah diuraikan oleh penulis diatas.

⁶ Barda Nawawi Arief, Opcit, Halaman. 48.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁷

Selanjutnya dalam salah satu tulisannya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :⁸

“Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum Pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal, usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat penegak keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha non penal ini dapat melalui bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan”.

Dalam uraian diatas dinyatakan bahwa terdapat beberapa masalah-masalah sosial atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan. Kalau kita perhatikan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar di samping menimbulkan rasa tidak tentram di kalangan masyarakat, juga menimbulkan presepsi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap

⁷ Ibid, Halaman. 49.

⁸ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992. Halaman 158-159

kejahatan tersebut. Mengingat perbuatan yang dilakukan lebih disebabkan karena produk dari interaksi kelompok dibandingkan sebagai suatu produk individual, sehingga motivasi dari kejahatan yang dilakukan tidak jelas, serta mengingat kedudukan dan potensi pelajar sebagai generasi muda terdidik yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan bangsa di masa mendatang, sehingga perlu dipertimbangkan secara bijaksana tindakan yang akan diambil. Dan hal ini membawa konsekwensi bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar (remaja) merupakan suatu hal yang sangat mendasar mengingat kedudukan pelajar yang sangat strategis sebagai penerus dan pewaris pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan hasil Kongres PBB yaitu :⁹

Affirming that standard minimum rules for the administration of juvenile justice are important in protecting the fundamental human rights of juveniles and that those standard minimum rules should reflect the following basic principles (Menegaskan, bahwa aturan standar minimum bagi pelaksanaan peradilan anak penting untuk melindungi hak asasi anak dan bahwa aturan mengenai standar minimum itu harus mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut) :

- (a) *Juveniles in trouble with the law should be provided with carefully constructed legal protections*, (Anak yang berurusan dengan hukum harus mendapat perlindungan hukum yang dirumuskan secara seksama),

⁹Lihat Sixth United Nation Congress on *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Report, 1980, Halaman. 7-8.

- (b) *Pretrial detention should be used only as a last resort, no minors or juvenile offenders should be held in a goal or other facility where they are vulnerable to the negative influences of adult offenders during this period, and account should always be taken of the needs peculiar to their age,* (Penahan sebelum sidang pengadilan hanya dipergunakan sebagai jalan terakhir saja; pelanggaran ringan yang dilakukan oleh anak tidak ada keharusan ia ditahan dirumah penahanan, karena mereka lebih mudah mendapat pengaruh negatif dari narapidana dewasa dan kebutuhan-kebutuhan khusus perlu dipertimbangkan sesuai dengan usia si anak),
- (c) *Juveniles offenders should not be incarcerated in a correctional institution unless adjudicated of a serious act involving, above all, violence against another person or of persistence in committing other serious offences; moreover, no such incarceration should occur unless it is necessary for their own protection or unless there is no other appropriate response that will protect the public safety, or satisfy the ends of justice and provide the juvenile with the opportunity to exercise self-control,* (Pelaku kejahatan anak jangan sampai dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan kecuali diputuskan bersalah melakukan tindak pidana yang berat. Penahanan tidak perlu dilakukan kecuali jika memang hal itu diperlukan untuk melindungi mereka sewajarnya atau jika memang hal itu diperlukan untuk melindungi keamanan umum dan memenuhi tujuan peradilan terhadap hal tersebut, anak (pelaku) harus diberi kesempatan untuk menjaga diri).
- (d) *The community of nations should do all it can, both individually and collectively, to provide the means by which every young person can look forward a life that is meaningful and valuable to himself, to his community and to his country,* (Masyarakat bangsa-bangsa semaksimal mungkin harus berusaha, baik secara individu maupun kolektif untuk memberi kesempatan agar si anak dapat memandang hidupnya dimasa depan yang lebih berarti, berharga bagi dirinya, masyarakat dan negara).

Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar (remaja) merupakan suatu hal yang sangat mendasar mengingat pelajar sangat strategis sebagai penerus dan pewaris pembangunan negara.

Ada hubungan antara sebab-sebab timbulnya kejahatan di satu pihak dengan cara menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, oleh sebab itu perlu diidentifikasi sebab-sebab timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dalam hubungannya dengan cara menanggulangnya.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, POLRI sebagai aparat penegak hukum mempunyai peranan utama dalam menanggulangnya. Seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa Polisi pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan Polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana.¹⁰

Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki POLRI, baik berupa tindakan preventif maupun represif. Seperti

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung, Sinar Baru, TT. Halaman 95

tercantum dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yaitu :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dalam huruf a dan b ayat 4 Pasal ini.

Dengan demikian tugas POLRI pada hakikatnya adalah sebagai alat negara penegak hukum serta membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk keperluan tersebut maka POLRI sebagai lembaga, memiliki berbagai fungsi, antara lain, fungsi Intelejen, Reserse, Samapta dan Bimmas.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Bandung, sudah sangat sering dimuat dalam mass media eletronika maupun mass media cetak. Mengingat Kota Bandung sebagai kota besar dimana tingkat mobilitas penduduk mempunyai angka yang cukup tinggi, Hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan remaja/pelajar dalam melakukan proses identifikasi dan imitasi. Kesemuanya ini akan menimbulkan pergeseran nilai-nilai sebagai akibat ketidaksiapan menerima dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan adanya nilai-nilai baru tersebut. Dalam suasana berlangsungnya perbenturan nilai-nilai tersebut, perubahan sikap dan tingkah laku remaja/pelajar sering tercetus dalam bentuk penyimpangan tingkah laku.

Data yang diperoleh dari Polwiltabes Bandung selama 1996 dan awal 1997, telah terjadi 55 kasus kejahatan yang melibatkan 344 orang pelajar yang ditangkap, ditahan 117 orang, sebanyak 15 orang diajukan ke pengadilan, dan 104 orang dibina melalui pembinaan intensif.¹¹

Kalau kita perhatikan nampaknya secara kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh pelajar relatif kecil, tetapi secara kualitas kejahatan yang dilakukan oleh pelajar sangat meresahkan

¹¹Sumber Sat Bimmas dan Sat Serse Polwiltabes Bandung

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha penanggulangan sedini mungkin.

Atas dasar hal tersebut diatas, penulis mencoba melakukan kajian akademik tentang penanganan terhadap pelajar yang melakukan kejahatan. Kajian tersebut dilakukan melalui suatu penelitian yang dituangkan dalam tesis yang berjudul **“Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang dilakukan Pelajar”**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa masalah kejahatan yang dilakukan oleh pelajar (remaja), didalam perkembangannya pada akhir-akhir ini nampaknya intensitas maupun kualitasnya telah bergerak dan berkembang dalam beberapa dimensi. Dan kejahatan ini yang semula hanya merupakan masalah kota besar, namun sekarang telah berkembang di berbagai kota pada daerah-daerah tertentu di Indonesia. Sementara itu pada bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan telah mengalami perkembangan ke jenis-jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat pada umumnya, dan sekaligus adanya gejala peningkatan kriminalitas yang bersifat ganda dikalangan pelajar. Keadaan ini telah

memberikan pertanda bahwa bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan cara-cara yang semakin maju dan semakin kompleks sebab motivasinya. Di samping adanya kegagalan pendidikan terhadap pelajar (remaja) di lingkungan keluarga, nampaknya terdapat pula pengaruh sampingan tertentu dari berbagai bentuk dan kreasi budaya terutama film, bacaan-bacaan yang belum mampu dikendalikan peredarannya secara mantap dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula masih banyak terjadi kesan-kesan, contoh-contoh dan rangsangan-rangsangan negatif dari kehidupan dalam masyarakat orang dewasa, dimana berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan pelajar (remaja). Keseluruhan kepincangan keadaan ini ikut mempunyai andil yang menentukan terhadap makin berkembangnya masalah diatas. Oleh sebab itu perlu dilakukan kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar (remaja), dan tahap fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar (remaja) di dalam penelitian ini hanyalah dalam tahap kebijakan aplikatif.¹²

¹²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar FH. UNDIP, Semarang 25 Juni 1994. Halaman. 18.Disebutkan bahwa pembagian kewenangan itu di dasarkan pada adanya tiga tahap konkretisasi atau fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dilihat dari sudut

Selanjutnya agar penelitian dan pembahasan masalah ini mencapai sasaran yang ingin dicapai, maka di samping penelitian terhadap kebijakan aplikatif hukum pidana, juga dilakukan penelitian terhadap kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh POLRI terhadap pelajar yang melakukan kejahatan di Wilayah Kotamadia Bandung.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian kebijakan penal dalam menangani kejahatan yang dilakukan pelajar dibatasi pada kebijakan aplikatif (polisi).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah kebijakan penal dan non penal yang telah ditempuh oleh POLRI selama ini terhadap pelajar, sebagai upaya penanggulangan kejahatan ?**
- 2. Bagaimanakah prospek kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar di masa yang akan datang ?**

kebijakan hukum pidana. Pertama, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat UU (tahap formulatif/legislatif; Kedua, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap kebijakan aplikatif atau kebijakan yudikatif/yudisial); dan Ketiga, Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat penegak pelaksana/eksekusi pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kondisi kebijakan kriminal yang telah ditempuh selama ini oleh POLRI dalam usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar baik dengan sarana penal dalam hal ini kebijakan aplikatif hukum pidana maupun dengan sarana non penal, serta prospek kebijakan penal dan non penal dimasa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang menganalisis kebijakan kriminal dalam usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelajar, maka penelitian diharapkan mempunyai kegunaan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan imbas dalam merumuskan pola penanganan masalah kejahatan yang dilakukan oleh pelajar yang menyangkut tindakan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pemegang kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rokhani.¹³ Hal ini berarti bahwa pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia sehat fisik, sehat mental dan sehat sosialnya. Dan hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari pentingnya peran pendidikan dalam pembentukan suatu bangsa maka diperlukan upaya-upaya dengan maksud untuk

¹³Lihat, *Undang-Undang Pendidikan Tinggi* Nomor 2 tahun 1989.

mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, di mana generasi muda perlu terus dibina, dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menunaikan misinya secara lebih mantap, terarah dan terpadu.

Dilihat dari kebutuhan pembangunan maka remaja adalah sumber tenaga kerja di masa datang dan sebagai sumber insani dari potensi bangsa, oleh karena masalah pembinaan dan pengembangan generasi muda harus merupakan salah satu usaha pokok yang perlu ditanamkan. Namun usaha-usaha tersebut tidak akan berhasil apabila tidak mendapatkan tanggapan positif dari generasi muda (remaja/pelajar). Sebagaimana akhir-akhir ini banyak diberitakan pelajar sering terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak terpuji bahkan menjurus kepada tindakan kriminal.

Dari sudut remaja/pelajar nampak adanya gejala peningkatan kriminalitas yang tidak dapat dilepaskan dari problema remaja/pelajar yang timbul sebagai akibat ketidakmampuan orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan dalam keluarga untuk memberikan pemenuhan dan penyaluran terhadap kebutuhan emosional dan dorongan yang terjadi pada usia remaja. Dengan

demikian akan menimbulkan problema remaja yang berkaitan dengan hambatan pada pembentukan identitas dan kepribadiannya.

Pengaruh negatif yang terjadi dari lingkungan sosialnya sebagai tempat mereka hidup, tumbuh dan berkembang akan mendorong para remaja/pelajar dalam membuat kesalahan pada proses belajarnya karena seringkali terjadi perbenturan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan berlangsungnya pengaruh sosial bagi kehidupan remaja/pelajar, maka dalam kehidupan masyarakat selalu dihadapkan adanya pergeseran-pergeseran nilai-nilai baru yang bersifat rasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka kehidupan remaja/pelajar akan semakin berat menerima pengaruh-pengaruh negatif bagi perkembangan kejiwaan. Hal ini tercermin dalam gejala sebagai berikut :

1. Semakin banyaknya perbenturan kreasi budaya negatif yang beredar dan dipergelarkan, dimana pengendaliannya belum dapat dilaksanakan secara mantap.
2. Semakin banyaknya perbenturan nilai, yang secara tidak langsung mendorong remaja/pelajar dalam melakukan kesalahan dalam proses imitasi dan identifikasi.

3. Semakin banyak timbulnya permasalahan yang menyangkut pemenuhan dan penyaluran remaja/pelajar dalam pemanfaatan waktu luangnya.

Kesalahan dalam proses imitasi dan identifikasi pada kehidupan remaja/pelajar saat ini, telah tergambarkan dalam semakin banyaknya mereka terlibat dalam kasus-kasus pembunuhan, penganiayaan, sindikat pencurian motor, perkelahian pelajar, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran susila, telah menunjukkan betapa cepatnya bentuk-bentuk kriminalitas ini ditiru dan dilaksanakan oleh remaja/pelajar.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang demikian, maka diperlukan suatu kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh remaja/pelajar. Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan kebijakan berarti menentukan alternatif mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi.¹⁴

Dalam rangka menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dapat ditempuh dengan upaya penal dan non penal. Penggunaan upaya ini merupakan bagian penting dari keseluruhan politik kriminal (*criminal policy*), sedangkan politik kriminal tersebut

¹⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Halaman 118.

tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*).¹⁵ Pendapat ini sama dengan perumusan tujuan politik kriminal yang pernah dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke 34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973, yaitu :¹⁶

Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be discribed by terms like "happiness if citizens", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality".

Berdasarkan pendapat di atas, maka politik kriminal tidak hanya berkisar pada masalah penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan, melainkan keseluruhan kegiatan atau aktivitas yang sangat luas yang direncanakan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan atau dapat dilakukan dengan upaya penal dan non penal.

Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), sehubungan dengan hal itu Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan penilaian

¹⁵Barda Nawawi Arief, Op Cit, 1996, Halaman 2.

¹⁶Ibid, Halaman 3.

dan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁷ Dengan demikian untuk mencapai syarat keadilan dan daya guna, maka penerapan hukum pidana (sarana penal) harus memenuhi unsur yuridis, filosofis dan sosiologis.

Sedangkan kegiatan pencegahan kejahatan melalui sarana non penal pada dasarnya adalah semua bentuk aktivitas yang bermuara pada perlindungan masyarakat dari kejahatan, yang tidak menggunakan sarana hukum pidana. Maka sasarannya adalah faktor-faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, seperti yang telah diidentifikasi oleh Kongres PBB ke-8 (tentang urban crime).

Dengan demikian sangat diperlukan adanya keterpaduan antara sarana penal dan non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, mengingat pelajar sebagai potensi bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang serta usia yang masih dapat digolongkan sebagai anak-anak atau remaja. maka diperlukan adanya perbedaan perlakuan terhadap remaja/pelajar. Mengingat sifat, karakter serta kausa kejahatan yang dilakukan oleh remaja/pelajar.

¹⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1983, Halaman 161.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian sebagaimana telah dikemukakan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.¹⁸ Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menganalisis peraturan perundangan-undangan yang melandasi aktivitas pelaksanaan dalam taraf aplikatif (kebijakan aplikatif) hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Sedangkan pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk mengungkap peranan pengambil kebijakan taraf aplikatif (polisi) dalam usaha menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelajar.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Bersifat deskriptif mengingat penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan.¹⁹ Sedangkan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, Halaman 137-138.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1983, Halaman 4.

preskriptif bermaksud untuk melukiskan realitas kebijakan aplikatif sebagaimana yang diharapkan.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²¹

b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang menyangkut sejumlah responden mengenai informasi tentang usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, serta pelajar yang terlibat langsung dalam melakukan kejahatan. Sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta, 1994, Halaman 73.

²¹Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990, Halaman 14. Serta Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, Halaman 12.

bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.²² Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang menyangkut perundangan-undangan seperti KUHP, KUHPA, UU Pokok Kepolisian, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Pokok Kejaksaan, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pertahanan Keamanan, serta ketetapan MPR. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil-hasil penelitian dan seterusnya. Selanjutnya untuk bahan hukum tersier terdiri dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia.

4. Lokasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan sampel lokasi penelitian yang dipandang dapat mewakili populasi, Atas dasar alasan rasional, keadaan lembaga kepolisian dan lembaga pendidikan

²²Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, 1990, Halaman 9-12 dan 53; lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1990, Halaman 14-15

(SMU), maka dilakukan secara purposive sampling menurut keperluan informasi.²³

Untuk Lembaga Kepolisian dipilih Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk lembaga pendidikan (SMU) yang dipilih adalah SMU yang pelajarnya terlibat dalam kejahatan, yaitu : Sekolah Menengah Umum Negeri VII dan STM Merdeka yang berada di wilayah Kotamadya Bandung.

b. Sampel Penelitian

Atas dasar pertimbangan derajat karakteristik para pihak yang erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, juga sebagai bahan kelengkapan untuk bahasan teoritis dan informasi dari pengalaman dan pelaksanaan tugas, maka ditentukan sampel penelitian secara purposive sampling.²⁴

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pelajar SLTA sebanyak 40 orang yang diambil dari sekolah yang siswanya pernah terlibat di dalam kejahatan khususnya perkelahian antar

²³Soerjono Soekanto, *Penggunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni, 1980.

²⁴Ronny Hanitjo Soemitro, mengemukakan perihal purposive sampling bahwa untuk menentukan sample berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut;a. haruslah didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi; b. subjek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;c. penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, Halaman 51.

kelompok pelajar, sedangkan anggota Polisi sebanyak 20 orang yang bertugas di Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung. Sedangkan kasus-kasus yang diteliti adalah kasus yang melibatkan pelajar selama tahun 1993 sampai dengan 1997.

Dalam penentuan karakteristik responden dipergunakan ukuran Sosial Ekonomi Status (SES), yaitu untuk responden pelajar berupa tingkat studi (kelas), jenis kelamin, usia, agama, pendidikan orang tua, penghasilan orang tua dan status tempat tinggal. Untuk responden Polisi dipergunakan ukuran jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, pangkat, penghasilan, lama bertugas menjadi Polisi, penghasilan dan status perkawinan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka sekaligus digunakan empat metode pengumpulan data untuk saling mendukung yaitu :

- a. Studi kepustakaan
- b. Pengamatan (observasi)
- c. Wawancara
- d. Kuesioner

Studi pustaka dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari peraturan-peraturan perundangan-undangan, literatur, hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi

yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi pustaka ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap objek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer, juga sebagai acuan dalam menganalisis data yang ada.

Sedangkan metode observasi dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang diselidiki. Dengan observasi diharapkan akan lebih banyak dalam menangkap fenomena yang diteliti. Metode observasi yang digunakan adalah "Non-participant observation"²⁵ Dalam melakukan observasi ini setidaknya-tidaknya meliputi tiga elemen utama, yaitu :

- a. Lokasi/fisik tempat situasi sosial itu berlangsung;
- b. Manusia-manusia pelaku atau actors yang menduduki status/posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu; dan
- c. Kegiatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi/tempat berlangsungnya sesuatu situasi sosial.²⁶

Metode wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai.

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, 1990, Halaman 55

²⁶Sanapiyah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3Malang, 1990, Halaman 77.

Wawancara yang dilaksanakan adalah “unstructured interview”, yaitu pertanyaan yang diajukan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arah wawancara lebih leluasa dan pada gilirannya akan didapatkan suatu informasi yang akurat, dalam proses wawancara ini peneliti mengikuti prinsip “bola salju”, dan akan berakhir setelah terdapat indikasi “tak munculnya variasi/informasi baru.”²⁷ Sedangkan penggunaan kuesioner dimaksudkan untuk mengungkap secara nyata aktivitas atau kegiatan lembaga kepolisian dan lembaga pendidikan (aktivitas pelajar) di lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini seperti yang telah dikemukakan diatas, mempergunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan Yuridis-Empiris. Maka analisa data yang dipergunakan adalah analisis Normatif-Kualitatif dan analisis Kualitatif-Kuantitatif, dimana analisis Normatif-Kualitatif sebagai pegangan utama.²⁸

Analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan

²⁷Ibid, Halaman 158-159, Lihat juga S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, Halaman 51.

²⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 1994, Halaman 22.

oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata diteliti dan dipelajari secara utuh.²⁹ Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji data yang bersifat empiris yang dituangkan dalam bentuk frekuensi dan prosentase.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan secara bertahap, diawali dengan Bab I sebagai Pendahuluan, dilanjutkan dengan Bab II Tinjauan Pustaka yang membahas Tugas dan Wewenang POLRI, Peranan POLRI dalam penanggulangan kejahatan, Pengertian dan karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, serta Kebijakan penal dan non penal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Bab III membahas mengenai hasil penelitian dan analisis, yang terdiri dari Gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden, kebijakan penanggulangan kejahatan yang telah ditempuh oleh POLRI selama ini terhadap pelajar yang melakukan kejahatan baik dengan sarana penal dan non penal, dan Evaluasi penerapan penanggulangan kejahatan oleh pelajar dengan sarana penal dan non penal serta bagaimana prospek kebijakan penal dan non penal di masa yang akan datang. Dan terakhir bab IV yang memuat

²⁹Soerjono Soekanto, 1984, Op Cit, 1986, Halaman 250.

³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, Opcit, 1990, Halaman 35 dan 82

kesimpulan dan rekomendasi dari keseluruhan pembahasan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang POLRI

Dalam membahas tugas dan wewenang POLRI tidak bisa lepas dari peran penegakan hukum.³¹ Penegakan hukum merupakan suatu istilah khas yang lazim diterima oleh masyarakat sebagai penerapan undang-undang.³² Menurut J.E. Sahetapy bahwa tugas penegakan hukum harus merekayasa hukum dalam suatu kambi “sobural” agar masyarakat merasa hidup dalam suatu kesejahteraan yang bukan palsu.³³ Lebih lanjut dikatakan, bahwa hukum tidak akan bergerak atau digerakkan, kalau aparat (oknum) penegakan hukum tidak

³¹ *Pasal 3 Undang-Undang Kepolisian Negara Indonesia No. 28 Tahun 1997*, menjelaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

³² Proses penegakan hukum dapat dilihat melalui dua sudut pandangan. Dari sudut pandangan kultural, penegakan hukum adalah upaya yang dilaksanakan oleh alat-alat sosial kontrol (pengendalian sosial) resmi untuk memakasakan internalisasi hukum pada masyarakat, sedangkan dari sudut pandangan struktural proses penegakan hukum adalah bekerjanya berbagai organisasi yang mewakili pola kepentingan dan konstelasi nilai-nilai dominan untuk menciptakan “keamanan dan ketertiban” sesuai dengan ideologi hukum yang berkuasa. *Mulyana W. Kusumah, Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1986, Halaman 59.

³³ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Halaman 70.

menggerakkannya. Itulah sebabnya hukum diharapkan melalui aparat penegak hukum merekayasa hukum itu sedemikian rupa sehingga ia tidak saja memvitalisasi dan mengkokohkan kerangka sobural, melainkan ia sekaligus menjadikan imunisasi dalam kerangka sobural untuk mengantisipasi dan sekaligus ikut berusaha menyelesaikan akar permasalahan kejahatan.³⁴ Pada kesempatan lain beliau mengatakan bahwa, konsep sobural merupakan suatu akronim untuk nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural. Komponen strukturalnya masyarakat mengambil bentuk yang penting dan bersifat mendasar. Di atasnya harus kita lihat betapa komponen berupa aspek budaya itu ikut mencerminkan dan tentu saling berpengaruh terhadap komponen strukturalnya masyarakat dan sebaliknya,. Di dalam pada itu, konsep sobural tidak bisa dilihat sebagai suatu mesin atau mekanisme sosial yang kaku dan statis. Kedua komponen itu benar-benar bersifat dinamis dan dalam proses berinteraksi karena pengaruh pelbagai faktor, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁵

Di dalam penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh POLRI selalu berhubungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban

³⁴ Ibid, Halaman 79.

³⁵ Ibid, Halaman 45.

masyarakat (kamtibmas), hal ini sejalan dengan tugas pokok POLRI selaku aparat penegak hukum dan inti pembina kamtibmas, sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;

Rumusan tugas diatas, menunjuk kepada tataran represif yustisial fungsi kepolisian yang berkaitan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya.

b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;

Substansi yang terkandung dalam Pasal 13 huruf b adalah substansi dari tugas kepolisian yang murni yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat bag tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas kepolisian melahirkan kewajiban umum kepolisian yang menjadi dasar hukum bagi setiap tindakan kepolisian untuk kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri (diskresi), sebagaimana datur dalam Pasala 18 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

c. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Substansi dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban fungsi pertahanan keamanan negara yaitu fungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila dikaitkan dengan tataran fungsi kepolisian, substansi dalam pasal 13 huruf c tersebut berada pada tataran preventif dan preemtif (bimbingan masyarakat) yang diarahkan tidak saja kepada masyarakat dalam arti warga masyarakat secara perorangan dan kelompok, tetapi juga terhadap instansi-instansi pemerintah secara lintas sektoral.

d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;

Substansi yang terdapat dalam Pasal 13 huruf d adalah fungsi bimbingan masyarakat untuk tugas kepolisian yang pada dasarnya bersifat mengkondisikan terselenggaranya usaha-usaha kegiatan penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan serta pembinaan ketentraman dalam wilayah negara dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Apabila dikaitkan dengan tataran fungsi kepolisian, maka tugas tersebut berada pada tataran preemtif.

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumusan yang tercantum dalam Pasal 13 huruf e merupakan rumusan akomodatif dan antisipatif terhadap bentuk-bentuk tugas yang ada tersebar diberbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta kemungkinan munculnya bentuk tugas baru dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;**
- b. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;**
- c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;**
- d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;**
- e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;**

- f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- I. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas;
- j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan pengaduan;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. mencari keterangan dan barang bukti;

- e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
- k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- g. melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.**

Di dalam Pasal 16 dijelaskan mengenai tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus dibidang proses pidana mempunyai wewenang:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;**
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;**
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;**
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;**
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;**
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;**
- h. mengadakan penghentian penyidikan;**
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;**
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;**
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;**
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.**

Selanjutnya untuk memperjelas tugas dan wewenang POLRI kita dapat melihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 30 ayat (4) yang mengatur tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat (4).

Juga dalam kaitannya dengan tugas penyelenggaraan peradilan pidana, tugas POLRI telah dirumuskan dalam beberapa pasal pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain :

1. Dalam Pasal 4 dikemukakan bahwa Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Dalam Pasal 6 ayat (2) dikemukakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

3. Dalam Pasal 1 butir 5, dikemukakan bahwa sebagai penyidik POLRI bertugas melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang juga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
4. Dalam Pasal 1 butir 2, dikemukakan bahwa sebagai penyidik POLRI bertugas melakukan serangkaian tindakan di dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan mengenai wewenang POLRI, baik dalam pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif, adalah sebagai berikut :

1. Setiap anggota POLRI memiliki kewenangan kepolisian yang lingkupnya dapat membatasi hak-hak asasi warga masyarakat demi tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini tampak dalam kewenangan selaku penyidik, penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam KUHP.
2. Dalam pasal 5 ayat (1) KUHP dinyatakan POLRI selaku penyidik mempunyai kewenangan :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, POLRI selaku penyidik berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
4. Selaku penyidik pembantu sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 KUHAP mempunyai wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik;
5. Di samping wewenang sebagaimana terurai diatas. maka dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang represif, preventif dan bimmas, maka POLRI dalam peraturan perundang-undangan diberikan pula wewenang mengeluarkan perijinan dan surat-surat keterangan antara lain :
- a. Surat izin senjata api;
 - b. Surat izin pesta/keramaian/pertemuan/rapat;
 - c. Surat keterangan mengenai orang asing;
 - d. Surat keterangan tidak terlibat G30S/PKI;
 - e. Surat izin mengemudi.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tugas dan wewenang POLRI pada hakikatnya adalah sebagai alat negara penegak hukum serta membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

(Kamtibmas). Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan mengenai tugas POLRI dibidang penegakan hukum pada intinya ada dua, yaitu penegakan hukum dibidang peradilan pidana dengan sarana “penal” dan penegakan hukum dengan sarana “non-penal”.³⁶ Untuk keperluan tugas tersebut maka POLRI sebagai suatu institusi, memiliki berbagai fungsi, antara lain fungsi utama yang terdiri dari Intelijen, Reserse, Samapta dan, Bimmas.³⁷ POLRI dengan fungsi yang dimilikinya dituntut untuk lebih aktif dengan tindakan-tindakan baik preventif

³⁶Barda Nawawi Arief, *Tugas Yuridis POLRI Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum*, Dalam Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 12, 1994, Halaman 43. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, Halaman 4.

³⁷Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdiri dari :

a. Hakekat fungsi kepolisian.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian ditujukan untuk menjamin hidup dan milik, perlindungan kewenangan-kewenangan yang ditentukan menurut hukum, menegakan dan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh hukum.

b. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis.

- 1). Fungsi kepolisian umum, kepolisian sebagai lembaga pemerintahan negara, yang mempunyai fungsi utama administrasi negara.
- 2). Fungsi kepolisian khusus, tugas administrasi khusus, sesuai dengan undang-undang sebagai dasar hukumnya. Yang dibedakan kedalam :
 - Fungsi kepolisian yudikatif
 - Fungsi kepolisian administrasi

c. Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis.

fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Momo Kelana, *Memahami UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian RI*, Jakarta PTIK, Radinas Ekasaputra, 1998, Halaman 75.

maupun represif sehingga dapat mencegah timbulnya kejahatan, mengantisipasi dan penangkalan terhadap kejahatan.

Dari konteks tugas POLRI tersebut dapat dijabarkan essensi tugas dan kewajiban POLRI sebagai berikut :

1. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum, yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 - a. melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum;
 - b. menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum,
 - c. memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujudnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizen).
2. Mengayomi masyarakat dan melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :
 - a. melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan atau pengawalan ;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian ;
 - c. mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
3. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional
 - b. penerangan dan penyuluhan tentang sistim keamanan swakarsa

c. dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat gauna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁸

B. Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Kejahatan

Sebelum penulis membahas peranan POLRI dalam melakukan penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelajar, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian peranan. Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa peranan diartikan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.³⁹ Selanjutnya Margono Slamet menyatakan bahwa; "Pengertian peranan mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam suatu sistem sosial".⁴⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa, pada dasarnya peranan dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu *Prescribed Roles dan Expected Roles*.

Prescribed roles dapat diartikan sebagai peranan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh dapat diambil peranan kepolisian sebagai organisasi formal tertentu yang telah ditetapkan, mempunyai peranan *prescribed* (ditetapkan) oleh suatu ketentuan

³⁸ Ibid, Halaman 52

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990, Halaman 667.

⁴⁰ Slamet Margono, *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, Bandar Lampung, Unila Press, 1986, Halaman 15.

perundang-undangan. Dengan demikian peranan *prescribed* disebut juga sebagai peranan normatif. Sebagai peranan normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban kepolisian dalam penegakan hukum mempunyai arti, penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantif of criminal law*).

Sedangkan *expected roles* (peranan ideal) dapat diartikan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya kepolisian sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peranan itu tidak tercantum di dalam *prescribed roles*.

Interaksi kedua macam peranan yang telah diuraikan diatas akan membentuk "*perceived roles*" (peranan factual) yang dimiliki kepolisian. Sebagai aktualisasi dari peranan normatif dan peranan yang diharapkan yang timbul karena kedudukan kepolisian sebagai unsur pelaksana yang memiliki "diskresi"⁴¹ untuk menggunakan kekuasaan

⁴¹Diskresi berasal kata bahasa inggris "discretion" yang menurut kamus umum bahasa Inggris Indonesia yang disusun John M. Echols, Dkk, diartikan sebagai kebijaksanaan, keleluasaan. Dengan demikian apabila kata diskresi ini digabungkan dengan kata

("wewenang") atau tidak menggunakannya didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

Rangkaian ketiga macam peranan ini akan merangsang terbentuknya "*Performed Roles*" Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan pelajar, dimana *performance role* akan mencakup peranan-peranan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen resmi yang juga peranan-peranan yang diharapkan oleh masyarakat ataupun orang lain, sehingga dalam menjalankan tugasnya kepolisian akan memperhatikan tidak saja kepentingan dinas tetapi juga kepentingan orang-orang yang bekerja untuk dinas atau organisasi tersebut.

Dari tinjauan sosiologi, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak-hak dan kewajiban merupakan peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu tersebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya,

kepolisian, maka istilah diskresi kepolisian dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya (Vide. Pasal 18 UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian RI).

sedangkan kewajiban merupakan beban atau tugas yang harus diemban. Lebih lanjut dikatakan, bahwa suatu peran dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peran yang ideal (*ideal role*);
2. Peran yang seharusnya (*expected role*);
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁴²

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, peran ideal dan peran seharusnya adalah, peran yang memang dikehendaki dan diharapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan sebenarnya dilakukan adalah, peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan dengan kemampuannya, berdasarkan kenyataan yang ada.

Dari kedua teori peran yang telah diuraikan diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa :

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peranan normatif dalam hubungannya dengan tugas

⁴² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, Halaman 5.

dan kewajiban kepolisian dalam penegakan hukum mempunyai arti, penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*).

2. Sedangkan peranan ideal, dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya kepolisian sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peranan itu tidak tercantum di dalam *prescribed roles*.
3. Interaksi kedua macam peranan yang telah diuraikan diatas akan membentuk peranan faktual yang dimiliki kepolisian. Sebagai aktualisasi dari peranan normatif dan peranan yang diharapkan yang timbul karena kedudukan kepolisian sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

Polisi sebagai pemegang peran (*role occupant*) dalam kaitannya dengan usaha menanggulangi kejahatan, maka untuk ini perlu mengidentifikasi bagaimana terjadinya kejahatan.

Menurut pandangan polisi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan dan laju perkembangan kejahatan, selain merupakan implikasi negatif dari perkembangan masyarakat itu sendiri, juga disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, antara lain :

1. Perangkat hukum dan penegakan hukum yang ternyata dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menimbulkan efek jera bagi sipelaku.

Hal ini dapat saja disebabkan :

- a. pengenaan hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan jahatnya;
- b. masih adanya celah-celah kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan;
- c. kemampuan aparat penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan agar tidak ada satu tindak pidana pun yang lolos dari jangkauannya;
- d. moral dari para penegak hukum yang masih memerlukan tempaan yang efektif, agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan penyimpangan;

- e. adanya undang-undang yang sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang begitu pesat;
- f. masih adanya perbedaan antara aparat penegak hukum tentang penafsiran materi dan ketentuan undang-undang.

2. Faktor lingkungan yang secara efektif mempengaruhi timbul dan berkembangnya kejahatan, antara lain :

- a. Geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu kepulauan dan lautan yang luas, menimbulkan kerawanan-kerawanan yang tinggi mengingat terbatasnya aparat penegak hukum (terutama Polri). Disamping itu posisi silang Indonesia, juga menimbulkan kerawanan bagi terjadinya *International crime*;
- b. Demografi Indonesia yang termasuk negara padat di dunia, dengan struktur kependudukan yang sangat heterogin dari segi suku, adat, kebudayaan dan agama, menimbulkan kerawanan terhadap kemungkinan terjadinya sara;
- c. Sumber daya alam yang walaupun volumenya tinggi namun dibandingkan dengan kepadatan yang sangat tinggi, menimbulkan kerawanan-kerawanan dibidang sosial ekonomi;

- d. kehidupan idiologi yang masih ditandai oleh adanya kelompok-kelompok yang masih belum mau menerima Pancasila secara utuh, bukti hal itu adalah masih adanya golongan ekstrim kiri;
- e. kehidupan politik yang walaupun berkembang kearah mantap, namun masih terdapat golongan-golongan politik praktis yang masih mengutamakan kepentingan golongan/kelompok;
- f. kehidupan ekonomi merupakan titik rawan yang paling besar seperti antara lain adanya kecemburuan sosial, jurang yang dalam antara sikaya dengan simiskin, standar hidup yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan lain-lain;
- g. kehidupan sosial budaya ditandai oleh adanya erosi nilai-nilai tradisional/nasional, adanya difusi kebudayaan dari negara-negara barat, pengangguran, dekadensi moral, menurunnya nilai pendidikan dan lain-lain yang jelas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas.⁴³

Dari sudut pandang POLRI, kejahatan dewasa ini yang sangat perlu diwaspadai dengan memperhatikan faktor-faktor potensial (faktor korelatif kriminogen), adalah :

1. kejahatan terorganisir;

⁴³ M. Sanusi, Lokcit, Halaman 38.

2. kejahatan yang berskala Internasional, seperti pemalsuan / peredaran uang palsu, peredaran gelap narkotik, penyelundupan, sabotase dan terorisme;
3. kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih;
4. kejahatan dengan menggunakan peranan massa dalam melancarkan aksinya;
5. kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian ranmor, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain;
6. kekerasan dengan menggunakan teror atau pemerasan (black mail);
7. kebakaran/pembakaran;
8. penyalahgunaan senjata api;
9. kenakalan remaja.⁴⁴

Terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan persoalan dalam tertib sosial masyarakat, oleh karena kejahatan bukan hanya merupakan persoalan antara pelaku dan korban kejahatan saja, melainkan meliputi lingkup yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Adanya kejahatan yang dilakukan pelajar, tidak hanya merugikan pihak-pihak tertentu yang menjadi korban dari kejahatan itu, tetapi dapat menimbulkan masalah ketertiban umum, pendidikan, pelaksanaan pembangunan dimasa depan, dan sebagainya. Meskipun demikian, terjadinya kejahatan dalam masyarakat tidak mungkin dapat dihindari. Setiap anggota masyarakat akan selalu berhubungan dengan anggota masyarakat yang lain. Tidak ada anggota masyarakat yang dapat

⁴⁴ Ibid, Halaman 55.

menghidupi dirinya secara sendiri. Dalam hubungan-hubungan tersebut, kemungkinan terjadinya perselisihan antara mereka, sewaktu-waktu dapat saja terjadi. Apalagi dengan semakin berkembangnya masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tersebut meningkatkan pula “titik-titik” persinggungan (termasuk perselisihan) antar anggota masyarakat.

Diadakannya hukum adalah untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara anggota masyarakat tersebut, sehingga hubungan itu dapat berjalan lancar, teratur, tertib dan mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada mulanya ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum positif pertama-tama menempatkan hukum didalam batas-batas perundang-undangan. Pembatasan ini menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk menciptakan alat-alat analisis serta konsep-konsep yang memungkinkan hukum dilihat sebagai lembaga yang otonom ditengah-tengah masyarakat. berbeda dengan pandangan yang statis ini, maka ilmu-ilmu sosial melihat kehidupan sosial ini sebagai suatu proses yang dinamis. Apabila kehidupan sosial itu dilihat sebagai suatu

keadaan ekuilibrium, maka ekuilibrium disini adalah yang dinamis sifatnya.

Didalam kerangka pandangan yang demikian itu maka tertib sosial dilihat sebagai suatu tata yang tetap berfungsi sekalipun terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang beraneka ragam; sekalipun bagian-bagiannya itu seolah-olah menunjukkan adanya kekacauan dalam hubungannya satu sama lain; sekalipun fakta-fakta biologis dan fisik lainnya senantiasa berada dalam keadaan yang berubah.⁴⁵

Selanjutnya dikemukakan Satjipto Rahardjo bekerjanya hukum itu bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan saja, melainkan juga aktivitas birokrasi pelaksanaannya.

Disamping itu hukum juga mempunyai legalitas yang diterima umum. Kesemuanya itu menyebabkan bahwa hukum mempunyai kelebihan dibanding dengan lembaga-lembaga lain yang terdapat dalam masyarakat, seperti pendapat umum, ekonomi, politik. Kelebihannya terletak pada kemampuannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui organisasi dan personel yang tersusun baik, termasuk didalamnya kekuasaan untuk memaksa.

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, Halaman 26.

Lembaga Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai aparat penegak hukum sekaligus sebagai penjaga ketertiban dalam masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Jerome H. Skolnick adanya dua peranan sosial berbeda yang dituntut masyarakat atas diri polisi.

Mengenai polisi sebagai pemegang peran (*role occupant*) pada masyarakat, apabila “ketertiban” lebih ditujukan pada hal-hal yang bersifat sosiologis, maka sementara itu “hukum” lebih mengandung pengertian pengendalian secara rasional terhadap peraturan-peraturan dan prosedur-prosedurnya, sehingga berakibat hukum dan ketertiban sering ditemui dalam posisi berlawanan. Padahal polisi harus berdiri diatas keduanya, polisi ditugasi untuk mencapai tujuan sosial (ketertiban) dengan melalui metode hukum. Selain dari pada itu masih ada lagi faktor-faktor yang akan bisa membuat semakin rumitnya pekerjaan polisi dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur penyelenggaraan hukum (pidana) di Indonesia dan sekaligus membedakannya dari unsur-unsur penegak hukum lain.

Faktor-faktor lain, berupa status polisi sebagai bagian dari ABRI yang membawa tuntutan akan adanya sikap-sikap dan tindakan

serta kewajiban-kewajiban tertentu yang justru akan lebih menghambat usaha pelaksanaan tugasnya dalam sistem peradilan pidana.

Gambaran lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa polisi merupakan penyelenggara hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat beserta segala jenis tingkah laku dan perbuatannya, baik berupa tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Kiranya sependapat dengan Satjipto Rahardjo dalam hal ini mengatakan : Pekerjaan kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum, bukankah pekerjaan mengadili juga?⁴⁶

Jerome H. Skolnick dalam bukunya *Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society* memberikan lima hal dalam lingkungan tugas polisi, yang melemahkan konsepsi hukuman sebagai tugas primer dari tindakan polisi ialah :

1. Psikologi sosial dari kerja polisi yaitu hubungan antara lingkungan tugas dengan kepribadian kerja dan kedaulatan hukum.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1983, Halaman 111.

2. Taruhan polisi dalam mempertahankan kedudukan otoritasnya, terutama kepentingannya dalam menopang pola-pola penegakan hukum yang telah diterima.
3. Sosialisasi polisi terutama pengaruhnya atas bea administratif polisi.
4. Kesempatan polisi untuk bertindak secara tidak konsisten dengan kedaulatan hukum, sebagai akibat penglihatan yang kurang baik atas sebagian kelakuannya.
5. Faktor-faktor yang berkaitan ialah merupakan suatu tekanan terhadap pribadi polisi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih efisien dari pada penyelesaian konflik.⁴⁷

Selanjutnya jika polisi senantiasa mengembangkan suatu konsepsi hukum bukan profesional managerial, mereka akan hanya melakukannya, jika lingkungannya menurut kepatuhan dan menyediakan ganjaran atas kepatuhan itu semata-mata dengan melihat polisi hanya bertanggung jawab dalam menghadapi kriminalitas. Fungsi polisi dalam suatu lingkungan cenderung secara normatif maupun substantif mendukung gagasan efisiensi administratif, yang telah menjadi ciri tugas pekerjaan polisi. Kejadian-kejadian pelanggaran

⁴⁷Jerome Skolnick, *Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society*, dalam Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay (ed). *Law and the Behavioral Sciences*. The Bobbs Merrill. 1969, Halaman 904.

hukum umpamanya, oleh pihak polisi lebih dilihat dari segi masalah kepolisian dari pada masalah keadilan. Hal ini antar lain disebabkan tugas pokok dari kepolisian, yang memandang keamanan masyarakat secara langsung sebagai tugasnya. Lebih cepat seseorang yang melanggar tertib masyarakat “diamankan” lebih cepat masalah kepolisian tersebut teratasi. Jadi dengan demikian, polisi secara perorangan maupun organisatoris akan selalu dihadapkan pada suasana tugas yang secara sadar atau tidak sadar membawa mereka pada keasyikan dalam pekerjaannya yang lebih diwarnai masalah-masalah yang melingkupi dan mungkin bukan masalah hukum. Sehingga tidak dapat disangkal akan dapat mengalihkan kesadarannya dari tuntutan-tuntutan tugas utamanya dalam rangkaian tugas sistem peradilan pidana. Misalnya polisi sering dirintangi oleh norma-norma, nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang dilingkungan kerjanya yang ditunjukkan oleh atasannya.

Demikian pula dalam bekerjanya polisi, setiap anggota polisi belajar berperilaku yang sesuai dengan adicita pekerjaannya melalui dua ciri dari pekerjaannya sehari-hari yaitu bahaya dan kekuasaan. Unsur bahaya menjadikan polisi sebagai orang yang selalu “curiga”. Karena

sifat pekerjaannya, maka membuatnya kurang mempunyai kemauan untuk berteman, sebab norma-norma persahabatan dapat mempengaruhi pekerjaannya. Dengan demikian unsur bahaya telah mengasingkan polisi dalam hubungan sosial dengan kelompok penduduk yang dia anggap sebagai simbol bahaya, sedangkan unsur kekuasaan memperkuat unsur bahaya dalam mengasingkan dirinya.⁴⁸

Demikian pula kewenangan polisi yang terlalu luas dan menjadi kabur akan membuat beban baginya, sehingga dalam mengambil keputusan mereka sering melandasi dengan faktor-faktor “non hukum” yang diwarnai perasaan ketidakpastian. Misalnya dapat diajukan gambaran seorang polisi yang lebih begitu memperhatikan dan mempertimbangkan konduitenya yang dihubungkan dengan persetujuan atau ketidaksetujuan atasannya terhadap keputusan dan tindakannya, dari pada mengkaitkan dengan pertanggungjawabannya melalui aturan-aturan hukum yang ada.

Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai fungsi antara lain menegakkan hukum, menjaga ketertiban dalam rangka dan untuk melindungi masyarakat dan membimbing masyarakat menjadi warga

⁴⁸Jerome Skolnick, *Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society*, New York : John Wiley dan Sons, 1975, Halaman 44.

negara yang patuh hukum. Selain itu fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai kekuatan sosial politik. Ia harus ikut berprestasi dalam lapangan sosial politik dalam rangka mengamankan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya POLRI tidak hanya melaksanakan "*law enforcement*" semata, melainkan melakukan pula tindakan-tindakan lain yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum seperti melaksanakan "*Order maintenance*".⁴⁹

Demikian pula, misalnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelajar, tidak hanya dengan melaksanakan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengajukan pelajar ke pengadilan saja, melainkan pula melakukan upaya, yaitu mepergunakan konsep POLRI dalam menanggulangi dan mengidentifikasi faktor-faktor stimulan timbulnya gangguan kamtibmas sebagaimana kejahatan yang terjadi pada umumnya, maka dapat ditemukan adanya faktor-faktor stimulan pada setiap tingkat ancaman, seperti adanya "**faktor sosio-struktural sosial**" yang

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, Halaman 22.

merangsang bagi berkembangnya “faktor-faktor korelatif kriminogen” menjadi “police hazard” dan selanjutnya adanya “faktor pencetus” yang dapat merubah “police hazard” menjadi “ancaman faktual” atau “ancaman nyata”.

Upaya penanggulangan dalam mengeleminasi faktor stimulan tersebut dilakukan melalui peran POLRI sebagai berikut :

- a. Sebagai alat negara penegak hukum, yang mahir, terampil dan berwibawa dengan mengutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan.
- b. Sebagai pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- c. Sebagai alat pengatur ketentuan masyarakat dari ancaman gangguan.
- d. POLRI memberikan bantuan kepada masyarakat terhadap setiap masalah yang dihadapi, sehingga inisiatif yang berlebihan dari masyarakat dapat dihindari.
- e. POLRI harus mampu merekayasa kehidupan masyarakat sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan yang telah ada.⁵⁰

Dengan demikian peran POLRI dalam upaya penanggulangan gangguan kamtibmas serta mengeliminasi faktor-faktor stimulan tersebut mencakup dalam arti yang luas, yaitu sejak dari upaya represif, preventif sampai dengan tugas pre-emptive dalam arti ikut serta dalam menata kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah Pembinaan Kamtibmas.

⁵⁰Banurusman, *Identifikasi Faktor-Faktor Stimulan Timbulnya Gangguan Kamtibmas dan Upaya Penanggulangannya*, Makalah Pada Seminar Faktor-Faktor Stimulan Timbulnya Gangguan Kamtibmas, Surabaya, POLDA Jatim, 1990, Halaman 28.

Untuk keberhasilan tugas tersebut, maka Polri menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka Binkamtibmas Polri diharapkan bertindak selaku pengambil inisiatif, sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat segera ditanggulangi.
- b. Secara ofensif mengajak instansi yang terkait dalam rangka Binkamtibmas, sehingga dapat ditumbuhkan persepsi yang sama dalam menangani setiap permasalahan yang ada.
- c. Berusaha meningkatkan tanggung jawab masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam pembinaan Kamtibmas.

Masih berkaitan dengan upaya Polri dalam penanggulangan ini maka untuk keberhasilannya terdapat tiga upaya pokok yaitu :

- a. Dapat membina suatu sistem aparatur negara penegak hukum yang bersih, cakap dan berwibawa.
- b. Membangun kemampuan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang timbul dari dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

c. Dapat mengintegrasikan sistem aparaturnya penegak hukum dan masyarakat dalam suatu keterpaduan yang harmonis.⁵¹

Membahas tugas dan wewenang Polri sebagai aparaturnya penegak hukum yang menduduki urutan pertama dalam sistem peradilan pidana, juga tidak dapat terlepas dari sikap dan perilaku sebagai aparaturnya penegak hukum yang selalu mengundang perhatian masyarakat untuk mengikuti gerak-geriknya dalam perjalanan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo, dalam hal ini mengemukakan :

“Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik, oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup. Karena memang ditangan Polisi itulah hukum mengalami perwujudan setidak-tidaknya didalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkrit sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya”.⁵²

Apa yang digambarkan diatas paling tidak memang demikianlah pandangan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum (polisi) hal ini disebabkan ada kecenderungan yang kuat dikalangan

⁵¹ Ibid, Halaman 29.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, Tanpa Tahun, Halaman 95.

masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum.⁵³

Polisi sebagai penegak hukum pidana adalah aparat pertama dalam proses penegakan hukum, ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police discretion*) ia merupakan awal mula dari proses pidana. Karena keahliannya maka polisi merasa lebih tahu dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, dapat terjadi polisi lalu memperbesar penekanan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan ancaman hukum formil. Hal ini akan nampak menjadi lebih sulit jika penekanan tersebut dilakukan oleh oknum sehingga masyarakat tidak segan-segan menafsirkan hal tersebut sebagai pencerminan hukum atau tindakan dari lembaganya. Apalagi jika sampai terjadi sifat prosedural hukum acara pidana (KUHP) dipandang membatasi perkembangan polisi sebagai spesialisasi penyidikan dengan karakteristik “tidak mudah percaya”, “selalu curiga”, dan sebagainya. Maka pada kondisi tertentu, apakah penggunaan kekerasan yang selalu berhubungan dengan pekerjaan polisi itu,

⁵³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1987, Halaman 133.

merupakan suatu “kekerasan biasa” ataukah cenderung bersifat “brutalitas”.

Penggunaan kekerasan oleh polisi adalah salah satu perlengkapan untuk dapat menjalankan pekerjaannya, membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tetapi dikatakan Satjipto Rahardjo pada saat seminar “Pendekatan Sosiologis dalam Penyelenggaraan Hukum Pidana” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1986, bahwa antara penggunaan kekerasan yang dibutuhkan dan yang sudah menjadi “brutal” terbentang tabir yang samar-samar, sehingga tidak mudah untuk menentukan kriterianya dan sampai dimana penggunaan kekerasan itu masih termasuk kedalam kategori wajar. Walaupun demikian, Satjipto Rahardjo dalam tulisannya di Suara Merdeka mengatakan, polisi adalah badan yang diberi kekuasaan untuk menggunakan kekerasan dalam menjalankan pekerjaannya, bahwa polisi diberi kekuasaan untuk menggunakan kekerasan bisa dilihat dari perlengkapan yang dibawanya, seperti, pistol dan borgol serta pentungan. Lebih lanjut dikatakan beliau, pada saat Polisi dihadapkan pada masalah-masalah pengembangan hak-hak asasi dalam masyarakat, maka pada waktu itu tantangan yang

dihadapi oleh Polisi bisa diringkas dengan kata-kata “Bagaimana menjadi polisi yang sensitif”. Polisi yang sensitif adalah lambang Polisi yang sekalipun harus menggunakan kekerasan, tetapi pada waktu yang sama berpikir, bahwa pekerjaannya adalah melindungi masyarakat kontradiksi yang susah untuk dilayani.

Demikian pula Egon Bittner,⁵⁴ menurutnya berbicara tentang penggunaan kekerasan yang sah oleh Polisi praktis tidak ada artinya. Sebetulnya tidak ada orang yang tahu apa yang sesungguhnya ia maksudkan dengan soal itu, begitu juga tentang masalah penggunaan kekerasan secara minimum. Kata Bittner, apa juga bayangan yang ada dalam pikiran kita pada saat kita berbicara mengenai penggunaan kekerasan secara sah itu, yang kita maksud adalah jelas yaitu bahwa Polisi tidak boleh melakukan kejahatan kekerasan lebih dari itu kita tidak bisa membuat patokan dan semuanya lalu terserah kepada Polisi yang menggunakannya.

Mengingat kekuasaan yang dimiliki Polisi terlalu luas, maka akan diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh Polisi, terutama dalam hal menilai suatu perkara yang dihadapi. Sebagai contoh

⁵⁴Egon Bittner, *The Functions of The Police in Modern Society*, Cambridge, Massachusett, Oelgeschlager, Gun and Hain, 1980, Halaman 38.

sebelum melaksanakan penyidikan Polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu, sesungguhnya tindakan penyelidikan ini merupakan filter terhadap peristiwa -peristiwa yang terjadi, apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Sebagaimana dikatakan Kadri Husin, bahwa :

“Berdasarkan wewenang yang ada padanya, Polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana, Polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh Polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria “mau atau tida mau”, wewenang kepolisian atau “police discretion” lebih ditekankan kepada “kewajiban” menggunakan wewenangnya. Disinilah menurut hemat kami dituntut kemampuan intelektual dan pengabdian dari polisi, sebagai aparat penegak hukum”.⁵⁵

Masalah diskresi yang ada pada polisi bukanlah masalah yang sangat sederhana, karena dapat saja terjadi konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat, dengan demikian dalam penggunaan diskresi harus berhati-hati, penerapannya harus dengan penuh pertimbangan dan dilakukan oleh anggota polisi yang mempunyai dedikasi dan intelektual yang tinggi. Menyangkut masalah diskresi, Soeryono Soekanto mengatakan bahwa, diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada

⁵⁵Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP* (Tesis), Program Pascasarjana UI, Jakarta, Halaman 93.

peraturan. Walaupun ada diskresi, maka dalam hal ini mempertimbangkan beberapa faktor, menyangkut masalah :

1. apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan;
2. adakah yang dirugikan atau tidak;
3. kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan;
4. apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan, dan akibatnya bagaimana;
5. bagaimana menghadapi gangguan keamanan di jalan raya dalam keadaan tidak bertugas;
6. bagaimana menindak pihak bersalah yang ternyata masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan atasan atau rekan sekerja;
7. apakah yang diharapkan dari penegak hukum.

Persoalan penggunaan diskresi seperti diuraikan diatas, dialami pula oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya di Amerika Serikat. Diuraikan Jerome H. Skolnick, polisi yang menjalankan tugasnya dalam kerangka susunan negara demokrasi, disatu pihak dituntut untuk menjamin berjalannya "ketertiban", sedangkan dilain pihak untuk menjalankannya dalam kerangka "*rule of law*". Diterimanya kedua ide

tersebut, yaitu hukum dan ketertiban (*law and order*), menyebabkan timbulnya komplikasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi.

Hukum dan ketertiban memiliki posisi yang bertentangan, karena didalam hukum terkandung pembatasan-pembatasan terhadap tata kerja untuk mencapai ketertiban. Mengenai hal ini secara tegas dikatakan oleh Skolnick, "seorang polisi cenderung untuk memelihara praduga bersalah. Jika ia melakukan penahanan dan memutuskan untuk memproses seorang tersangka, maka seorang polisi merasa bahwa tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang disangkakan. Ia percaya bahwa sebagai seorang spesialis dalam kejahatan ia mempunyai kemampuan untuk membedakan antara yang bersalah dan yang tak bersalah"⁵⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, Herbert L. Packer dengan teorinya yang dikenal *Two Models of The Criminal Process*, masing-masing adalah *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Di dalam *Crime Control Model* menggambarkan pemikiran perlunya efisiensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Karena polisi dianggap profesional dalam melaksanakan tugas maka bekerjanya berdasarkan

⁵⁶Jerome Skolnick, Lokcit, Halaman 45.

prinsip "*presumption of guilt*" (praduga bersalah). dengan kata lain, sekali terdapat petunjuk yang dapat membuktikan adanya kesalahan kepada pelaku tindak pidana, maka hal itu memungkinkan seseorang (pelaku tindak pidana) ditahan untuk diproses lebih lanjut. Maka segenap langkah yang dilakukan disusun berdasarkan atas dugaan keras bahwa orang itu telah bersalah. Namun yang jelas praduga bersalah itu dioperasikan sebelum si tersangka menjadi terdakwa.⁵⁷

Dari beberapa uraian dan penjelasan yang menyangkut tugas dan peranan yang harus dilakukan oleh polisi dalam mengantisipasi masalah kejahatan begitu kompleksnya, kiranya untuk melengkapi pembahasan ini, dapat dikutip pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan :

.....dari beberapa karakteristik pekerjaan kepolisian sebagaimana diuraikan diatas, mudah-mudahan sudah dapat dimengerti/dipahami betapa menariknya pekerjaan polisi itu untuk diamati dan dipelajari. Hanya saja sangat disayangkan, bahwa kepustakaan mengenai polisi di Indonesia saya rasa sangat kurang dan menjadi lebih kurang lagi, oleh karena ternyata, bahwa yang harus kita ketahui tentang seluk beluk kepolisian masih sangat luas dan banyak sekali".⁵⁸

⁵⁷Herbert L. Packer , *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford, California University Press, 1968, Halaman 160-161.

⁵⁸Satjipto Rahardjo, Lokcit, Halaman 101.

C. Pengertian dan Karakteristik Kejahatan yang Dilakukan Pelajar.

Kejahatan yang dilakukan pelajar pada umumnya jarang ditemui adanya motif khusus mengapa pelajar melakukan kejahatan, hal ini berbeda dengan motif kejahatan yang dilakukan orang dewasa pada umumnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan pelajar terjadi sebagai akibat dari ekses “kenakalan” sesuai dengan usianya yang masih remaja, sehingga dikenal dengan istilah kenakalan remaja.

J.E. Sahetapy dalam hal ini mengatakan, masalah delinkuensi anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi situasi tertentu.⁵⁹

Lebih lanjut dikatakannya, kalau memang dapat diterima bahwa tingkah laku melanggar norma dari anak delinkuen itu ditentukan oleh sikapnya terhadap situasi tertentu, maka dalam usaha penanggulangan preventif harus diusahakan agar terjadi perubahan dari sikap ini.⁶⁰

⁵⁹J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, 1989, Halaman 45.

⁶⁰Ibid, Halaman 46.

Dalam hal membicarakan tentang delinkuensi anak banyak teori-teori yang bertujuan mencari faktor penyebab terjadinya delinkuensi anak, dalam hal ini dapat ditemui konsepsi yang menyangkut :

1. aspek yuridis;
2. aspek kriminologis, sosiologis;
3. dan aspek psikologis.

Ad. 1. Delinkuensi anak konsepsi yuridis, dapat dilihat dalam :

Pasal 489 ayat 1 KUHP menyebutkan : “Kenakalan anak adalah kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan diancam dengan denda.....dst. Dan konsep POLRI , dalam hubungannya dengan masalah kenakalan remaja ini berangkat dari konsep “*Juvenile Delinquency*” yang dapat diartikan : “Kelainan perilaku serta perbuatan yang bersifat asosial, pelanggaran norma-norma sosial, hukum dan agama yang apabila dilakukan oleh orang dewasa, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

Ad. 2. Delikueni anak konsepsi kriminologis, dapat ditinjau dengan

memperhatikan dua pendekatan, yaitu : Pertama, pendekatan positivistic; dan kedua pendekatan kritis. Kedua pendekatan tersebut dapat dijelaskan bahwa, Pertama : pendekatan positivistic, dalam kriminologi menekankan pada asumsi bahwa norma-norma kemasyarakatan (termasuk didalamnya norma hukum) merupakan konkretisasi dari hasil kesepakatan (konsensus) dari seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian menurut pandangan ini seorang pelaku kejahatan atau perilaku menyimpang dianggap seseorang yang “aneh” atau “lain dari pada yang lain” dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Ia dipandang sebagai pribadi yang “sakit” oleh karenanya perlu didekati dengan model terapi agar si pasien itu menjadi sembuh. Kedua : Pendekatan yang bersifat kritis, lebih menekankan pada permasalahan bahwa kejahatan bukan merupakan suatu perwujudan “kelainan” seseorang individu dalam konteks kemasyarakatan, melainkan lebih dipandang sebagai perwujudan proses interaksi yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakat luas, termasuk dalam hal ini aparat

penegak hukum, calon korban kejahatan dan masyarakat pada umumnya. Hingga tidak mengherankan apabila pendekatan yang diterapkan dalam kajian kriminologi kritis ini lebih pada masalah proses interaksi yang terjadi sehingga seorang tertentu memperoleh “cap” atau “label” sebagai pelaku kejahatan.

Dari kedua rumusan tersebut diatas, tampak sekali cara pandang pendekatan positivistic dan kritis dalam merumuskan masalah kejahatan dan kenakalan remaja. Erat kaitannya dengan pembicaraan kenakalan remaja ini ialah apa yang disebut sebagai remaja bermasalah, kalau diatas disinggung tentang konsepsi kenakalan remaja dari berbagai pandangan dalam kriminologis, yaitu pendekatan positivistic dan pendekatan kritis, maka dalam pembicaraan ini fokusnya diarahkan pada remaja yang mempunyai masalah, walaupun masalah dimaksudkan disini tidak selalu bermakna sebagai kenakalan atau kriminalitas. Remaja bermasalah dalam hal ini dimaksudkan seseorang (remaja) yang berperilaku sebagai akibat : “Ada suatu kondisi perbedaan kepentingan antara dua pihak, pihak pertama adalah kaum remaja dan pihak lain adalah

pihak diluar remaja. Perbedaan kepentingan tersebut pada akhirnya terjemakan sebagai perbedaan budaya yang berkembang diantara mereka. Perbedaan budaya tersebut pada akhirnya berkembang sebagai konflik nilai dan norma antara remaja dengan masyarakat (dominan). Oleh karena sifatnya yang demikian, maka remaja bermasalah dalam berperilaku tertentu memperoleh cap sebagai kenakalan atau penyimpangan bahkan juga sebagai kriminalitas”.⁶¹

J.E. Sahetapy mengatakan, pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh “kelainan” atau “kemunduran” biologik atau psikologik dari si pelaku. Teori-teori sosiologik ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagai tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal. Lebih lanjut dikatakan, secara umum maka teori-teori sosiologik dapat pula dibagi berdasarkan “penekanan” pada :

- aspek konflik kebudayaan yang terdapat dalam sistem sosial bersangkutan (terdapat konflik antara kebudayaan-

⁶¹Paulus Hadisuprpto, *Kenakalan Remaja dan Lingkungannya (Suatu Tinjauan Kriminologik)*, Dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, edisi No. 5 Tahun 1990, FH UNDIP, Halaman 12.

kebudayaan dari berbagai kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai “benar” dan “salah”);

- Aspek disorganisasi sosial yang terdapat dalam daerah-daerah tertentu dimana terdapat konflik kebudayaan tadi (karena heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat setempat dan karena itu pula tidak dapat mengontrol anak-anaknya. Kedua-duanya dinamakan “teori-teori kontrol”, karena mencoba menerangkan delinkuensi anak berdasarkan ketiadaan kontrol (pengendalian) efektif dari orang tua dan masyarakat;
- Aspek ketiadaan norma (anomi) dalam sistem sosial dari masyarakat bersangkutan (disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan ioleh sistem sosial bersangkutan kepada warga-warga masyarakatnya untuk mencapai aspirasi tersebut. Yang penting bukan perbedaan antara miskin dan kaya, tetapi ketidak mampuan si miskin untuk mengikuti sistem nilai dan norma masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya dibidang ekonomi);
- aspek sub-budaya (sub kultur) yang terdapat dalam kebudayaan induk (dominant culture) masyarakat bersangkutan (dan sub budaya mana mempunyai nilai dan norma yang berbeda atau kadang-kadang malahan bertentangan dengan nilai dan norma kebudayaan induk). Kedua kelompok teori ini biasanya dipergunakan untuk mencoba menerangkan besarnya angka delinkuensi anak dalam kelas pekerja (lower/working class) dan dinamakan “teori konflik”.⁶²

⁶²J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, Lokcit, Halaman 49-50.

Ad. 3. Delinkuensi anak konsepsi psikologis, mengenai sebab terjadinya delinkuensi anak, menurut Kartini Kartono kejahatan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu “kelas defektif secara sosial” dan mempunyai sebab-sebab yang majemuk; jadi sifatnya multi kausal. Didalam teori psikologi menurut para sarjana dikenal :

- a. **Teori biologis,** yaitu tingkah laku atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir;
- b. **Teori psikogenis,** yaitu menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaan. Antara lain faktor intelegensia, ciri pribadian, motivasi, sikap-sikap salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain;
- c. **Teori sosiogenis,** penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak dan remaja adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.
- d. **Teori subkultur delinkuensi,** sumber juvenile delinkuensi yaitu, sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh remaja delinkuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat itu antara lain, populasi tyang padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik

perkampungan yang sangat buruk, banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁶³

Sebagaimana diketahui masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak yang telah ditinggalkan ke masa dewasa yang belum dijalani, sehingga seorang remaja telah meninggalkan norma-norma kehidupan yang telah dianut dengan matang dan kemudian menerima serta mengikuti norma-norma kehidupan baru yang belum pernah dialaminya. Apalagi pada remaja yang berdiam di kota-kota besar, dimana terjadi perubahan-perubahan norma secara cepat akibat adanya heterogenitas sosial, budaya dan lingkungan masyarakatnya. Padahal dalam situasi demikian para remaja masih mencari-cari pola perilaku dan kepribadian yang sesuai baginya, yang sering dilakukannya dengan metode coba-coba yang kemungkinan menimbulkan akibat negatif baginya. Tetapi kesemuanya itu, mereka lakukan dalam rangka pembentukan sikap, watak, kepribadian dan perilakunya, yang dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh lingkungannya masing-masing.

⁶³Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, 1986, Halaman 25-32.

Gejala kenakalan remaja dapat bermula dari hal-hal yang sederhana dan dapat meningkat ke kategori yang berbentuk perbuatan yang bersifat kriminalitas.

Gejala tersebut misalnya hanya bermula dari kesukaan membolos sekolah, kebiasaan mencari keributan, corat-coret pada tembok dan tempat umum, mengganggu lawan jenisnya, dan sebagainya. Kenakalan yang demikian masih dapat ditoleransi sebagai kenakalan dalam batas kewajaran.

Perkembangan selanjutnya kenakalan tersebut meningkat pada kesukaan mengunjungi tempat-tempat pelacuran, perjudian, mengadakan kebut-kebutan di jalan raya, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan keamanan umum dan akan meningkat lagi pada perbuatan yang mengarah kepada tindak kriminalitas yang lebih tinggi lagi seperti pencurian dengan segala macam bentuknya, penadahan, perampokan, memalsukan harga barang pada nota pembelian, perkelahian, menggunakan narkoba dan obat perangsang, perkosaan dan perilaku seks menyimpang, dan sebagainya.

Dua belas tahun yang lalu Y. Singgih D. Gunarsa, telah melakukan pengamatan atas murid-murid sekolah dan anak putus sekolah, tentang kenakalan yang diperbuatnya, sebagai berikut :

1. membohong, memutar balikan kenyataan dengan tujuan menipu atau menutupi kesalahan;
2. membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah;
3. kabur, pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua atau menantang keinginan orang tua;
4. keluyuran, pergi sendiri maupun kelompok tanpa tujuan, mudah menimbulkan iseng dan perbuatan negatif;
5. memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya pisau, pistol, pisau silet, dan lain-lain sebagainya;
6. bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara-perkara yang benar-benar kriminal;
7. berpesta pora semalam suntuk tanpa pengawasan, sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (a moral dan a sosial);
8. membaca buku-buku cabul dan kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan;
9. secara kelompok makan di rumah makan tanpa membayar;
10. turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan alasan kesulitan ekonomi maupun tujuan lainnya;
11. berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau mengisap ganja, sehingga merusak dirinya maupun orang lain.⁶⁴

Guna memperjelas perbedaan pengertian anak nakal dan kejahatan yang dilakukan oleh anak, menurut Pasal 2 poin 2 Undang-

⁶⁴Singgih G. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Gunung Mulia, 1980, Halaman 30.

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dirumuskan sebagai berikut, yang dimaksud dengan anak nakal ialah :

1. Anak yang melakukan tindakan pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Dari uraian diatas kiranya dapat diambil suatu pengertian bahwa secara umum kenakalan remaja adalah :

1. merupakan kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan yang bersifat asosial. Dalam hal ini terdapat norma sosial dan norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat;
2. merupakan tingkah laku, perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa yang normal disebut pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukuman menurut ketentuan yang berlaku;
3. merupakan tingkah laku, perbuatan atau tindakan negatif yang dilakukan oleh remaja;

Secara yuridis yang termasuk kenakalan atau kejahatan itu ialah hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral manusia dan merugikan orang lain atau merugikan

masyarakat yang telah dirumuskan dan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang formal.

Pengertian sosiologis lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian secara yuridis sebab menurut pengertian sosiologis ini, kenakalan itu selain perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan hukum formal yang berlaku, juga meliputi segala tingkah laku manusia walaupun belum atau tidak ditentukan dalam undang-undang, yang pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai perbuatan yang secara ekonomis maupun psikologis menyerang dan merugikan masyarakat serta melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Sedangkan mengenai pengertian remaja secara umum, yang dimaksud dengan remaja adalah fase usia seseorang di atas kategori anak-anak dan dibawah kategori dewasa dengan segala perkembangan jiwanya, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan ukuran/kriteria untuk menentukan anak/remaja pada umumnya didasarkan pada batas usia. Atas dasar hal tersebut diatas untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang anak atau remaja pembahasan

akan dikaji dari beberapa aspek antara lain dari aspek sosiologis, psikologis dan yuridis.

1. Pengertian Anak atau Remaja dilihat dari aspek sosiologis.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁶⁵

Lebih jauh dikemukakan oleh Soepomo, bahwa :

“Tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa ; hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. ‘Anak yang belum dewasa’ di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri; yang sungguh masih kanak-kanak. Kami tidak menemukan petunjuk

⁶⁵Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, Karya Nusantara, 1977, Halaman 18.

bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bilamana seorang dianggap dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerja); sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum; apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya.⁶⁶

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa barat, dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri)
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis ukuran/kriteria yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan kepada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang

⁶⁶Ibid, Halaman 19.

untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya, oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seorang anak diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa. Oleh karena itu apabila seseorang belum dapat memenuhi kriteria tersebut, maka ia masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria

maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa (*al-huluma*). Sedangkan bagi seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

Dalam pandangan hukum Islam seseorang yang dikategorikan memasuki usia *baligh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kata lain terhadap mereka yang telah *baligh* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.⁶⁷

2. Pengertian Anak Dilihat Dari Aspek Psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan, manusia mengalami fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

⁶⁷Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Jakarta, Ruhama, 1994, Halaman 11.

Dalam hal fase perkembangan kejiwaan yang dialami oleh seorang anak, Zakiah Daradjat lebih jauh menguraikan dalam beberapa bagian, antara lain : ⁶⁸

1. Masa kanak-kanak, yang terbagi dalam :

a. Masa Bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun. Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu. Pada umur ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaannya. Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung pada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang kepadanya. ⁶⁹

b. Masa kanak-kanak pertama, usia antara 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya.

⁶⁸Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bandung, Bina Cipta, 1985, Halaman 38-39

⁶⁹Soesilowindradini, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*, Surabaya, Usaha Nasional, Halaman 71

c. Masa kanak-kanak terakhir, usia antara 5-12 tahun.

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap pemantapan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama serta berkumpul tanpa aturan sehingga biasa disebut dengan gang. Pada tahap ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.⁷⁰

2. Masa Remaja antara usia 13-20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tumbuh dari luar dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncang karena banyak perubahan yang terjadi dan tidak

⁷⁰Pada usia sekolah ini perkembangan anak amat pesat. Karena lingkungan keluarga tidak lagi mampu memberikan fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak, terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan jaman modern., maka untuk mengembangkan semua potensinya seorang anak memerlukan satu lingkungan sosial baru yang lebih luas berupa sekolahan. Pada usia sekolah ini sikap hidup yang egosentris diganti dengan sikap yang Zakelijk objektif dan empiris berdasarkan pengalaman. Ketika menginjak usia antara 13-14 tahun, sikap tersebut berkembang menjadi logis rational. Emosionalitas anak menjadi berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (ratio, fikir) menjadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar, Dengan demikian, masa sekolah rendah disebut sebagai periode intelektual, Kartini Kartono, *Psikologi Anak, Bandung* , Alumni, 1979, Halaman 136-137.

stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat, juga Soesilowidradini membagi masa remaja ke dalam masa remaja awal dan masa remaja akhir. Pada masa pertama adalah masa seorang anak menginjak usia 13 sampai 17 tahun. Dalam masa ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak. Sedangkan pada masa yang disebut terakhir adalah masa usia antara 17 sampai 21 tahun. Pada masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah bila dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.⁷¹

3. Masa Dewasa Muda, antara usia 21 sampai 25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa,

⁷¹Soesilowidradini, Opcit, Haslaman 71.

emosi sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapan.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seseorang anak, akan memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis menentukan bahwa batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa melainkan baru menginjak remaja (pubertas). Pada masa ini remaja merupakan masa pertumbuhan, baik dari segi rokhani maupun jasmani. Pada masa ini pada umumnya mengalami masa krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rokhani. Pada masa remaja atau pubertas ini bisa dibagi kedalam empat fase, yaitu :

1. Masa awal pubertas, disebut sebagai masa pueral atau pra-pubertas.
2. Masa menentang kedua, fase negatif, trotzalter kedua, periode verneinung.

3. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pubertas anak laki-laki.
4. Fase adolesensi, mulai kurang lebih 17 tahun sampai sekitar 19 dan 21 tahun.⁷²

4. Pengertian Anak atau Remaja Dilihat Dari Aspek Yuridis.

Secara hukum kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan akibat hukum tersebut menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana erat hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum tersebut akan membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran/pemahaman terhadap perumusan kriteria seorang anak. Dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak, secara tegas dinyatakan bahwa :

"For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier"(Yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang

⁷²Kartini Kartono, Op Cit , Halaman 150.

yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).⁷³

Selanjutnya juga dijelaskan, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 (Kesejahteraan Anak), bahwa :

“Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Dalam penjelasan lebih lanjut dikemukakan bahwa :

“Batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seseorang dicapai pada umur tersebut”.

Selanjutnya juga dijelaskan pula bahwa :

“Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai

⁷³United Nations Children's Fund, *Convention On The Right Of The Child*, Resolusi PBB No. 44/25. Lihat juga dalam *SMR-JJ (Beijing Rules), Scope Of The Rules And Defenition Used*, dinyatakan bahwa “Juvenile is achild or young person who under the resvektive legal system, may be dealt with for an offence in menner which isdifferent from an adult (Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara berbeda sari seorang dewasa), Selanjutnya juga dijelaskan “.....It should be noted age limits will depend on, and are explicity made dependent on, each respective legal system, thusfully respecting the economic, social, political, cultural and legal system of Member States. This make for a wide variety of ages coming under the definition of “juvenile”, ranging from 7 years to 18 years or above.....(Dalam hal ini harus dicatat bahwa batas usia anak akan sangat tergantung pada sistem hukum negara anggota di satu pihak dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dilain pihak, oleh karena itu batasan anak dirumuskan secara relatif, yaitu anak (juvenile) adalah seseorang yang berumur antara 7-18 tahun atau mungkin diatasnya.....).

kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”.⁷⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa dapat kita temukan dalam Pasal 330 Ayat 1, yang menyatakan bahwa :

“Bila peraturan perundangan-undangan menggunakan istilah belum dewasa, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan.....”

Dari rumusan diatas dapat diartikan bahwa batas antara belum dewasa dengan telah dewasa adalah umur 21 tahun, kecuali :

- a. Anak sudah kawin sebelum umur 21 tahun, atau
- b. Pendewasaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 419 KUHPerdata.

Berdasarkan beberapa pengertian sebagaimana telah diuraikan diatas kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud anak/remaja adalah mereka yang berusia 13 tahun sampai dengan mereka yang berusia 21 tahun dan belum menikah.

⁷⁴Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, *tentang kesejahteraan Anak*, LN RI 1979, No. 32.

Adapun dasar pertimbangan ataupun alasan untuk mengemukakan batas umur antara 13 - 21 tahun untuk pengertian anak/remaja Indonesia ini ialah :

- a. pada umur sebelum 13 tahun dikategorikan masa atau usia anak-anak;
- b. pada umur atau usia sebelum 13 tahun belum dapat dituntut penuh untuk mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakannya yang melanggar norma sosial, agama, norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik orang tua, keluarga, kecuali mereka sudah menikah;
- c. pada usia dibawah 13 tahun belum dapat dituntut penuh tanggung jawab sosial oleh lingkungan sosialnya kecuali mereka sudah menikah atau sudah pernah menikah;
- d. prosentase kenakalan yang sementara dilakukan oleh mereka yang berumur 13 sampai 21 tahun berdasarkan data yang ada adalah cukup tinggi;
- e. pada mulanya bentuk dan sifat kenakalan pada umur sebelum 13 tahun belum begitu serius dan tidak begitu membahayakan dibandingkan dengan kenakalan yang dilakukan oleh orang yang sudah berumur 13 tahun ke atas;

f. pada umur 18 tahun sampai 21 tahun, dikategorikan sebagai umur menjelang dewasa yang apabila melanggar hukum sudah dapat diberlakukan menurut ketentuan yang berlaku, tetapi lebih ringan dari pada perlakuan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum, usia dewasa pada umur 21 tahun keatas.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan yang dilakukan pelajar sebagai ekses dari kenakalan adalah mencakup semua bentuk kelainan, atau penyimpangan tingkah laku, perbuatan atau tindakan yang sifatnya asosial yang dilakukan oleh remaja; dalam hal mana terdapat pelanggaran norma sosial maupun norma agama yang berlaku dalam masyarakat dan tingkah laku serta perbuatan melanggar hukum, yang dapat kategorikan sebagai kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengertian atau definisi kenakalan remaja menurut beberapa pendapat yang telah dihimpun oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Menurut psikologi, kenakalan remaja meliputi semua tingkah laku yang menyimpang pada remaja, mulai dari tindakan yang tergolong

kriminal dari orang dewasa seperti pembunuhan dan perampokan hingga perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan umurnya dengan membolos, mengendarai kendaraan, minum alkohol dan kegiatan seksual;

- b. Menurut hukum, kenakalan remaja adalah semua perbuatan orang yang berlawanan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUHP;
- c. Menurut Departemen Sosial, kenakalan remaja dapat dirumuskan sebagai kelainan dalam tingkah laku serta perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial dalam hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan norma agama yang berlaku dimasyarakat dan tindakan melanggar hukum yang apabila dilakukan dapat dituntut atau dihukum menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sedangkan perbuatan yang dapat dikategorisasikan sebagai kejahatan yang dilakukan pelajar (karakteristik) adalah sebagai berikut:

1. Perkelahian pelajar

- a. Perkelahian pelajar secara perorangan yang mengakibatkan salah satu pihak luka-luka atau mati termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 KUHP.

Pasal 351 merumuskan;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp 4.500,-;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 KUHP merumuskan;

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, makapenganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 4.500,-
Pidana ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 KUHP merumuskan;

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dipidana paling lama 7 tahun;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati diancam dengan pidana paling lama 9 tahun;

Pasal 354 KUHP merumuskan;

- (1) Barang siapa melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
- (2) Jika perbuatan-perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pasal 355 KUHP merumuskan;

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun;

b. Perkelahian Pelajar Secara berkelompok atau beberapa orang

(Perkelahian Pelajar antar Sekolah). Dapat dikategorikan dalam

Pasal-Pasal 170 dan 358 KUHP.

Pasal 170 KUHP merumuskan;

- (1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- (2) Yang bersalah diancam,

ke 1. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasannya yang digunakan mengakibatkan luka-luka,

- ke 2. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat,
- ke 3. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati,
- ke 4. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 358 KUHP merumuskan;

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlihat beberapa orang selain tanggungannya masing-masing terhadap apa yang khususnya dilakukan olehnya, diancam,

- ke 1. dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka,
- ke 2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

2. Pelajar Mabuk-Mabukan Meminum Minuman Keras :

Pelajar membeli minuman keras tersebut diatas untuk diminum sendiri atau diberikan kepada pelajar lainnya dan mengakibatkan mabuk, dapat dikategorisasikan dalam pasal-pasal 300, 536 dan 492 KUHP.

Pasal 300 KUHP :

- (1) kedua: diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 4.500,- barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun.

Pasal 536 KUHP :

Barang siapa terang-terangan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak Rp 225,-

Pasal 492 KUHP:

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk dimuka umum, merintang lalu lintas, atau, atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain atau melakukan sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak Rp 375,-

Pasal 300 :

- (1) Kesatu : diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 4.500,- .Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman keras yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

3. Pemerasan oleh Pelajar

Pemerasan antar pelajar dikenal dengan istilah “malak” atau dikalangan remaja diistilahkan sebagai “ngompas”. Ketentuan hukumnya, pelaku dikenakan tindakan berdasarkan Pasal 368 dan 355 KUHP.

Pasal 368 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang itu, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 355 (1) KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 4.500,-

ke 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan, sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan orang lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

ke 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

4. Penyalahgunaan Narkotik

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pelajar dapat dikenakan salah satu dari 17 macam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yaitu :

1). Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1)

- tanpa hak,
- menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, tanaman koka atau tanaman ganja. Ancaman pidana, kalau menyangkut tanaman koka atau tanaman ganja maksimum penjara 6 tahun dan denda Rp 10.000.000,- kalau menyangkut papaver maksimum penjara 10 tahun dan denda Rp 15.000.000,-

2). Pasal 23 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3)

- tanpa hak,
- memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotik; Ancaman hukuman, kalau menyangkut daun koka atau tanaman ganja, maximum penjara 6 tahun dan denda Rp 10.000.000,- kalau menyangkut narkotik lainnya maximum penjara 10 tahun dan denda Rp 15.000.000,-.

3). Pasal 23 ayat (6) jo Pasal 36 ayat (6) :

- tanpa hak,
- menggunakan narkotik terhadap orang lain dapat memberikan narkotik untuk digunakan orang lain. Ancaman hukuman, kalau menyangkut daun koka atau tanaman ganja maximum penjara 6 tahun dan denda Rp 10.000.000,-, Kalau menyangkut narkotik lainnya maximum penjara 10 tahun dan denda Rp 15.000.000,-.

4). Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7)

- tanpa hak,
- menggunakan narkotik bagi dirinya sendiri, ancaman hukuman kalau menyangkut daun koka atau tanaman ganja maximum 2 tahun. Kalau menyangkut narkotik lainnya maximum penjara 3 tahun.

5. Pelajar Membawa Senjata Api, Senjata Tajam.

Pelajar masuk sekolah membawa pistol, pisau, gunting, obeng yang diruncing/ditajami, clurit, ganco dan lain-lain. Perbuatan pelajar tersebut dapat dikualifisir dalam rumusan dan dipidana berdasarkan pasal

E. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal

1. Pengertian Kebijakan.

Istilah kebijakan menurut Barda Nawawi Arief, diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda).⁷⁵ Selanjutnya juga Barda Nawawi Arief dalam desertasinya yang berjudul **“Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundangan-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan”** dengan mengutip pendapat Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, mengartikan *Policy* sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁷⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dapat diartikan bahwa rangkaian konsep yang menjadi garis besar rencana

⁷⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, Halaman 27.

⁷⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta, 1994, Halaman 63, Lihat juga dibagian lain dengan mengutip pendapat David L. Sills, menjelaskan pengertian policy dalam dua pengertian, yaitu;

- *On the hand, “policies” are often considered to be ways of doing things, decision rules.In this sense policy would answer the questions “ how do yuo do things around here “ ? and “what are you rules and procedurs ?”, and may be called admininistrative policy.*
- *Alternatively, policies are often regarded as substantive programs, reffering specifically to the content of what is being done, and not necesserily to how it is being done. Policy in this sense answer the questions; “What do you do around here ? and “what kinds of problems do you handle ?” Ibid, Halaman 63 - 64.*

dalam pelaksanaan pekerjaan dan cara bertindak dari suatu organisasi.

Dalam penulisan tesis ini dapat diartikan bahwa kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan untuk merespons terhadap tuntutan akan kebutuhan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Maka secara sederhana penulis dapat merumuskan bahwa kebijakan adalah suatu perencanaan dari pembuat kebijakan (adanya tindakan dari pelaku) mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan (adanya orientasi nilai).

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal

Pengertian Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁷ Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".⁷⁸ Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*".⁷⁹

⁷⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, Halaman 38.

⁷⁸Dalam Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 2.

⁷⁹G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Kluwer- Deventer, 1969, Halaman 57.

Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain :

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁸⁰

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain ;

1. dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

⁸⁰Ibid, Halaman 57, 99, 100.,

2. dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
3. dalam arti yang paling luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸¹

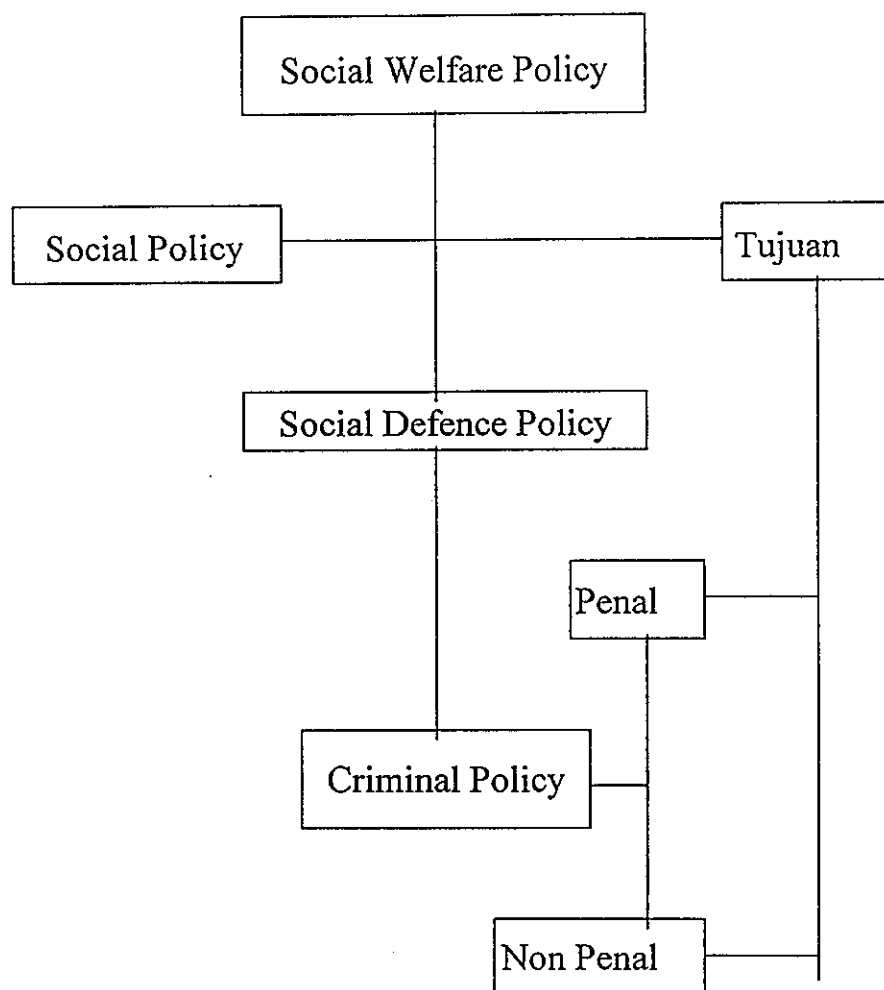
Dari definisi di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternati yang dihadapi.⁸²

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

⁸¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Halaman 113-114.

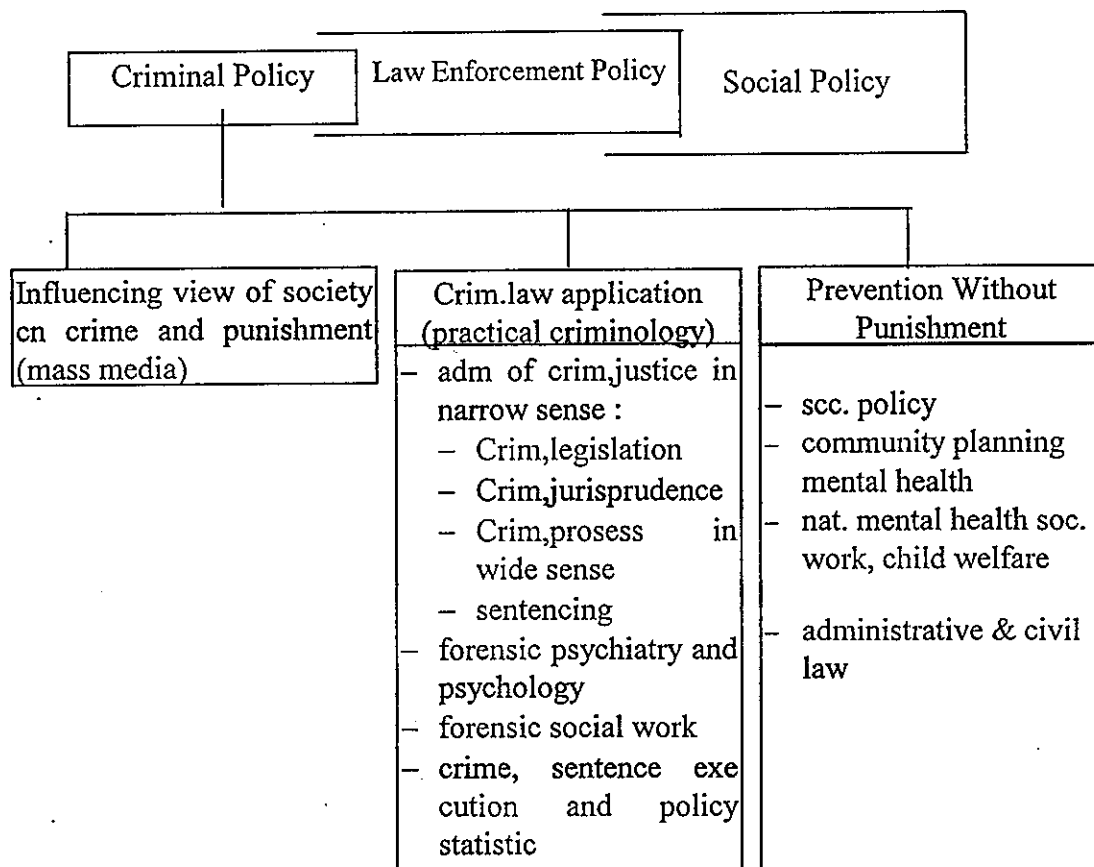
⁸²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Halaman 153.

tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Secara schematis dapat digambarkan sebagai berikut : ⁸³



⁸³ Barda Nawawi Arief, Op Cit, 1996, Halaman 3.

Selanjutnya G. Peter Hoefnagel mengemukakan bahwa :
“Criminal policy as science of policy is part of larger policy : the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.⁸⁴ Berdasarkan hal tersebut diatas secara skematis G. Peter Hoefnagel memberikan gambaran sebagai berikut :



⁸⁴G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminologi*, Kluwer - Deventer, Holland, 1969, Halaman 57

⁸⁵Ibid, Halaman 56.

Dari skema diatas, bahwa usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas dan hal dapat dimasukkan kedalam upaya non penal.
2. Bersifat represif yang menggunakan sarana sarana penal/*criminal law application*.
3. Usaha dengan menggunakan sarana non penal/*prevention without punishment*.

Dengan demikian kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya penal/*criminal law application*, juga dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini, Barda Nawawi arief mengatakan bahwa perlu digali dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "*extra legal system*" atau "*informal and traditional system*" yang ada dalam

masyarakat.⁸⁶ penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan. Keterbatasan kemampuan hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain :⁸⁷

1. **Rubin** menyatakan, bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
2. **Schults**, menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalamnya hukumnya atau kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

⁸⁶Barda Nawawi Arief, Loc Cit, Halaman 57.

⁸⁷Lihat Barda Nawawi Arief, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kertas Kerja Pada Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September 1996, Halaman 2-5. Dan lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 1996, Halaman 59-62.

3. **Johannes Andenaes** menyatakan, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor lain yang membentuk sikap tindakan-tindakan kita.
4. **Wolf Middelndorf** menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari "*general deterrence*" karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Dikemukakan pula oleh Middelndorf, bahwa dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana. Akhirnya ditegaskan olehnya, bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa

yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.

5. **Donald R. Taft dan Ralph W. England** pernah juga menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.
6. **R. Hood dan R. Sparks** menyatakan, bahwa beberapa aspek lain dari "*general prevention*", seperti "*reinforcing social values*", "*strengthening the common conscience*", "*alleviating fear*", dan "*providing a sense of communal security*" sulit untuk diteliti.
7. **Karl O. Christiansen** pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain

"Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti "*general prevention*", pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi

yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), mencegah kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan keterangan-keterangan agresif (*release of aggressivetensions*) dan sebagainya”.

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh “*general prevention*”, pen.) merupakan “*terra incognita*”, suatu wilayah yang tidak diketahui (“*unknow terrotiry*”).

8. S.R. Brody, dari sembilan penelitian (mengenai pemidanaan) yang diamati olehnya, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya

waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*).

9. Akhirnya secara lebih umum M. Cherif Bassiouni pernah menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.

Berbagai ungkapan diatas meninjau keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat tertjadinya kejahatan dan dari sudut berfungsinya/bekerjanya hukum (sanksi), dan hal ini cukup beralasan untuk terus menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal tersebut.

F. Kebijakan Penal dan Non Penal Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Manusia merupakan makhluk sosial dan terlihat bahwa diantara sekian banyak persoalan atau masalah yang timbul tidak akan terlepas dari apa yang kita sebut dengan kejahatan. Selama manusia masih ada, kejahatan tidak akan ada habis-habisnya. Berkaitan dengan laju perkembangan kejahatan tersebut, maka manusia berikhtiar untuk berusaha melakukan perlindungan atas dirinya dari ancaman kejahatan tersebut. Dimana dalam lapangan hukum kita mengenal apa yang kita sebut dengan kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal, dalam pelaksanaannya kebijakan kriminal tersebut dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal), dapat pula dilakukan melalui sarana non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana. Perlu diketahui pula bahwa kebijakan kriminal tersebut bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yaitu usaha dari masyarakat atau negara untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventie (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Melihat perbedaan tersebut tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventie dalam arti luas.⁸⁸ Lebih lanjut pula dikemukakan oleh Sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*kurien am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁸⁹

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan (khususnya kejahatan yang dilakukan oleh pelajar) sarana penal dapat dinilai bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Seperti kita tahu bahwa pelajar melakukan kejahatan tidak didasari oleh motivasi yang tidak jelas kenapa mereka melakukan kejahatan dan dari kasus-kasus yang terjadi nampaknya sarana penal sulit untuk menjangkanya. serta

⁸⁸Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, halaman 118.

⁸⁹Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1983, Halaman 35.

adanya keterbatasan sarana hukum pidana (penal) sebagai upaya penanggulangan kejahatan seperti yang telah penulis kemukakan dibagian lain. Seperti Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam penanggulangan kejahatan, hal ini dapat dilihat dari :⁹⁰

1. Sifat/hakekat dan fungsi hukum pidana

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam menanggulangnya. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan pengobatan *kausatif*, tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

2. Sifat/fungsi pembedaan.

Pendekatan hukum pidana selama ini sangat terbatas dan *fragmentair*, yaitu terfokus dipidananya si pembuat. Dengan

⁹⁰Barda Nawawi Arief, *Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kertas Kerja Pada Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang 2 September 1996, Halaman 6.

demikian efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*treatment atau kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan agar orang tidak melakukan tindak pidana (prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi.

3. Dilihat dari jenis sanksi

Hukum pidana sangat kaku dan sangat terbatas jenis pidana (sebagai obat/remedium) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (obat) mana yang dianggap paling tepat bagi si terpidana. Terlebih pidana (obat) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif / paradoksal dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya dapat menimbulkan efek sampingnya yang negatif.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah kiranya diidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut :

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “ *kurieren am symptom*” oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.
- d. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingnya yang negatif.
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.

f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.

g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Namun demikian persoalan yang timbul adalah apakah hal ini berarti bahwa hukum pidana dengan sanksi pidananya sudah tidak diperlukan lagi dalam upaya menanggulangi timbulnya kejahatan.

Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari.

Sejalan dengan pendapat tersebut paham determinisme menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang

penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang memperbaiki.⁹¹

Persoalan anti pidana ini masih terdengar di abad XX ini dengan slogan barunya yang terkenal "*the struggle against punishment atau abolition of punishment*", misalnya yang dikemukakan oleh Filippo Gramatica, menurutnya hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.⁹²

Pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana seperti dikemukakan diatas menurut Roeslan Saleh adalah keliru,

⁹¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta, 1994, Halaman 19.

⁹²Barda Nawawi Arief, *Ibid.* Halaman 20.

Beliau mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun inti alasannya sebagai berikut : ⁹³

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Selanjutnya dalam penggunaan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the*

⁹³Roeslan Saleh, *Mencari Asas-asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Upgrading Hukum Pidana, Jilid 2, 1971, Halaman 15-16. Lihar juga Barda Nawawi Arief, *Pemidanaan, Masalah-Masalah Hukum No. 16*, UNDIP, 1974, Halaman 14-16.

limiting principles) yang sepatutnya perlu mendapatkan perhatian, antara lain : ⁹⁴

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai sesuatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana akan lebih besar dari kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih bahaya dari perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

⁹⁴Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, 1972, Halaman 43, yang dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kertas Kerja Pada Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang 2 September 1996, Halaman 9.

Didalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*", Herbert L. Packer mengemukakan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime threatener*).⁹⁵

Demikian pula dengan Sudarto, mengemukakan yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi, bahwa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁹⁶

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan-tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spritiul berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayom masyarakat.

⁹⁵Herbert L. Packer, Lokcit, Halaman 366.

⁹⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, Halaman 44-48. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung,, Citra Aditya Bakti, 1966, Halaman 33-34

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan sprituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Memperhatikan beberapa alasan diatas, nampaknya penggunaan sarana penal masih diperlukan keberadaannya, Walaupun ada yang setuju dengan penggunaan dengan sarana penal dan ada yang tidak setuju dengan penggunaan sarana penal. Dan dalam penerapannya harus dilakukan dengan seselektip mungkin, penuh dengan kehati-hatian, cermat dan limitatif.

Untuk itulah dalam penanggulangan kejahatan disamping perlu digunakan kebijakan integral baik melalui upaya penal maupun upaya non penal. Dimana upaya non penal mempunyai posisi kunci dan sangat strategis didalam keseluruhan kebijakan kriminal. Dengan

demikian penggunaan sarana non penal dilihat dari sudut politik kriminal secara global memiliki posisi kunci dari keseluruhan upaya politik kriminal. Seperti yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi, dalam salah satu bukunya yang berjudul "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana" bahwa Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat ; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat ; melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya ; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja ; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.⁹⁷

Selanjutnya juga Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa usaha non penal didalam penanggulangan kejahatan lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global. maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁹⁸

Oleh karena itu wajar apabila Kongres PBB ke 6 tahun 1980 sangat memperhatikan sangat masalah ini. Dalam resolusinya

⁹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Opcit, Halaman 158-159.

⁹⁸Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Fak Hukum, Tanpa Tahun, Halaman 3

mengenai "*Crime trends and crime prevention strategies*, antara lain menyatakan :⁹⁹

- bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;

(*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);

- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;

(*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);

- bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan terbesar penduduk;

(*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of*

⁹⁹Lihat Sixth United Nation Congress on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Report, 1980, Halaman 5. Lihat Juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, Halaman 11

living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population).

Bertolak dari uraian diatas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogianya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non penal. Keterpaduan antara upaya penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan, pada akhirnya guna mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kondisi Polwiltabes

Penelitian diawali dengan mengadakan orientasi di kantor Polwiltabes Bandung, dan melakukan wawancara dengan Kapolwiltabes dan Waka Polwiltabes, untuk mengetahui kondisi umum Polwiltabes Bandung. Selain itu juga melihat kegiatan di masing-masing bagian, baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional.

Secara umum suasana kerja Polwiltabes Bandung terlihat cukup sibuk terutama antara pukul 09.00 sampai pukul 14.00 w.i.b. Setelah itu hingga pagi berikutnya lengang, kadang tampak 2 atau 3 kali petugas melakukan patroli dan sekembalinya ada yang membawa hasil tangkapan pelanggar peraturan lalu lintas, atau beberapa warga masyarakat yang bersengketa. Satu hal yang terlihat menakutkan bagi warga masyarakat yang dibawa ke kantor polisi adalah bila mereka diberitahu akan ditahan atau

disita kendaraannya, diantara mereka ada yang nampak berusaha memberikan berbagai dalih, alasan atau keterangan agar polisi mau mengerti mengapa masalah itu sampai terjadi dan meminta agar jangan sampai ditahan. Ada pula yang berdiam diri saja, seolah menyerah atas kehendak polisi. Di lain pihak, ada pula polisi yang bersedia menerima alasan warga masyarakat yang tidak ingin ditahan, ada pula yang berusaha mendamaikan dengan minta imbalan jasa.

Secara aktif, kegiatan tersebut dimulai dari apel pagi pukul 07.00 dilanjutkan dengan latihan baris berbaris, beladiri, olahraga, atau menerima instruksi dari seorang Perwira. Pada waktu-waktu tertentu diadakan latihan menembak, namun tidak dilaksanakan secara kontinyu oleh karena persediaan peluru terbatas, demikian pula latihan-latihan teknis lainnya seperti cara patroli, cara pengambilan sidik jari, cara memotret dan memeriksa tempat kejadian perkara.

Kegiatan khusus yang tampak cukup sibuk adalah di satuan lalu lintas yaitu menyelesaikan persoalan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dan melayani permintaan surat ijin

mengemudi. Di satuan reserse, kesibukan yang tampak adalah kegiatan petugas reserse yang melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang ditahan, memeriksa para saksi dan mengurus barang-barang yang dijadikan barang bukti.

2. Jumlah Anggota

Jumlah anggota polisi Polwiltabes Bandung ditentukan menurut Daftar Susunan Personil dan Peralatan (DSPP), yang ditetapkan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : 14/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995. Selain mendasari ketentuan DSPP, untuk mempertimbangkan kebutuhan anggota juga memperhatikan pada tingkat kerawanan kota. Adapun jumlah anggota Polwiltabes Bandung yang aktif (diluar anggota yang menghadapi masa persiapan pensiun) adalah sebagai berikut :

Tabel : 1
Jumlah Anggota Polri Polwiltabes Bandung
Tahun 1997

No.	K e s a t u a n	Perbandingan	
		Nyata	DSP
1.	Polwiltabes Bandung	754	848
2.	Polresta Bandung Barat	607	649

3.	Polsekta Sukasari	38	50
4.	Polsekta Cicendo	47	50
5.	Polsekta Andir	50	50
6.	Polsekta Astana Anyar	49	50
7.	Polsekta Bojongloa Kaler	36	40
8.	Polsekta Babakan Ciparay	51	60
9.	Polsekta Bandung Kulon	43	50
10.	Polsekta Bojongloa Kidul	46	50
11.	Polresta Bandung Tengah	677	713
12.	Polsekta Cidadap	48	50
13.	Polsekta Coblong	47	50
14.	Polsekta Bandung Wetan	46	50
15.	Polsekta Sumur Bandung	45	50
16.	Polsekta Cibeunying Kaler	42	50
17.	Polsekta Cibeunying Kidul	26	40
18.	Polsekta Regol	53	60
19.	Polsekta Lengkong	55	60
20.	Polsekta Kiaracondong	43	50
21.	Polresta Bandung Timur	417	501
22.	Polsekta Cicadas	41	50
23.	Polsekta Arcamanik	44	50
24.	Polsekta Cibiru	37	40
25.	Polsekta Bandung Kidul	33	40
26.	Polsekta Marga Cinta	40	50
27.	Polsekta Rancasari	37	40
Jumlah		2455	3841

Sumber : Kantor Polwiltabes Bandung, 1997.

Perincian jumlah personil menurut golongan pangkat adalah golongan Pamen 26 orang, golongan Pama 389 orang, golongan Bintara 1.349 orang, dan golongan Tamtama 591 orang.

Berdasarkan keputusan Kapolri tentang DSPP jumlah anggota Polwiltabes Bandung ditetapkan 3841 orang, namun secara riil baru terpenuhi 2455 orang atau 63,91%.

3. Umur Anggota

Umur Anggota dapat dijelaskan sebagai berikut :

Umur Anggota kebanyakan usia muda, hal ini sesuai dengan kebutuhan tugas polisi yang pada umumnya menuntut kekuatan fisik, bahkan bagi mereka yang digolongkan senior dituntut pula kekuatan phisik prima, karena harus bekerja siang maupun malam di lapangan, apalagi bagi mereka yang berpangkat tamtama, bintara dan perwira pertama, yang bertugas dibagian samapta, lalu lintas, intel dan reserse. Disamping itu, mereka yang bertugas di kantor sebagai staf pelayanan untuk urusan organisasi, misalnya bagian komlek (komunikasi dan elektronika), tata usaha atau administrasi dituntut juga kondisi phisik yang baik, sebab pekerjaan di bagian pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan operasional walaupun berbeda objek pekerjaan, berbeda namun berkaitan dengan masalah oprasional, dan menentukan pula kelancaran pelaksanaan operasi.

Tabel : 2
Umur Anggota

Kategori	Pamen	Pama	Bintara	Tamtama	Jumlah
20 - 25 th		11	584	193	788
26 - 30 th		59	967	215	1241
31 - 35 th		25	298		323
36 - 55 th		16	67		83
Jumlah		111	1916	408	2435

Sumber : Kantor Polwiltabes Bandung, 1997

Dari angka-angka tersebut, tampak bahwa pada kategori umur antara 26-30 tahun menduduki jumlah tertinggi, yaitu 1241 orang/50,96 % Hal ini menunjukkan bahwa secara phisik, tenaga operasional Polwiltabes Bandung cukup potensial namun dari segi pengalaman tugas belum dipertimbangkan stabilitas emosionalnya, khusus di bagian Intel, Reserse, Lalu lintas dan Samapta tampak anggota-anggota tersebut masih sangat muda-muda.

4. Status Perkawinan

Data status marital yang tercatat di bagian administrasi Polwiltabes Bandung menunjukkan sebagai berikut :

Tabel : 3
Status Perkawinan

No.	Golongan Pangkat	S t a t u s		
		Kawin	Belum kawin	Jumlah
1.	Pamen	20		20
2.	Pama	87	2	89
3.	Bintara	1794	122	1916
4.	Tamtama	309	90	408
Jumlah		2210	245	2455

Sumber : Kantor Polwiltabes Bandung, 1997

Terdapat peraturan dinas di lingkungan ABRI yang berlaku juga bagi anggota Polri bahwa, setiap anggota baru diijinkan berkeluarga setelah menjalankan masa pengabdian untuk organisasi minimal 2 tahun. Ketentuan ini merupakan masa adaptasi anggota baru dengan lingkungan tugas polisi, juga masa untuk mengenal karakteristik pekerjaan sesuai peran atau bidang tugas yang diduduki. Setelah masa magang dilalui dan tidak ada sesuatu hal yang menyangkut kepribadiannya, anggota yang bersangkutan diijinkan berumah tangga. Dari seluruh anggota Polwiltabes Bandung, 90,02 % berstatus kawin, menunjukkan bahwa setiap anggota menanggung beban keluarga yang secara kedinasan harus ditanggung pula kesejahteraannya. Namun di lingkungan Polri seperti

halnya militer ada motto yang menyatakan bahwa kehidupan utamanya adalah untuk kepentingan tugas, setelah itu baru untuk kepentingan keluarga, walaupun dalam kenyataannya anggota Polwiltabes Bandung menyatakan bahwa dari gaji saja yang diterima tanpa tambahan apapun untuk menghidupi keluarga tiap bulan tidak mencukupi, demikian pula anggota-anggota yang belum kawin menyatakan bahwa gaji saja untuk menyewa rumah dan makan sehari-hari tidak mencukupi.

5. Pendidikan

Salah satu ciri polisi adalah pendidikan formal yang dipolakan. Hal ini mengingat karakteristik pekerjaan polisi yang menuntut teknis-teknis pelaksanaan tertentu sesuai dengan obyek tugasnya yang berhubungan dengan kekerasan. Dengan demikian dasar pendidikan umum juga menentukan pembentukan polisi meskipun faktor lingkungan tugas paling mempengaruhi. Pendidikan umum anggota Polwiltabes Bandung seperti data pada tabel di bawah ini.

Tabel : 4
Pendidikan Anggota

No.	Golongan / Pangkat	P e n d i d i k a n				
		SD	SMP	SMA	D3	S1
1.	Perwira Menengah	-	-	2	5	13
2.	Perwira Pertama	-	-	64	22	25
3.	Bintara	-	-	1901	3	12
4.	Tamtama	21	305	80	2	-
Jumlah / %		21/0,85	305/ 12,42	2047/ 83,38	32/ 1,30	50/ 2,04

Sumber : Kantor Polwiltabes Bandung, 1997

Untuk Perwira, pembentukannya dilakukan melalui pendidikan AKABRI yang berlangsung selama 4 tahun dan Sekolah Perwira Wajib Militer selama 1 tahun. Kedua pendidikan itu pada awalnya dilaksanakan secara gabungan antara polisi dan angkatan perang (TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU), setelah itu dilaksanakan di masing-masing angkatan dan Polri. Untuk tingkat Bintara dan Tamtama pembentukannya dilaksanakan melalui pendidikan dasar kepolisian, masing-masing selama 9 bulan di Sekolah Polisi Negara. Bagi seluruh anggota polisi setelah menamatkan pendidikan pembentukan, secara bergilir diatur mengikuti pendidikan spesialis di bidang Intel, Reserse, Samapta, Lalu lintas, Binmas dan

Brigade Mobil, masalah pendidikan spesialis di Polwiltabes Bandung hingga saat ini baru mencapai 50%, separuh anggota lain belum pernah sama sekali mengikuti pendidikan, di sini ada anggota yang beberapa kali ikut pendidikan spesialis.

6. Anggaran Belanja

Untuk membiayai pelaksanaan tugas Polwiltabes dan satuan-satuan bawahannya menerima dana secara rutin yang tujuan, jumlah, cara penggunaan dan pendistribusiannya ditentukan oleh Mabes ABRI. Melalui Polda Jawa Barat setiap tiga bulan sekali, Polwiltabes Bandung menerima anggaran, kemudian diteruskan ke Polres-Polres dan Polsek-Polsek.

Dalam masalah anggaran, Polwiltabes Bandung dan kesatuan-kesatuan polisi lainnya ditentukan mengikuti asas *budget oriented*, yang mengharuskan bekerja lebih dahulu, baru kemudian dibiayai. Dengan demikian kesatuan wilayah dituntut mempunyai hubungan dengan pemasok yang dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan kesatuan-kesatuan polisi untuk menjalankan pekerjaan, sebelum kesatuan tersebut menerima dana dari kesatuan di atasnya.

Adapun perincian anggaran Polwiltabes Bandung dan satuan-satuan bawahannya setiap tahun adalah sebagai berikut :

Tabel : 5
Biaya Rutin dan Biaya Khusus
Polwiltabes Bandung

No.	Jenis Biaya	Penerimaan (Rp)	Penggunaan
1.	Belanja Pegawai	2.256.410.841,00	1. Gaji Pegawai 2. Tunjangan
2.	Belanja Barang	620.961.350,00	1. Alat Tulis 2. Bea Cetak
3.	Pemeliharaan	25.850.400,00	1. Alat Kantor 2. Alat Operasi
4.	Operasi Khusus	170.000.000,00	1. Kriminalitas 2. Lalu Lintas
	J u m l a h	3.072.222.591,00	

Sumber : Kantor Polwiltabes Bandung, 1997

Untuk menambah biaya operasi dengan adanya kenaikan harga setiap tahun, Polwiltabes Bandung mengajukan ke Mabes Polri lewat Polda Jabar. Tambahan dana ini tidak ditentukan standarnya pertahun, tetapi didasarkan atas permintaan kesatuan yang membutuhkan, dengan pertimbangan permintaan tambahan akan dipenuhi bila terdapat informasi bahwa wilayah kesatuan yang mengajukan tersebut dinilai

wilayahnya sangat rawan khususnya dibidang kriminalitas, dan terdapat gejala bahwa keresahan dilingkungan warga masyarakat sudah mulai meningkat.

Berkaitan dengan anggaran Polwiltabes Bandung dan kesatuan-

kesatuan, standar gaji anggota polisi yang ditentukan sebagai berikut :

Tabel : 6
Standar Gaji Anggota Polri

No.	Golongan	Gaji Pokok (Rp)	
		Terendah	Tertinggi
1.	Kolonel	201.200,00	540.400,00
2.	Letnan Kolonel	196.300,00	479.500,00
3.	Mayor	191.900,00	454.300,00
4.	Kapten	185.800,00	419.400,00
5.	Letnan Satu	178.600,00	402.600,00
6.	Letnan Dua	170.600,00	375.400,00
7.	Peltu	135.200,00	320.000,00
8.	Pelda	132.100,00	307.100,00
9.	Sersan Mayor	129.000,00	292.800,00
10.	Sersan Kepala	125.900,00	278.500,00
11.	Sersan Satu	122.800,00	262.800,00
12.	Sersan Dua	119.700,00	247.100,00
13.	Kopral Kepala	101.000,00	200.600,00
14.	Kopral Satu	98.800,00	196.600,00
15.	Kopral Dua	96.600,00	185.400,00
16.	Bharaka	94.400,00	177.200,00
17.	Bharatu	92.200,00	169.000,00
18.	Bharada	90.600,00	154.800,00

Sumber : Kantor Polwiltabes 1997

Standar gaji tersebut ditetapkan menurut keputusan Panglima ABRI untuk seluruh anggota ABRI termasuk anggota Polri ditentukan sama sesuai dengan golongan kepangkatan dan masa tugas, selain itu bagi anggota polisi yang menduduki jabatan struktural menerima tunjangan jabatan.

Disamping gaji pokok setiap anggota polisi menerima uang lauk pauk dengan indeks @ hari Rp. 3.000,00 , tunjangan istri 10% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% dari gaji pokok per-anak, tunjangan perbaikan penghasilan 10% dari gaji bruto (gaji pokok ditambah tunjangan anak), tunjangan istri dan anak yang diwujudkan dalam bentuk beras. Selain itu tunjangan jabatan, bagi anggota yang menduduki jabatan struktural khususnya para perwira, sedangkan untuk bintara dan tamtama tidak ada. Fasilitas lain untuk anggota adalah rumah dinas atau uang sewa bagi yang tidak mendapatkan perumahan, fasilitas kendaraan bermotor, dan bagi perwira ahli dari sarjana umum mendapat tunjangan fungsional meski tidak memiliki jabatan struktural.

7. Alat-alat Operasional

Untuk kelancaran tugas, Polwiltabes Bandung memiliki alat-alat operasional. Alat-alat tersebut pengadaannya ditentukan oleh Mabes Polri, disalurkan ke kesatuan wilayah menurut pertimbangan kerawanan daerah. Penggantian atau perbaikan alat-alat yang rusak tidak dapat segera dilaksanakan sendiri, sebab biaya untuk itu diprogramkan secara terpusat dan bila diperlukan harus diusulkan dan diajukan setahun sebelumnya. Memperhatikan jumlah, kondisi dan jenis alat-alat operasional yang ada saat ini, menurut pertimbangan untuk penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kerawanan daerah, dapat dikatakan belum memadai sesuai kebutuhan. Alat-alat operasional ini menjadi barang inventaris dan disimpan di kantor, disamping itu ada yang dipinjam pakaikan kepada anggota misalnya : senjata api, kendaraan bermotor dan borgol. Adapun alat-alat yang ada di Polwiltabes Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel : 7
Alat-alat Operasional Polwiltabes Bandung
Dan Kesatuan Bawahannya

No.	Jenis Alat Operasi	K o n d i s i			Jumlah
		Baik	R R	R B	
1.	Senjata api genggam	474			474
2.	Senjata api bahu	126			126
3.	Peluru cal. 38	30.117			30.117
4.	Peluru cal. 30	13.900			13.900
5.	Peluru cal. 5.56	646			646
6.	Gas air mata	2			2
7.	Borgol	128			128
8.	Ruyung karet	110			110
9.	Peralatan PHH	15			15
10.	Rompi anti peluru	12			12
11.	Kamera foto	4	2	8	14
12.	Alat sidik jari	1			1
13.	Alat tes narkotik	1			1
14.	H T	139			139
15.	Sedan	12			12
16.	Jeep	10			10
17.	Ambulance	1			1
18.	Truk	1			1
19.	Pick up	2	2	2	6
20.	Sepeda motor	43			43
21.	Telepon	127			127
22.	Mesin tik	87			87
23.	Komputer	8			8

Sumber : Kantor Polwiltabes Bandung, 1997

Disamping alat-alat tersebut, untuk keperluan tugas setiap kesatuan operasional diberikan dukungan bahan bakar 260.000 liter per tahun. Jumlah itu menurut Kepala Bagian Administrasi tidak mencukupi,

sebab rata-rata keperluan satu tahun dibutuhkan 400.000 liter, baik untuk kegiatan operasi maupun tugas-tugas rutin.

. Kelembagaan Struktural Polwiltabes Bandung

Polisi di Indonesia yang sering disebut Polri, adalah bagian integral kekuatan pertahanan keamanan negara yang fungsi dan peranannya diatur dalam 3 undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana di Indonesia, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Di bidang hukum, Polri bersama Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Permayarakatan melaksanakan penegakan hukum. Dibidang pertahanan dan keamanan, Polri bersama Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menjaga keamanan negara. Dibidang sosial politik, Polri bersama Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ikut mengelola sumber daya negara untuk kesejahteraan rakyat Indoensia.

Dengan melandasi undang-undang tersebut, Polwiltabes Bandung sebagai salah satu lembaga hukum, merupakan birokrasi pemerintahan yang mengatur masalah administrasi tata tertib umum demi tercapainya

ketertiban masyarakat. Untuk pengorganisasiannya diatur dengan Keputusan Kapolri Nomor : 07/VII/1985, tanggal 1 Juli 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Republik Indonesia, sebagai suatu kesatuan wilayah, dengan tugas :

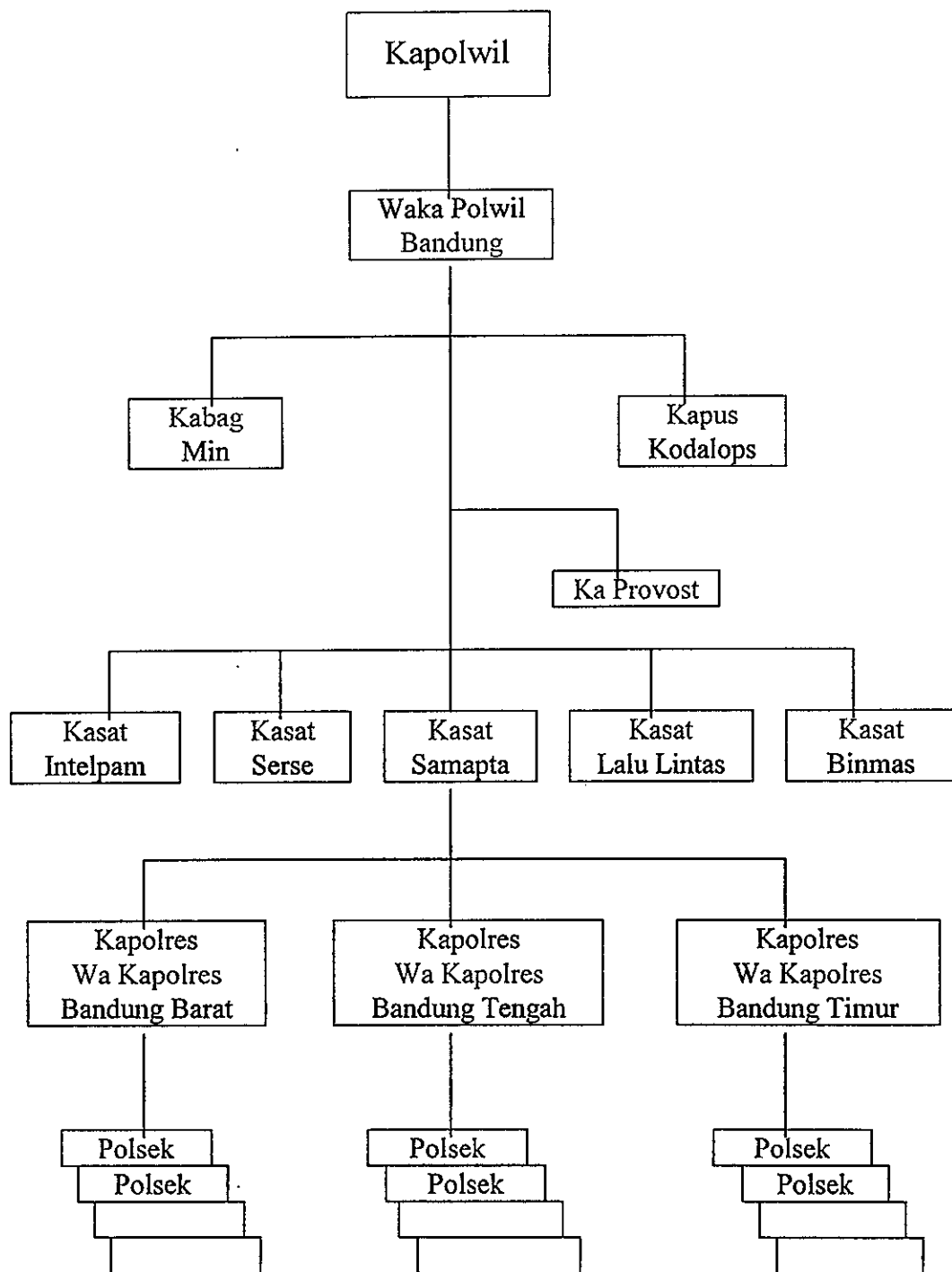
1. Mendeteksi gejala-gejala kerawanan masyarakat yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari golongan ekstrim,
2. Mencegah penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,
3. Menindak segala macam bentuk kejahatan yang mengganggu keselamatan jiwa orang, harta benda, dan lingkungan alam,
4. Membina warga masyarakat untuk mencapai tertib hukum dan ketentraman

Dengan beban tugas itu, Polwiltabes Bandung sebagai salah satu kesatuan operasional :

1. Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Melaksanakan penyidikan perkara pidana dan lalu lintas,
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat

4. Melaksanakan peran sosial politik ABRI untuk menciptakan dan memantapkan tata kehidupan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
5. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, badan dan lembaga yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum,
6. Mengkoordinir dan membina alat-alat kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.

Sebagaimana organisasi militer, Polwiltabes Bandung secara struktural di bawah komando dan kendali Polda Jawa Barat, sehingga sebagai organisasi formal tidak memiliki wewenang secara otonom. Tingkat wewenang yang diatur dalam Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 07/VII/1985, membawahi tiga Kepolisian Resort Kota yaitu : Polresta Bandung Barat, Polresta Bandung Tengah, Polresta Bandung Timur dan 23 Kepolisian Sektor Kota, hanya dalam hal pelaksana komando. Struktur organisasi Polwiltabes Bandung tersebut adalah sebagai berikut :



Di dalam struktur organisasi Polwiltabes terdapat 9 kedudukan struktural yang dijabat oleh Perwira Menengah, yaitu seorang Kolonel sebagai Kapolwiltabes, seorang Letnan Kolonel sebagai Wakil

Kapolwiltabes, seorang Letnan Kolonel sebagai Kepala Bagian Administrasi, seorang Letnan Kolonel sebagai Kepala Pusat Pengendalian Operasi, seorang Letnan Kolonel sebagai Kepala Provost dan masing-masing seorang Letnan Kolonel sebagai Kepala satuan Intel, Kepala satuan Reserse, Kepala satuan Lalu Lintas, Kepala satuan Sabhara dan Kepala satuan Binmas. Untuk menentukan suatu kebijakan dalam rangka penggunaan kekuatan yang berkaitan dengan struktur organisasi, Polwiltabes Bandung mengikuti arahan atau keputusan yang ditetapkan oleh Polda Jabar.

Dengan wilayah tugas 16.874.138 Ha yang berpenduduk \pm 1.832.011 jiwa, untuk memenuhi efisiensi dan efektivitas tugas, struktur organisasi Polwiltabes Bandung dan kesatuan-kesatuan bawahannya dipolakan seperti bentuk organisasi militer lini dan staf, agar memudahkan pimpinan mengendalikan seluruh anggota. Didukung cara pendelegasian wewenang yang bersifat terbatas, maka dinamika organisasi terus terkendali. Pola ini memungkinkan diketahui setiap gerak dan langkah satuan operasional terutama sasaran dan tujuan dari gerak organisasi.

Struktur dan pola 3 Polres sebagai kesatuan bawahan Polwiltabes Bandung bentuknya sama dengan Polwiltabes, masing-masing Kapolres dijabat oleh seorang Letnan Kolonel dan seorang Mayor sebagai Wakil Kapolres, seorang Kapten sebagai Kepala Bagian Administrasi, seorang Kapten sebagai Kepala Pusat Pengendalian Operasi, 5 orang Kapten sebagai Kepala satuan fungsi, dan 23 Kapolsek yang dijabat oleh seorang Letnan dua sampai Kapten. Dari struktur jabatan yang terisi adalah untuk Pamen 19 orang, jabatan Pama 65 orang, kedua golongan ini di tingkat Polwiltabes dan Polres. Untuk jabatan Bintara di tingkat Polres dan Polsek terisi 132 orang sedangkan seluruh tamtama adalah anggota.

Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa dari sejumlah 20 Perwira Menengah dan 111 Perwira Pertama di Polwiltabes Bandung, yang berpendidikan setingkat S1 adalah sejumlah 38 orang, adapun jabatan struktural yang ada di lingkungan Polwiltabes dan Polres-Polres sejumlah 42 jabatan, dengan demikian terpenuhi 90,47 %. Jadi dapat dikatakan bahwa, pejabat yang mengelola kesatuan Polri di Bandung dinilai mampu menjalankan roda organisasi.

Sehubungan dengan hal itu, sistem operasi Polwiltabes Bandung dan kesatuan-kesatuan bawahnya diatur menurut Petunjuk Induk

Manajemen Operasional Polri Nomor : 01/II/1993, dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor : 02/II/1993. Petunjuk-petunjuk itu mengatur cara perencanaan, pengorganisasian tugas, koordinasi antar fungsi-fungsi kepolisian, pengendalian dan pengawasan jalannya operasi kepolisian guna menghadapi peristiwa kejahatan, ketidak tertiban lalu lintas dan membina masyarakat. Dalam kaitan ini, mekanisme kerja organisasi Polwiltabes Bandung dan satuan-satuan bawahannya diatur menurut Keputusan Kapolri Nomor : 04/VII/1987, tanggal 1 Juli 1987 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Dalam Organisasi Polri.

Menurut data yang ada di bagian Pukodalops Polwiltabes Bandung, bahwa operasi kepolisian yang dilaksanakan oleh unit-unit Intel, Reserse, Samapta, Lalu Lintas, Binmas dan masing-masing dipimpin seorang Perwira Pertama. Hasil pelaksanaan operasi menunjukkan bahwa Perwira Pertama sebagai pimpinan unit operasi mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas perbulan 1,37 % dari angka rata-rata kenaikan pertahun 17 % dan menurunkan angka kriminalitas 0,27 % perbulan dari angka rata-rata kenaikan pertahun sebesar 3,26 %.

Dalam hubungan dengan pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, untuk mengatasi masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, aparatur pemerintah yang terdiri dari Wali Kota Madya, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polwiltabes dan Komando Resort Militer mengikatkan diri dalam forum Musyawarah Pimpinan Daerah atau yang dikenal dengan istilah Muspida untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam pembangunan yang dipimpin oleh Wali Kota Madya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap masalah yang terjadi di wilayah Kota Madya Bandung dapat diketahui oleh seluruh komponen birokrasi pemerintah. Keadaan ini menggambarkan keterbukaan diantara aparat birokrasi dan dengan cara seperti ini masing-masing saling memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut bidang tugas departemen.

B. Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Polisi

1.1. Umur

Umur responden dapat dijelaskan sebagai berikut. Responden penelitian kebanyakan usia muda, hal ini sesuai dengan kebutuhan tugas polisi yang

dituntut mempunyai kekuatan fisik yang prima. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel : 8
Umur Responden

Kategori	Pama	Bintara	Tamtama	Jumlah	
				n	%
20 - 25 th	-	-	-		-
26 - 30 th	3	6	-	9	45
31 - 35 th	1	2	1	4	20
36 - 55 th	1	5	1	7	35
Jumlah/%	5/25	13/65	2/10	20	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 9
Status Perkawinan

No.	Pangkat	S t a t u s		Jumlah	
		Kawin	Belum Kawin	n	%
1	Pama	5	-	5	25
2	Bintara	9	4	13	65
3	Tamtama	-	2	2	10
Jumlah/%		14/70	6/30	20	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel :10
Pendidikan

No	Pangkat	Pendidikan					Jumlah	
		SD	SMP	SMA	D3	S1	n	%
1	Pama	-	-	-	3	2	5	25
2	Bintara	-	-	13	-	-	13	65
3	Tamtama	-	1	1	-	-	2	10

Jumlah/%	-	1/5	14/70	3/15	2/10	20	100
----------	---	-----	-------	------	------	----	-----

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 11
Agama

No	Pangkat	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Jumlah	
						n	%
1	Pama	3	2	-	-	5	25
2	Bintara	7	4	-	2	13	65
3	Tamtama	2	-	-	-	2	10
Jumlah/%		12/60	6/30	-	2/10	20	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 12
Jenis Kelamin

No	Pangkat	Pria	Wanita	Jumlah	
				n	%
1	Pama	5	-	5	25
2	Bintara	13	-	13	65
3	Tamtama	2	-	2	10
Jumlah/%		20/100	-	20	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 13
Penghasilan per bulan

No	Penghasilan	Pangkat			Jumlah	
		Pama	Bintara	Tamtama	n	%
1	>150.000	-	-	-	-	-
2	150.000-	-	-	-	-	-

	200.000					
3	200.000-300.000	-	4	2	6	30
4	300.000-450.000	-	9	-	9	45
5	>450.000	5			5	
Jumlah/%		5/25	13/65	2/10	20	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 14
Status tempat tinggal

No	Pangkat	R. Sendiri	Kontrak	R.Dinas/Asrama	Jumlah	
					n	%
1	Pama	2	1	2	5	25
2	Bintara	6	-	7	13	65
3	Tamtama	-	-	2	2	10
Jumlah/%		8/40	1/5	11/55	20	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 15
Lama Bertugas

No	Pangkat	1-5 th	6-10 th	11-15 th	> 16 th	Jumlah	
						n	%
1	Pama	1	2	2	-	5	25
2	Bintara	-	2	9	2	13	65
3	Tamtama	-	-	2	-	2	10
Jumlah/%		1/5	4/20	13/65	2/10	20	100

Sumber : Data primer diolah

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden mempunyai validitas yang cukup tinggi. Kalau kita perhatikan dalam tabel 15 (lamanya bertugas) hal ini memperlihatkan adanya derajat keterlibatan anggota POLRI dalam menangani kejahatan yang dilakukan pelajar cukup tinggi, antara 11-15 tahun (65%).

2.1. Karakteristik Responden Pelajar

Dalam penentuan karakteristik responden pelajar ini dipergunakan standar Sosial Ekonomi Status sama dengan penentuan karakteristik untuk polisi tapi disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu dilihat dari tingkat studi, jenis kelamin, agama, usia, pekerjaan dan penghasilan orang tua, status tempat tinggal pelajar. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 16
Tingkat Studi

No	Tingkat Studi (Kelas)	Jumlah	
		n	%
1	Kelas I	10	25
2	Kelas II	5	12,5
3	Kelas III	25	62,5
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 17
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		n	%
1	Laki - laki	35	87,5
2	Wanita	5	12,5
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data Primer diolah

Tabel : 18
USIA

No	UMUR	Jumlah	
		n	%
1	< 13 - 15 Tahun	6	15
2	16 - 18 Tahun	34	85
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 19
A G A M A

No	Jenis Agama	Jumlah	
		n	%
1	Islam	32	80
2	Kristen	5	12,5
3	Katolik	3	7,5
Jumlah/%		40	100

Sumber :Data Primer diolah

Tabel : 20
Keadaan Orang Tua

No	Kondisi Orang Tua	Jumlah	
		n	%
1	Lengkap	31	77,5
2	Bapak/Ibu Meninggal	3	7,5
3	Berpisah	1	2,5
4	Cerai	5	12,5
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 21
Pendidikan Orang Tua

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		n	%
1	Sekolah Dasar	4	10
2	SLTP	7	17,5
3	SLTA	17	42,5
4	PT	12	30
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 22
Pekerjaan Orang Tua

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		n	%
1	Pegawai Negeri/ABRI	25	62,5
2	Pegawai Swasta	15	37,5
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data primer diolah.

Tabel : 23
Penghasilan Orang Tua

No	Besar Penghasilan	J u m l a h	
		n	%
1	100.000 - 450.000	19	47,5
2	451.000 - 800.000	15	37,5
3	> 800.000	6	15
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 24
Status Tempat Tinggal

No	Tempat Hunian	J u m l a h	
		n	%
1	Bersama Orang Tua	35	87,5
2	Indekost	5	12,5
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data primer diolah

Tabel : 25
Lingkungan Tempat Tinggal

No	Lingkungan Tempat Tinggal	J u m l a h	
		n	%
1	Perkampungan	17	42,5
2	BTN	20	50
3	Real Estate	3	7,5
Jumlah/%		40	100

Sumber : Data primer diolah

Dari data mengenai karakteristik responden pelajar terlihat bahwa sebagian besar responden duduk di kelas III (62,5%, vide tabel 16). Berarti responden pelajar dalam penelitian ini merupakan responden yang telah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya selama dua tahun di SLTA, sehingga dapat dikatakan mereka cukup representatif untuk dijadikan responden berdasarkan jangka waktu keterlibatannya selama berada di sekolah. Sebagian besar responden pelajar adalah pria (87,5 %, vide tabel 17), berusia antara 16 - 18 tahun (85 %, vide tabel 18), dan beragama Islam (80 %, vide tabel 19).

Penentuan jenis kelamin pada penelitian ini masih berpegang pada peraturan- peraturan yang berlaku, tetapi tidak mengikuti fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, yaitu dikenalnya jenis kelamin “pria-wanita” (banci). Di kalangan pelajar dan polisi hanya mengenal pria dan wanita. Kalaupun terdapat kasus pria menjadi wanita atau sebaliknya, maka perubahan status harus didahului oleh adanya penetapan hukum melalui pengadilan negeri setempat.

Sedangkan penentuan usia bagi responden pelajar adalah mengikuti standar usia sekolah SLTA, yaitu antara 15 - 19 tahun. Bagi pelajar yang berusia kurang dari batas tersebut, termasuk dalam kategori

berusia dini berada di SLTA, sedangkan yang melebihi batas tersebut dikategorikan telah melampaui batas usia SLTA (85 %, vide tabel 18). Dari data usia responden yang menunjukkan sebagian besar responden berada dalam batas usia SLTA, maka dapat dikatakan bahwa kualitasnya sebagai responden telah cukup memadai. Demikian pula pada responden polisi, penentuan batas usia kurang dari 20 - 25 tahun dikategorikan sebagai remaja, usia 26 - 30 tahun pemuda dan diatas 31 tahun adalah dewasa. Karena sebagian besar responden berusia diatas 31 tahun (dewasa), dapat dikatakan bahwa responden mempunyai kemampuan memberikan jawaban yang lebih baik sebagai responden dibandingkan dengan responden remaja atau pemuda.

Sebagian besar responden pelajar memiliki orang tua yang utuh lengkap (77,5 %, vide tabel 20) dengan pendidikan SLTA (42,5 %, vide tabel 21). Pengertian jenjang pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak membedakan apakah orang tua responden tersebut tamat dengan memperoleh ijazah atau tidak, akan tetapi digunakan ukuran pendidikan terakhir yang pernah didudukinya. Sedangkan pada responden polisi sebagian besar ber- pendidikan akademi / perguruan tinggi (25 %, vide tabel 10). Berbeda dengan pengertian pendidikan

responden orang tua pelajar, pada responden polisi jenjang pendidikan diukur dari responden tamat mengikuti pendidikan tersebut dan memperoleh ijazah.

Sosial Ekonomi Status (SES) responden dapat dilihat dari pekerjaan orang tua responden pelajar, dimana sebagian besar adalah pegawai swasta (37,5 %, vide tabel 22), dengan penghasilan antara Rp. 415.000,- sampai dengan Rp. 800.000,- (37,5 %, vide tabel 23). Responden pelajar sebagian besar bertempat tinggal dengan orang tua (87,5 %, vide tabel 24). Sedangkan pada polisi sebagian besar berpenghasilan antara Rp. 300.000,- sampai dengan 450.000,- (45 %, vide tabel 13), dengan lama bertugas diatas 11 tahun (65 %, vide tabel 15), memiliki rumah sendiri (40 %, vide tabel 14) dan berstatus kawin (70 %, vide tabel 9).

Berdasarkan data tersebut di atas responden memiliki objektivitas yang cukup memadai, karena pada responden pelajar mereka berada dalam tingkat SES yang lebih baik, seperti bertempat tinggal dengan orang tua yang memiliki pekerjaan dan dengan bangunan rumah yang permanen. Demikian pula pada responden polisi, sebagian besar responden memiliki pengalaman yang cukup memadai, karena telah lama

bekerja menjadi polisi, telah memiliki rumah sendiri dengan penghasilan yang cukup dan telah kawin.

C. Kebijakan Penanggulangan Yang Telah Ditempuh POLRI Selama Ini Terhadap Pelajar Yang Melakukan Kejahatan

1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal.

Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan berkembang terus sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi, urbanisasi dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan masyarakat selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan. Masalah kejahatan dapat merupakan ancaman yang secara garis besar dihadapi Polri sebagai ancaman potensial dan ancaman faktual. Ancaman potensial mencakup berbagai kerawanan yang terkandung di dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ancaman nyata. Kerawanan tadi terdapat dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, seperti kepadatan penduduk, terbatasnya lapangan kerja, pengangguran dan lain-lain. Sedangkan ancaman faktual secara garis besar mencakup berbagai jenis kejahatan, masalah lalu lintas maupun pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya.

Berbicara tentang ancaman, biasanya pandangan umum cukup hanya menyebutkan bahwa masalah yang dihadapi Polri adalah pelanggaran hukum pidana, atau yang lebih konkret lagi berupa kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya.

Pandangan demikian tidak salah, walaupun tidak seluruhnya benar, karena masalah- masalah kejahatan pada dasarnya merupakan sebagian saja dari permasalahan yang dihadapi Polri. Kejahatan adalah hilir, sedangkan masalah-masalah lain yang melatar belakangi timbulnya kejahatan ini, dapat dikategorikan sebagai masalah hulu.

Oleh karena itulah pengkajian terhadap latar belakang timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian Polri dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat banyak faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan pelajar. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan pelajar tersebut, maka langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya harus dikembalikan pada faktor-faktor penyebabnya. Dengan kata lain solusinya bisa bersifat preventif, represif dan pre-emptif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelajar pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain melalui suatu proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Sebagai contoh ; adalah pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmoni dalam keluarga dan sebagainya. Akibat negatif ini berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan pelajar di perkotaan.¹⁰⁰

Keadaan yang terjadi di masyarakat perkotaan pada umumnya yaitu kepadatan penduduk, apalagi disertai dengan heterogenitas penduduknya akan menyebabkan pengendalian sosial “informal” yang

¹⁰⁰Secara teoritis, faktor pemicu terjadinya berbagai kejahatan pelajar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu ;

1. Faktor pemicu yang intenal-kultural; seperti super ego yang kurang kuat, tidak punya kerangka orientasi yang jelas, rasa tidak puas, rasa solidaritas yang sempit, ketegangan psikis, sempitnya personal space, kebebasan terjepit, labil dan emosional.
2. Faktor pemicu yang eksternal-struktural; seperti Globalisasi informasi dan komunikasi, kecemburuan sosial, kesenjangan pendidikan dan pekerjaan, pengaruh iklan, ketidakmampuan sekolah mendidik budi pekerti, polarisasi permukiman dan pemilihan sekolah, komunikasi anak dan orang tua lemah. Sardjono Jatiman, *Studi Langkah-langkah Penanggulangan Kenakalan Anak Sekolah (laporan penelitian hukum)*, Jakarta, BPHN, 1997, Halaman 5-6.

selama ini dipegang oleh masyarakat itu sendiri melalui jalinan ikatan sosial kemasyarakatan menjadi berkurang. Padahal pengendalian sosial “formal” kurang dapat berjalan secara efektif tanpa adanya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga telah mengakibatkan perubahan dalam pergeseran kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas masyarakat yang dulunya didominasi oleh “kelas bawah”, padahal salah satu karakteristik penyebab kejahatan yang dilakukan pelajar adalah adanya partisipasi yang sangat aktif kaum remaja dari keluarga kelas menengah di kota-kota besar, yang diwujudkan melalui aktivitas baik yang bersifat positif maupun negatif. Aktivitas negatif berupa membolos sekolah untuk “mejang” di pasar-pasar swalayan dan tempat-tempat hiburan yang mudah dijangkau dan menjamur di kota-kota besar, penyalahgunaan hak mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya secara ugal-ugalan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, vandalisme, perilaku seksual menyimpang dan sebagainya.¹⁰¹

Kejahatan merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat. Dalam konsep

¹⁰¹Ibid, Halaman 40.

kepolisian, masalah kejahatan bukan hanya merupakan masalah pelanggaran hukum semata, melainkan pula suatu masalah "kantibmas". Faktor-faktor stimulan timbulnya gangguan kantibmas secara luas dapat diartikan sebagai perpaduan antara faktor-faktor pendorong (predisposing factors) dengan faktor-faktor pencetus (precipitating factors) yang senantiasa harus dilihat sebagai proses-proses penyebab kejahatan (causal processes in criminal behavior). Hal tersebut diungkapkan oleh Don C. Gibbons, mengenai proses-proses penyebab kejahatan, yang secara analitis dapat disederhanakan meliputi empat faktor, yaitu faktor-faktor sosio struktural, faktor-faktor interaksi sosial, faktor-faktor pencetus dan faktor-faktor reaksi sosial.¹⁰²

Faktor-faktor sosio kultural adalah faktor-faktor dasar (basic factors) di dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut aspek budaya maupun aspek struktural yang merupakan akar gangguan kantibmas. Faktor-faktor dasar ini antara lain berupa perubahan-perubahan sosial yang berlangsung cepat, nilai-nilai sub kebudayaan,

¹⁰²Don C. Gibbons, *Society Crime and Criminal Careers*, New Jersey, 1977. Englewood Cliffs, Prentice Hall 3 rd.

ketersediaan yang berbeda dalam kesempatan-kesempatan yang sah untuk meraih sukses dalam masyarakat, urbanisasi, dan lain-lain.

Faktor-faktor interaksi sosial berkaitan pada satu sisi dengan pola interaksi di dalam lingkungan sosial tertentu (keluarga, sekolah, lingkungan kerja, lingkungan ketetanggaan, lingkungan pergaulan) yang berpengaruh terhadap proses belajar kejahatan, dan pada sisi lain berkaitan dengan lemahnya pengendalian sosial (social control).

Faktor-faktor pencetus dapat menyangkut aspek-aspek situasional (seperti tekanan langsung dari situasi yang dihadapi maupun pola kepribadian) atau variabel di luar individu yang “merangsang” dilakukannya kejahatan (seperti provokasi korban atau penggunaan minuman keras).¹⁰³

¹⁰³Faktor pencetus kenakalan anak/remaja bersumber dari dorongan dalam diri anak itu sendiri atau dari luar dirinya. Antara lain faktor pencetus dari dalam diri anak/remaja tersebut seperti :

- Kebutuhan hidup yang sangat mendesak dan tidak mampu dipenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.
- Perbuatan orang yang dilakukan secara mencolok sehingga menyinggung/menyakiti harga dirinya.

Sedangkan faktor pencetus dari luar dirinya seperti,

- Adanya perbuatan negatif orang lain yang ditujukan kepada dirinya/kelompoknya.
- Merasa tidak ada pengakuan/penghargaan

Dipengaruhi oleh pihak lain atau tekanan psikis lainnya yang memaksa untuk melakukan kenakalan/kejahatan. Kuswantyo Tami Haryono, *Efektivitas Program Pembinaan Di Lingkungan Lembaga Masyarakat Anak*, Laporan Penelitian, Jakarta, BPHN, 1997, Halaman 92.

Faktor-faktor reaksi sosial terwujud sebagai pelbagai bentuk reaksi sosial “informal” dari masyarakat seperti toleransi terhadap perilaku menyimpang, “main hakim sendiri”, kesadaran hukum masyarakat, sampai ke sikap dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan gejala “fear of crime”, juga reaksi sosial formal yang terdiri atas sikap, tindakan dan kebijaksanaan unsur-unsur, sistem peradilan pidana yang dapat menimbulkan “stigmatisasi” sehingga memberikan kontribusi bagi pembentukan karir kejahatan (misalnya ketidakberhasilan mewujudkan reintegrasi sosial terpidana sebagai konsep dasar pembinaan narapidana).

Persoalan selanjutnya yang dihadapi Polri adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas dari kejahatan, dalam konteks ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Kejahatan yang dilakukan pelajar dapat dikatakan merupakan sisi lain dari produk masyarakat yang berupa residu bagi gejala kehidupan manusia yang begitu luas, baik antar sesama individu maupun dari lingkungan sekitarnya.

Salah satu contoh dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh pelajar adalah perkelahian antar pelajar yang akhir-akhir ini memperlihatkan gejala-gejala yang semakin meningkat. Perkelahian pelajar di sini bukanlah perkelahian antar siswa atau antar kelompok

siswa dalam suatu sekolah (intern) melainkan perkelahian pelajar dari sekolah lain yang “dianggap sebagai musuhnya” yang tidak dapat dikendalikan lagi oleh lembaga sekolah sehingga menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial yang cukup memprihatinkan. Masalah perkelahian antar kelompok pelajar ini menjadi semakin meresahkan, karena dari aspek kamtibmas peristiwa tersebut sudah merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, mengancam keselamatan individu maupun kelompok, fasilitas umum, harta benda dan bahkan jiwa manusia, selain itu ditinjau secara yuridis perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan.¹⁰⁴

Selama periode tahun 1993 s/d 1997 terjadi kasus Kejahatan yang dilakukan pelajar dan kerugian materil seperti diuraikan pada tabel berikut ini :

¹⁰⁴ Sardjono Jatiman, Op Cit. Halaman 18.

Tabel : 26

Pelaku, Korban Dan Kerugian Materil Akibat Kejahatan Yang dilakukan Oleh Pelajar Periode 1993 sampai dengan 1997						
No	Penggolongan	1993	1994	1995	1996	1997
1	Jumlah Kasus	25	20	42	30	25
2	Jumlah Pelaku					
	a. Ditangkap	230	76	247	176	168
	b. Ditahan	125	46	139	56	61
3	Jenis Perbuatan					
	a. Pengrusakan	4	7	3	4	10
	b. Penganiayaan	3	5	8	5	8
	c. Perampasan	-	2	-	-	-
	d. Perkelahian	15	17	30	15	11
	e. Pemerasan	-	-	4	-	-
	d. Narkotika	53	34	49	51	46
4	Korban					
	a. Luka Ringan	4	9	17	4	9
	b. Luka Berat	1	3	-	4	2
	c. Meninggal	-	-	3	-	2
5	Kerugian Materil					
	a. Bus	-	-	-	-	-
	b. Non Bus	-	-	-	11	15
	c. Bang. Sekolah	-	-	-	13	10
	d. Fasilitas Umum	41	17	-	64	79

6	Penyelesaian perkara					
	a. Dibina	92	35	110	40	32
	b. Diproses	24	6	19	9	21
	c. Diajukan ke Penuntut Umum	9	5	10	7	8

Sumber : Satserse Polwiltabs Bandung 1997

Berdasarkan data tersebut terlihat adanya peningkatan kuantitas kasus kejahatan pelajar pada tahun 1995 dan tahun 1996. Bahkan terdapat peningkatan yang cukup tajam pada tahun 1995 (42 kasus).

Demikian pula dari jumlah yang ditangkap, ditahan dan diajukan ke penuntut umum menunjukan adanya fluktuasi.

Selanjutnya apabila dianalisis antara pelaku yang ditangkap serta yang ditahan dihubungkan dengan pelimpahan kasus ke Penuntut Umum mengalami kesenjangan yang sangat besar. Kenyataan ini penulis mempunyai kesan atau gambaran bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kasus kejahatan lebih menekankan kepada suatu perlakuan (treatment) yang mengarah kepada tindakan persuasif dibandingkan dengan tindakan represif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan proses sistem peradilan pidana sampai pada tingkat peradilan.

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pihak kepolisian banyak melakukan kebijakan atau melakukan diskresi atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kepolisian¹⁰⁵ karena didasarkan pertimbangan-pertimbangan baik dari sudut pelaku tindak pidana itu sendiri yang relatif masih muda, serta motivasi yang tidak jelas kenapa mereka melakukan kejahatan maupun dari sudut kemanfaatan tindakan yang dilakukan oleh polisi, dibandingkan dengan jika kasus tersebut diselesaikan secara tuntas sampai dengan peradilan pidana.¹⁰⁶

¹⁰⁵Pasal 5 ayat (1) butir a. 4 dan Pasal 7 ayat (1) butir J KUHAP menyatakan "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari anggota POLRI untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia. Mayjen (Pol). Drs. Momo Kelana, *"Memahami Undang-Undang Kepolisian (UU No. 28 Tahun 1997)"*, Jakarta, PTIK, Radinas Ekasaputra, 1998, Halaman 94.

¹⁰⁶Hal inipun diakui oleh Sersan Mayor (Pol) Adang Rohman, bahwa selama yang bersangkutan bertugas kurang lebih 11 tahun (vide tabel 15) di Bagian Satbinmas Polwiltabes Bandung, pada dasarnya rata-rata ditemukan latar belakang yang sama kenapa mereka melakukan kenakalan/kejahatan, yaitu masalah kurang harmonisan dikeluarga (kurang adanya perhatian), selain kondisi teman sepergaulan. Maka diperlukan suatu pendekatan yang lebih manusiawi (pembinaan). Wawancara Pribadi, Satbinmas Polwiltabes Bandung, Tanggal 9 Februari 1998.

Selanjutnya data yang menyangkut korban menunjukkan adanya kerugian berupa korban jiwa manusia akibat terjadinya kejahatan yang dilakukan pelajar, pada dasarnya terdapat peningkatan kuantitas korban dari tahun ke tahun. Dan terakhir menunjukkan adanya penurunan. Selain itu pula data tersebut memperlihatkan pula, bahwa yang menjadi korban tidak hanya pelajar yang terlibat, melainkan pula masyarakat umum.

Demikian pula kerugian harta benda akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, antara lain menyangkut pengrusakan bus, pengrusakan fasilitas umum, kendaraan non bus, gedung / sekolah.

Hal yang paling menonjol dari sekian perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelajar adalah tindak pidana narkoba dan perkelahian antar pelajar dan hal ini memberikan data bahwa tidak hanya korban terhadap harta benda dan badan serta nyawa yang secara relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi juga memberikan gambaran bahwa terdapat kenaikan tingkat kualitas bentuk tindak pidana yang dilakukan pelajar sehingga memberikan dampak bukan hanya kepada korban dari tindak pidana tersebut tetapi juga kepada masyarakat luas (vide tabel 26), yaitu menimbulkan keresahan sekaligus ketidak

tentraman yang dialami oleh para orang tua khususnya dan masyarakat umumnya. Suatu dampak yang sangat memprihatinkan dari tanggapan data tersebut dengan adanya peningkatan kejahatan dari tahun ke tahun baik dari sudut kuantitas maupun kualitas kejahatan seolah-olah memberikan gambaran terhadap keterbatasan dari penegakan hukum (law enforcement) khususnya polisi dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Untuk memberikan gambaran lebih jauh lagi mengenai bagaimanakah kebijakan polisi di dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh para pelajar, maka di bawah ini akan disajikan mengenai kebijakan apa saja yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polwiltabes Bandung. Dimana kebijakan tersebut tidak akan terlepas dari peranan POLRI itu sendiri.

Untuk mengetahui bagaimana dan peranan apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan pelajar, maka di bawah ini akan dikemukakan hal yang berhubungan dengan peranan polisi yaitu :

1. Peranan Normatif yaitu peranan polisi yang didasarkan atas tugas dan kewajibannya menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP,¹⁰⁷
2. Peranan Faktual yaitu suatu peranan yang dilakukan polisi dalam tugas kamtibmas dimana pelaksanaan tugas tersebut lebih ditekankan kepada peranan nyata yang bersifat situasional sehingga nampak di dalam pelaksanaan peran tersebut lebih mengarah kepada diskresi di dalam mencapai ketertiban keamanan,¹⁰⁸
3. Peranan Ideal yaitu suatu peranan yang didasarkan pada kedudukan polisi selaku pengayom masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan.¹⁰⁹

¹⁰⁷Tugas-tugas Kepolisian besangkut paut dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, sehingga pelaksanaan tugas Kepolisian dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan tugas sebagai ABRI, antara lain harus memperhatikan asas Legalitas. Op Cit, 1998, Halaman 92.

¹⁰⁸Diskresi adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari asas-asas Kepolisian Negara Republik Indonesia di lapangan yang secara langsung menghadapi keadaan-keadaan yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan dan pelayanan masyarakat. Keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban. Ibid, Halaman 93 dan 171

¹⁰⁹Dari Prespektif sejarah fungsi Kepolisian mempunyai dimensi-dimensi meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan juga fungsi yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Soeparno Soeria Atmadja, *Perkembangan Sejarah Kepolisian Dari Zaman Klasik Sampai Zaman Modern*, Jakarta, PTK, 1971, Halaman 125.

Selanjutnya kalau kita lihat dalam tabel 26 No. 2 dan No. 6 poin c, sebanyak 897 pelaku pelajar ditangkap, yang selanjutnya dilakukan penahanan sejumlah 427. Dari 427 pelaku pelajar yang di tahan tersebut sejumlah 39 di ajukan ke penuntut umum.

Kebijakan Polri C.q. Polwiltabes Bandung terhadap pelaku pelajar yang dilakukan penangkapan sejumlah 897 didasarkan kepada bukti permulaan bahwa pelajar tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, Pada pemrosesan selanjutnya Polisi melakukan beberapa kebijakan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diproses, baik berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologis.¹¹⁰ Menurut penjelasan dari anggota Satserse Polwiltabes Bandung, bahwa perkara-perkara yang tidak diproses lebih lanjut (tidak diajukan ke Penuntut Umum) adalah dilihat dari tindak pidana yang dilakukan dianggap tidak terlalu menghawatirkan seperti perkelahian pelajar serta pelaku tindak pidana narkoba taraf dini (coba-

¹¹⁰Pada tingkat penyidikan, penyaringan perkara itu berupa tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi. M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987, Halaman 2. Lihat juga Pasal 18 (1) UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian. Rumusan kewenangan Kepolisian RI dalam pasal 18 (1) tersebut bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian, yang memberikan wewenang untuk bertindak dan tidak bertindak, menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian.

coba) serta jenis narkoba yang dipergunakan.¹¹¹ Serta didasarkan kepada kebutuhan praktek, bukan saja dipandang dari segi hukum semata-mata (kepastian hukum) tetapi segi manfaat efisiensi dan tujuan hukum, juga dari kebutuhan segi sosial budaya setempat serta perkembangan pembangunan, pembinaan dan bimbingan masyarakat, seperti permintaan para pihak (orang tua) yang menginginkan agar perkara tersebut tidak dilanjutkan. Dalam kaitan dengan perkara-perkara yang demikian, maka Polisi melakukan kerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait untuk selalu mengadakan kontak.¹¹²

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa 39 pelaku pelajar yang di ajukan ke Penuntut Umum, di dasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut sudah diluar batas toleransi, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba jenis putaw, narkoba jenis suntikan, dan narkoba jenis ekstasi), perkelahian pelajar yang mengakibatkan jatuhnya korban (baik korban mati atau korban luka berat). Seperti dalam tabel dibawah ini :

¹¹¹Pelda (pol) Deden, Wawancara Pribadi, Satserse Polwiltabes Bandung, Tanggal 27 April 1998

¹¹²Dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa hubungan dan kerja sama didalam negeri dilakukan dengan unsur-unsur pemerintah daerah, badan, lembaga, instansi lainnya, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

Tabel : 27

Data Pelaku Pelajar Yang Dilimpah Ke Penuntut Umum

No	Nama Tersangka	Umur	SBBAP	DH. Dakwaan
1	Andi Firman	17	Bp/67/IV/96/Serse	Psl.23(3),Jo 36 (3b) UU No. 9 Tahun 1976.
2	Christina E.N.	18	Bp/83/VI/96/Serse	Sda
3	Winda	16	Bp/84/VI/96/Serse	Sda
4	Agung Mahmud	18	Bp/85/VI/96/Serse	Sda
5	Dadang H	18	Bp/86/VI/96/Serse	Sda
6	Amrin N	18	Bp/97/VIII/96/Serse	Psl.351(3)KUHP
7	D. Sukma	17	Bp/98/VIII/96/Serse	Sda
8	Alexander	18	Bp/53/IV/97/Serse	Psl. 285 KUHP
9	Suhendar	17	Bp/67/V/97/Serse	Psl. 358 angka 1 KUHP
10	Kadri Ernawan	18	Bp/162/VII/97/Serse	Psl. 23(3),(7) Jo Psl. 36(3b),(7b) UU. No. 7/1976.
11	Rifqi	18	Bp/163/VII/97/Serse	Sda
12	Endang Sutrisna	18	Bp/171/X/97/Serse	Psl.351(3)KUHP
13	Toto Musopa	18	Bp/68/V/97/Serse	Psl.358 angka 1 KUHP
14	Erman Setiawan	17	Bp/69/V/97/Serse	sda
15	Robert Tambunan	18	Bp/70/V/97/Serse	sda

Sumber : Satserse Polwiltabes Bandung 1998

Apabila kita lihat data diatas, jika diprosentasekan menggambarkan atau menunjukan bahwa rata-rata pelajar tersebut melakukan tindak pidana yang sejenis seperti narkoba dan perkelahian yang mengakibatkan korban serta penganiayaan. Hal ini yang mendasari salah satu pertimbangan polisi dalam penerapan sarana penal, seperti yang telah penulis kemukakan di halaman lain bab ini.

Selanjutnya dari sejumlah 39 pelaku pelajar yang diajukan ke Penuntut Umum, selama kurun waktu 5 tahun, penulis hanya mendapat 15 berkas perkara periode tahun 1996 sampai dengan 1997, sedangkan periode 1993 sampai dengan 1995 sejumlah 24 perkara sudah diarsipkan di gudang.

Kalau kita perhatikan data tersebut menunjukan bahwa kebijakan penal yang diterapkan terhadap pelajar yang melakukan kejahatan didasarkan kepada tindak pidana pidana yang dilakukan, hal in memberikan gambaran kepada kita bahwa POLRI Cq. Polwiltabes Bandung dalam praktek penegakan hukum selain mengadakan seleksi-seleksi perkara melalui wewenang diskresi, juga nampaknya polisi lebih

banyak menggunakan pertimbangan faktual dibanding dengan peranan normatif.

Untuk lebih jelasnya pada bagian dibawah ini akan kita lihat distribusi peranan normatif yang dilaksanakan polisi didasarkan pada data yang terdapat pada tabel 26 No. 2 dan No. 6, yaitu :

Tabel : 28

Distribusi Peranan Normatif

No	Tindakan	J u m l a h	
		n	%
1.	Penangkapan	897	100
2.	Penahanan	427	47.60
3.	Di ajukan ke P.U.	39	9.13

Jika dianalisis lebih rinci, konsistensi di dalam pelaksanaan peran normatif melihat dari proses penangkapan, penahanan, sampai pada pelimpahan perkara nampak tidak konsisten, atau dengan kata lain proses lanjutan dari pelaksanaan peran normatif antara pelaksanaan peran polisi dihubungkan dengan pelimpahan perkara (selanjutnya peranan Penuntut Umum), maka pada pelaksanaan peran normatif polisi tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI,

karena ada perbedaan atau kesenjangan yang sangat besar antara penangkapan dan penahanan dibandingkan dengan penyelesaian perkara (clearance rate) yang diserahkan / dilimpahkan kepada Penuntut Umum.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepolisian, memang pelaksanaan peran normatif yang referensinya adalah berdasarkan KUHAP khusus di dalam menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, polisi lebih banyak melakukan pendekatan yang bersifat persuasif walaupun dibarengi dengan tindakan represif (penangkapan, penahanan dan penyidikan) tetapi tidaklah berarti tujuan dari proses tersebut untuk diselesaikan secara proses peradilan pidana sebagaimana ketentuan KUHAP, melainkan lebih menekankan kepada unsur penekanan psikologis agar fungsi penangkal (deterrence) lebih berhasil dibandingkan dengan fungsi pidananya.¹¹⁴

Sedangkan peran normatif, karena peran ini lebih menekankan tindakan secara hukum baik berdasarkan kepada KUHAP maupun

¹¹³ Menurut hemat penulis, bahwa adanya kesenjangan tersebut tidak lepas dari rumusan pasal 13 (a) dan (b) UU No. 28 Tahun 1997, menunjuk selain kepada tataran represif yudisial juga menunjuk kepada tataran represif non yustisial dan tataran preventif.

¹¹⁴ Letnan Satu Polisi Sugiharto, *Wawancara Pribadi*, Polwiltabes Bandung Pada Tanggal 3 Februari 1997

berdasarkan ketentuan peraturan lainnya yang dilakukan oleh petugas, di dalam penanggulangan terjadinya suatu tindak pidana maka sebagai konsekuensinya polisi berarti harus menggunakan kewenangan yang telah diatur Undang-undang yaitu melakukan penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan dan bila perlu disertai upaya paksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan dan selanjutnya diteruskan kepada penuntut umum. Hal demikian ini kurang dilakukan atau tidak dilakukan sepenuhnya, hal ini pun berkaitan dengan pertimbangan kelembagaan bahwa tugas-tugas kepolisian bersangkut paut dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negara, dengan memperhatikan asas-asas kepolisian yang antara lain adalah asas kewajiban, yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri.¹¹⁵

¹¹⁵ Asas ini sangat diperlukan oleh petugas Kepolisian RI di lapangan yang secara langsung menghadapi keadaan-keadaan yang memerlukan pengambilan keputusan secara tepat dalam rangka upaya-upaya pencegahan, penanggulangan dan pelayanan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya terlihat dalam bentuk-bentuk diskresi. Untuk itu apabila seorang petugas kepolisian akan melakukan diskresi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
- c. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang di khawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan.
- d. Asas keseimbangan, dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian dapat diketahui alasan atau pertimbangannya sebagai berikut : kurangnya digunakan peran normatif, karena peran normatif dalam wujudnya adalah lebih menekankan pada sarana hukum pidana, mengingat hukum pidana lebih bersifat sebagai ultimum remedium dibandingkan sarana lainnya dalam mencapai ketertiban, dengan demikian langkah-langkah atau tindakan yang diambil polisi dengan mengingat pelaku tindak pidana tersebut adalah para pelajar yang relatif lebih muda usianya, maka penggunaan sarana non-pidana dianggap lebih baik daripada sarana hukum pidana. Sarana lain itu dapat berupa pendekatan persuasif edukatif, pengawasan, kegiatan bersama, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya, lebih diutamakan penggunaannya sebelum menggunakan sarana hukum pidana. Hal lain yang lebih penting bahwa sarana hukum pidana belum dapat dipastikan akan membawa hasil yang diharapkan apalagi jika sarana hukum pidana itu semata-mata hanya didasarkan pada sanksinya yang keras.¹¹⁶

dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak. Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian RI*, PTIK, Jakarta, Radinas Ekasaputra, 1998, Halaman 171-172.

¹¹⁶ Kolonel Polisi Erwin M Mapaseng, *Wawancara Pribadi*, Polwiltabes Bandung, Pada Tanggal 11 Maret 1977.

Berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka kebijakan penal yang diterapkan POLRI Cq. Polwiltabes Bandung terhadap pelaku pelajar yang melakukan kejahatan, adalah dengan melihat tindak pidana yang dilakukannya atau bersifat kasuistik.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan melalui sarana penal yang dilaksanakan oleh POLRI Cq. Polwiltabes Bandung di Wilayah Kotamadya Bandung, dilakukan dengan cara melihat kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Data yang dijadikan patokan untuk mengkaji hal tersebut adalah Kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelajar selama periode 1993 sampai dengan periode 1997.

Kalau kita perhatikan dalam **tabel 26**, bahwa pada tahun 1993 terdapat 25 kasus kejahatan dengan melibatkan 230 orang yang ditangkap dan yang ditahan 125 untuk selanjutnya dibina sebanyak 92 orang, diproses 24 dan yang diajukan kepengadilan sebanyak 9 orang. Begitu juga untuk tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 mengalami fluktuasi terjadinya kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, pada tahun 1994 terjadi 20 kasus dengan melibatkan 76 orang ditangkap, 46 ditahan dan dibina 35 orang serta diproses 6 dan selanjutnya 5 orang diajukan kepengadilan. Tahun 1995 terjadi kenaikan kasus sebanyak 42

kasus dengan melibatkan 247 orang dan yang diajukan kepengadilan hanya 10 orang. Begitu juga pada tahun 1996 dan tahun 1997 mengalami penurunan yaitu 30 kasus dan 25 kasus, tetapi yang diajukan kepengadilan mengalami kenaikan yaitu pada tahun 1996 sebanyak 7 orang dan tahun 1997 sebanyak 8 orang.

Dengan demikian jika diprosentasekan maka pada tahun 1993 terjadi 25 kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelajar atau 17,60 %. Tahun 1994 20 kasus atau 14,08 %, tahun 1995 mengalami kenaikan menjadi 42 kasus atau 29,58 %, dan tahun 1996 terjadi 30 kasus atau 21,13 %, serta tahun 1997 terjadi 25 kasus atau 17,60 %. Maka dari tahun 1993 sampai dengan 1997 telah terjadi 142 kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, dengan jenis kejahatan antara lain, pengrusakan, penganiayaan, perampasan, perkelahian, pemerasan dan narkoba.

Dengan demikian segala tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, polisi dalam penyelesaiannya tidak selalu melalui kebijakan penerapan hukum pidana tetapi lebih kepada tindakan persuasif edukatif. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan Anggota POLRI terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 29
Tanggapan Anggota Polisi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Pelajar.

Tanggapan Anggota Polisi Tentang Kejahatan yang Dilakukan Pelajar	J u m l a h	
	n	%
a. Tidak bersifat Tindak Pidana Biasa	12	60
b. Tindak Pidana Biasa	4	20
c. Bersifat Kasuistik	4	20
J u m l a h/%	20	100

Sumber : Data Primer Diolah.

Berdasarkan data tabel di atas, mengenai tanggapan polisi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, ditinjau dari kualifikasi sebagai tindak pidana ternyata belum terdapat kesatuan pandang, ada tiga pendapat di dalam hal ini, **pertama** dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak bersifat tindak pidana biasa artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak jelas motivasinya kenapa mereka melakukan tindak pidana, pendapat **kedua** walaupun kasus tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang berarti sebagai perbuatan tindak pidana tetapi tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana murni dengan melihat dari sudut pelaku tindak pidana, pendapat **ketiga** pengkualifikasian tindak

pidana melihat dari kasusnya. Jika kasus tersebut menyebabkan akibat (korban tindak pidana) sudah dianggap tidak wajar (serius), maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni, namun jika kasus itu merupakan manifestasi dari suatu perbuatan kenakalan remaja (tidak jelas motivasinya) maka dapat dianggap sebagai bukan tindak pidana biasa. Presepsi yang berbeda diantara anggota POLRI tersebut dimungkinkan karena dari sejumlah responden POLRI tersebut mempunyai pengalaman masa kerja yang berbeda (vide tabel 15), hal ini membawa konsekwensi kepada pemahaman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Begitu juga adanya perbedaan mengenai pemahaman terhadap apakah kejahatan yang dilakukan oleh pelajar harus diselesaikan melalui proses peradilan atau tidak, dapat dilihat seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel : 30
Tanggapan Anggota Polisi Tentang Kejahatan Pelajar Dapat
Diselesaikan Melalui Proses Peradilan

Tanggapan Anggota Polisi Tentang Peradilan Pidana	J u m l a h	
	n	%
a. Mutlak	6	30
b. Tidak Mutlak	14	70
J u m l a h/%	20	100

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan polisi dalam penyelesaian terhadap pelanggaran hukum secara mayoritas (70 %) tidak secara mutlak memerlukan sarana penal (pidana) tetapi dapat dilakukan sarana lain yang lebih efektif dari sarana penal misalnya dalam bentuk treatment (menyerahkan pada orang tua, wajib lapor, skorsing dan lain-lain). Sedangkan penyelesaian secara penal dianggap sebagai hal yang harus digunakan, hanya dikemukakan oleh sebagian kecil responden polisi (30 %).

Hal tersebut terlihat dari beberapa dari jawaban responden polisi sebagai berikut :

- Tanggapan polisi terhadap kejahatan yang dilakukan pelajar tidak ada kesatuan pandang dalam arti mempunyai tanggapan yang sama, di satu pihak bahwa tindak pidana yang dilakukan pelajar harus diselesaikan menurut proses peradilan pidana, dan dilain pihak walaupun kasus tersebut dianggap sebagai tindak pidana tetapi tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana murni dengan melihat dari sudut pelaku tindak pidana
- Dalam hal penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan pelajar, polisi mempunyai tanggapan bahwa yang pertama di dalam penyelesaiannya tidak secara mutlak memerlukan sarana penal dan tanggapan yang kedua bahwa penyelesaian secara penal merupakan hal yang harus digunakan dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelajar.

Berangkat dari penjelasan diatas serta untuk mengefektifkan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dengan sarana penal, penulis mempunyai presepsi bahwa andaikata memang dirasakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal akan mendapatkan nilai tambah dengan memperhatikan aspek perlindungan masyarakat dan kepentingan sipelaku (pelajar), sudah seyogianya penggunaan sarana penal bisa diefektifkan. Namun demikian perlu

diperhatikan bahwa jangan sampai penggunaan sarana penal tersebut bukannya mendapat nilai tambah, malah sebaliknya. Hal ini kita tahu bahwa sarana penal mempunyai keterbatasan dalam upaya penanggulangan kejahatan.¹¹⁷

Apabila diperhatikan sosok seorang pelajar baik dilihat dari sisi usia yang relatif muda, jiwa yang masih labil, latar belakang keluarga serta motivasi yang tidak jelas mengapa mereka melakukan kejahatan, nampaknya saran penal sulit untuk menjangkanya, namun demikian penulis beranggapan bahwa kebijakan penal yang sebaiknya ditempuh oleh POLRI terhadap pelajar yang melakukan kejahatan seyogianya tetap memperhatikan berbagai aspek, seperti latar belakang mereka melakukan kejahatan serta memperhatikan sifat-sifat dan kepribadiannya. Dengan mengetahui latar belakang tersebut maka dapat diharapkan bahwa penggunaan sarana penal bisa efektif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip perlindungan masyarakat dan pembinaan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, serta memperhatikan

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, Halaman 41.

pengalaman-pengalaman praktek dilapangan untuk tetap mengadakan seleksi atau penyaringan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nigel Walker dalam pernyataanya mengingatkan bahwa dalam menggunakan sarana penal (supaya efisien : pen) harus memperhatikan prinsip-prinsip pembatas (the limiting principles) yang antara lain : ¹¹⁸

- a. jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dcapa secara lebh efektif dengan sarana-sarana lain yang lebh ringan;
- d. jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan HP jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
- f. HP jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Dalam kesempatan ini pula Jeremi Bentham pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila "*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*."¹¹⁹ Demikian pula Herbert L.

¹¹⁸ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Socety*, dalam Barda Nawawi Arief, Ibid, Halaman 48.

¹¹⁹ Ibid, Halaman 48

Packer pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*"indiscriminately"*) dan digunakan secara paksa (*"coercively"*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*"prime threatener"*).¹²⁰

2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Non Penal Terhadap Pelajar Yang Melakukan Kejahatan.

Dalam uraian terdahulu telah disinggung bahwa dalam konteks Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) pemidanaan bukanlah merupakan satu-satunya cara atau metode dalam penanggulangan kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi dikenal pula cara-cara lain atau yang kita sebut dengan upaya non penal.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak POLWILTABES Bandung Cq. Sat Bimmas, telah diidentifikasi terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan pelajar, selain ditemukan sebab-sebab individual yang terdapat pada pelaku, juga ditemukan sebab-sebab yang bersifat makro yang merupakan produk

¹²⁰ Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford, California, University Press, 1968, Halaman 366.

dari situasi dan keadaan masyarakat itu sendiri, seperti pola hidup masyarakat, situasi dan kondisi pendidikan, pengaruh ekonomi, sosial dan budaya, dan sebagainya (dampak dari berbagai aspek pembangunan yang bersifat negatif/faktor kriminogen) telah mendorong timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Dengan pertimbangan yang demikian, maka strategi kebijakan penanggulangan kejahatan pelajar yang integral mencakup kebijakan pre-emptif, kebijakan preventif, dan kebijakan represif. Dengan demikian penanggulangan kejahatan melalui sarana penal yang diwujudkan dalam sistem peradilan pidana tidak akan mampu menjangkau atau mengatasi faktor-faktor kriminogen yang telah penulis sebutkan diatas. Untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut maka diperlukan upaya non penal sebagai alternatif terbaik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa, penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan saran pidana atau hukum pidana.¹²¹

Berkaitan dengan hal tersebut G. Peter Hoefnagels menyatakan, bahwa :

"Only a fraction of the preventive effect is produce by the adminstration of criminal justice, even though its explicit objective is the prevention of crime. The preventie effect of the non criminal legal activites on the

¹²¹ Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Halaman 114.

*contrary, is much more comprehensive even though their objective is not solely the prevention of crime, which is often involved accidentally, as a useful side effect.*¹²²

Berdasarkan uraian tersebut, maka penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, diperlukan adanya keterpaduan dan keterjalinan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*).

Selanjutnya sebagai dasar pertimbangan dipergunakannya upaya non penal oleh POLRI Cq. Polwiltabes Bandung sebagai suatu kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap pelajar yang melakukan kejahatan, adalah sebagai berikut :

- Mengingat pelajar adalah sebagai potensi bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa yang akan datang serta umur yang masih dapat dikategorikan sebagai anak-anak/remaja, maka kejahatan yang dilakukannya pada umumnya jarang ditemui motif khusus mengapa pelajar melakukan kejahatan. Biasanya kejahatan yang dilakukannya sebagai akibat dari ekses kenakalan.

¹²² G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Kluwer, Holland, 1973, Halaman 68.

Secara umum kebijakan yang telah dilaksanakan oleh POLRI didasarkan kepada sebab-sebab yang bersifat mikro (sebab individual yang terdapat pada pelaku) dan sebab-sebab yang bersifat makro yang merupakan produk dari situasi dan keadaan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan sebab-sebab yang bersifat mikro dan makro, maka kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang bersifat makro
2. Kebijakan yang bersifat mikro.

ad. 1. Kebijakan yang bersifat makro.

Mengingat sebab-sebab yang bersifat makro itu mempunyai kaitan dengan faktor-faktor kriminogen tersebut, maka POLRI mengambil kebijakan penanggulangannya melalui pendekatan makro, yaitu :

Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh serta menganalisis dampak negatifnya, baik terhadap masyarakat pada umumnya maupun terhadap kalangan pelajar khususnya. Dari pemantauan tersebut akan dapat diupayakan cara-cara mengatasi dampak negatif pembangunan terhadap masyarakat pada umumnya maupun kalangan pelajar pada khususnya, setidaknya mengurangi dan mencegah berkembangnya dampak negatif.

ad. 2. Kebijakan yang bersifat mikro.

Kebijakan penanggulangan yang berorientasi pada sebab-sebab individual dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial, situasi dimana terdapat interaksi antar manusia. Dimana pelajar melakukan aktivitas sehari-hari (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat).

Berdasarkan pada kebijakan makro dan mikro yang merupakan upaya-upaya pelaksanaan dalam pencapaian sasaran yang telah ditentukan, secara khusus oleh Polwiltabes Bandung dirumuskan dalam kebijakan penanggulangan sebagai berikut :

Tabel : 31

No	Bidang	Sasaran	Hasil Yang Diharapkan
1	Kegiatan Pembinaan <ul style="list-style-type: none">• Bimbingan dan Penyuluhan• Psikologi• Ceramah	<ul style="list-style-type: none">• Redawan• Organisasi Pelajar• Karang Taruna• Org. Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">• Tertib Sekolah• Cegah Redawan Pada Kejahatan• Timbul Rasa Percaya Diri Pada Redawan• Tertib Generasi Muda• Terciptanya Kondisi Kondusif
2	Kegiatan Operasional/Lintas Sektoral <ul style="list-style-type: none">• Pre-emptif• Preventif• Represif• Treatment & Rehabilitasi• Koordinasi	<ul style="list-style-type: none">• Depdikbud• Dispen• Lemb. Pendidikan• Lembaga Konsultasi Psikologi• Orang Tua Redawan• Redawan	<ol style="list-style-type: none">1. KEJAHATAN PELAJAR TERKENDALI2. KAMTIBMAS AMAN DAN TERKENDALI

Kebijakan pre-emptif berupa kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menetralkan atau menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja yang bersifat mendasar, seperti :

- a. Melaksanakan penerangan, ceramah kepada para pelajar, orang tua murid dan lain-lain;
- b. Bimbingan dan penyuluhan;
- c. Sambang (home visit / school visit);
- d. Tatap muka;
- e. Menyelenggarakan lomba;
- f. Pameran yang berkaitan dengan minat remaja;
- g. Ketertiban masyarakat atau razia pada lokasi / pelajar tertentu, menyelenggarakan pendidikan / latihan bagi anak-anak (Polisi Sahabat Anak), PKS, Pramuka Saka Bhayangkara dan lainnya.

Kebijakan preventif yaitu kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan antara subjek dan objek yang memungkinkan terjadinya kenakalan remaja, pengaturan tata tertib sekolah, penjagaan dan patroli pada lokasi rawan, pengawalan, dan sebagainya yang merupakan pelaksanaan tugas Polri sebagai Binkamtibmas.

Kebijakan represif berupa kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengadakan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan terhadap tersangka pelaku kenakalan remaja atau kejahatan yang dilakukan pelajar sehingga dapat diajukan ke penuntut umum. Upaya ini yang merupakan titik berat dari upaya penegakan hukum pidana.

Upaya “treatment” dan rehabilitasi berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan dan di luar lembaga permasyarakatan antara lain secara terbatas yang dilakukan oleh Urusan Pembinaan Remaja, Pemuda dan Wanita (Urbinredawan)

Dari hasil wawancara dengan Unit Pembinaan Remaja, Pemuda dan wanita (Unbinredawan) Polwiltabes Bandung, diperoleh informasi bahwa Urbinredawan adalah unsur pelaksana pada Satuan Bimmas di Polwiltabes Bandung yang bertugas :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka reduksi dan rehabilitasi anak / remaja yang terlibat masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika dalam wilayah Polwiltabes Bandung.
2. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi bimbingan dan penyuluhan redawan pada tingkat Polresta.

3. Mengadakan koordinasi lintas sektoral dan kerja sama dengan organisasi/instansi didalam dan diluar POLRI,¹²³ pada tingkat wilayah, dalam rangka :
- a. Pencegahan dan penanggulangan kenakalan dan kejahatan para remaja, pelajar dan pemuda.
 - b. Mengubah faktor kriminogen yang ada pada redawan menjadi potensi positif.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan potensi redawan, keluarga POLRI untuk ikut serta berperan dalam pelaksanaan Kamtibmas.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap mahasiswa dalam rangka memupuk peran sertanya dalam upaya pembimbingan Kamtibmas.
5. Melaksanakan pengumpulan pengolahan penyajian data serta mengadakan pelaksanaan kegiatan bimbingan redawan.

¹²³ *Bakolak INPRES No. 6 tahun 1971* (Badan Koordinasi yang dibentuk Instruksi Presiden) merupakan salah satu badan yang bersifat koordinatif dalam penanganan masalah kenakalan remaja, narkoba dan lain-lain yang bersifat nasional. Badan ini merupakan forum multidisipliner dan multi sektoral yang berfungsi informatif, konsultatif dan fasilitatif yang bertugas dalam pembinaan kesehatan jiwa masyarakat. Lihat juga dalam Momo Kelana, *Konsepsi Kepolisian RI*, PTIK, Jakarta, 1998, Halaman 101, dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya selaku ABRI dan selaku aparat penegak hukum, melaksanakan hubungan-hubungan baik horizontal maupun vertikal dan diagonal dengan berbagai badan/instansi/lembaga.

Kebijakan dan Strategi Polwiltabes Bandung terhadap siswa yang perkaranya tidak diteruskan ke Penuntut Umum, siswa dikenakan “mell” (wajib melapor), dilakukan setiap hari Senin dan Kamis atau hari lainnya yang ditentukan. Dalam hal ini diciptakan kerjasama dan koordinasi antara Satbimmas dengan Kepala Sekolah, dan orang tua siswa. Apabila anak tidak hadir, petugas (polisi) mengontak ke Kepala Sekolah untuk menegur atau tidak boleh mengikuti mata pelajaran di kelas. Dan pelaku diberi tugas pekerjaan rumah, misalnya wajib menjalankan/ melaksanakan ajaran agama yang dianut atau terdapat pemikiran siswa tersebut dibina yang nantinya dapat “dijadikan mata dan telinga” bagi polisi.

Terhadap pelaku perkelahian pelajar, secara umum kebijakan dan strategi Polwiltabes Bandung tetap menitikberatkan pada Konsep Pembinaan,¹²⁴ tetapi bagi yang jelas-jelas melakukan pelanggaran / kejahatan tetap diajukan ke Penuntut Umum (dengan beberapa

¹²⁴Untuk pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang/narkotika, pihak Polwiltabes Bandung telah mengadakan kerjasama dengan instansi lain seperti Kanwil Depsos Jawa Barat dan Pesantren Suryalaya. Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dan meningkatkan peran serta masyarakat atau organisasi sosial serta perluasan usaha-usaha penanggulangan masalah korban penyalahgunaan narkotika. Satbimmas Polwiltabes Bandung.

pertimbangan)¹²⁵, dengan tidak memandang apakah pelakunya pelajar atau bukan diperlakukan sama dengan pelanggar hukum lainnya.

Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas dapat dikatakan konsep dan penerapan Polri dalam kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar pada hakekatnya tidak berbeda dengan kejahatan yang dilakukan masyarakat umumnya. Meskipun terdapat adanya penekanan pada tindakan yang bersifat pre-emptif dan preventif, serta adanya pertimbangan terhadap kasus per-kasus, terhadap perbuatan kenakalan remaja/pelajar yang menjurus pada perbuatan melanggar hukum (menimbulkan akibat yang serius) dikategorikan sebagai tindak pidana dan diproses menurut perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan uraian tersebut, secara konkrit POLRI Cq. Polwiltabes Bandung menerapkan kebijakan penanggulangan dengan

¹²⁵ Dalam Pasal 248 KUHP Negara Jepang, dinyatakan bahwa penuntutan tidak perlu dilakukan setelah mempertimbangkan faktor :

- a.Karakter, usia, dan keadaan si pelaku (the character, age and situation of the offender);
- b.Berat ringannya atau keseriusan dari tindak pidana dan keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan (the gravity of the offence and the circumstances under which the offence was committed);
- c.Keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu (the conditions subsequent to the offence). Dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Ananta, 1994, Halaman 182.

sarana non penal, dengan melihat kondisi serta hasil yang diharapkan, maka ada beberapa yang perlu dilaksanakan, yaitu :

a. Pencegahan melalui lingkungan keluarga.

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama yang harus mampu memberikan landasan yang kokoh bagi usaha pembentukan dan pengembangan mental dan kepribadian remaja secara positif. Sejalan dengan peranannya dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan pangkal dan dasar efektif bagi usaha pencegahan terhadap timbulnya penyimpangan tingkah laku dikalangan remaja/pelajar. Peranan yang dapat diharapkan dari lingkungan keluarga dalam usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan pelajar, adalah meliputi usaha-usaha sebagai berikut ;

1. Yang ditujukan kepada anak.

- a. Memberikan bekal pendidikan mental dan pembentukan kepribadian yang kuat melalui serangkaian pembinaan sebagai dasar pembentukan dirinya.
- b. Utamakan dan biasakan memberikan pendidikan agama, kesusilaan dan disiplin dalam kehidupan remaja dan keluarga.

- c. Perhatikan perkembangan jiwa anak terutama pada usia remaja.
Usahakan pemenuhan dan penyaluran serta dorongan kejiwaan dengan memberikan perhatian, bimbingan dan kasih sayang.
- d. Berikan kesempatan pada mereka untuk mampu berdiri sendiri dengan cara memberikan kebebasan dan penyaluran dalam pengembangan kreativitasnya. Tegaskan tanggung jawabnya dan usahakan memberikan tantangan-tantangan yang konstruktif.
- e. Bantu dalam memberikan pertimbangan terhadap kepastian masa depan yang harus dicapainya tanpa suatu paksaan yang mengikat.
- f. Kembangkan dan salurkan bakat dan hasratnya sesuai dengan kemampuannya sebagai cara yang tepat dalam pemanfaatan waktu luang.

2. Yang ditujukan kepada kondisi keluarga.

- a. Ciptakan lingkungan keluarga yang harmonis memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar menuju kedewasaan.
- b. Terapkan fungsi keluarga sebagaimana mustinya sesuai dengan kemampuan, sebagai tempat ideal untuk;

- Memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman.
- Memenuhi kebutuhan fisik maupun psikhis anak-anak
- Menanamkan norma-norma dan pembentukan nilai-nilai yang baik
- Memberikan contoh-contoh yang baik dalam membentuk sikap dan sifat anak

3. Yang ditujukan pada sikap hubungan orang tua dan anak.

1. Ciptakan sikap hubungan dengan cara komunikasi yang terbuka melalui pemberian pengertian dan kesempatan secara jujur bagi anak untuk mengajukan pendapat dan permasalahannya.
2. Berikan bantuan pemecahan yang bersifat mendidik terhadap permasalahan yang dihadapinya, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh mereka.
3. Aturlah waktu secara tetap dan teratur, memberikan kesempatan berkumpul bersama anak secara bebas.
4. Hindari sikap dan perlakuan yang menyesatkan dan tidak bersifat mendidik bagi perkembangan jiwa anak.

5. Hindari timbulnya kesalah fahaman antara anak dan orang tua serta usahakan sikap hubungan yang serasi.

Didalam lingkungan keluarga tanggung jawab pendidikan berada ditangan orang tua sepenuhnya untuk mampu melaksanakan peran yang diharapkan sebagaimana tersebut diatas, dan pihak orang tua harus menyadari hal-hal sebagai berikut ;

1. Kewajiban orang tua terhadap anak.

- a. Wajib memberikan perhatian, pengawasan serta memberikan semangat dan dorongan yang mendidik kearah timbulnya kegairahan pada anak.¹²⁶
- b. Wajib memberikan pengaruh positif dalam membina dan membentuk mental, pola tingkah laku dan kepribadian anak.
- c. Wajib memberikan tauladan dan contoh tingkah laku dan perbuatan yang positif.

¹²⁶ Dari hasil wawancara dengan sejumlah siswa yang rata-rata tingkat sosial ekonominya relatif mapan (vide tabel 23 dan tabel 25), bahwa persoalan utama yang mereka rasakan adalah kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, orang tua terjebak dalam rutinitas keseharian (bekerja) tanpa memperhatikan kepentingan si anak. Mereka hanya bertemu pagi hari dan malam hari.

2. Cara yang sebaiknya harus ditempuh.

- a. Orang Tua hendaknya tegas, konsekuen dan bijaksana
- b. Utamakan memberikan contoh yang baik dari pada memberikan perintah dan larangan.
- c. Memberikan rasa aman, tidak menakuti dan mengancam.
- d. Jangan banyak memberikan janji yang tidak dapat dipenuhi.
- e. Berikan perlakuan yang menyenangkan dan tidak membosankan, mengesalkan dan menimbulkan kebencian anak.
- f. Lebih banyak perkenalkan anak dengan hal-hal yang baik dan patut ditiru.
- g. Perhatian secara seksama kebutuhan-kebutuhan minat anak dan keinginan anak.

3. Hal-hal yang perlu dilaksanakan.

- a. Menghayati agamanya hingga dapat menanamkan norma agama dan nilai-nilai kehidupan luhur.

- b. Memberikan kasih sayang, simpati, pengertian dan perlakuan wajar bagi anaknya.
- c. Menanamkan disiplin yang bersifat mendidik bagi anak.
- d. Menjadi contoh kehidupan yang baik agar patut dicontoh dan ditiru anak-anaknya.
- e. Mengadakan pengawasan yang baik terhadap tingkah laku dan kawan bergaul anaknya, untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif.
- f. Memelihara keutuhan dan suasana harmonis didalam lingkungan keluarga, agar anak merasa aman, tentram dan kerasan dirumah.

b. Pencegahan melalui lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah merupakan tempat pendidikan lanjutan bagi pendidikan remaja yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga. Kesenambungan pendidikan ini harus diusahakan perwujudannya secara mantap, untuk menghindarkan terjadinya perbenturan-perbenturan nilai-nilai keluarga dan sekolah dimana keadaan ini dapat menjuruskan kearah pentingan tingkah laku anak didik disekolah.

Pendidikan dirumah dan disekolah harus berlangsung sejalan sedemikian rupa untuk bersama-sama menyiapkan anak didik agar

pada suatu saat mampu berdiri sendiri. Peranan yang dapat diharapkan dari lingkungan sekolah dalam mencegah timbulnya penyimpangan tingkah laku, dapat dilaksanakan dengan usaha-usaha yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Peningkatan peranan dari seorang guru.

Peranan yang diharapkan dari seorang guru ini perlu ditingkatkan, hal ini dikaitkan dengan fungsi sebagai tokoh sentral yang harus dapat dipercaya dan dicontoh sikap dan tingkah laku, kepribadian dan kemampuannya.

Pada kenyataannya peranan seorang guru sebagaimana diharapkan kurang dapat berlangsung sebagaimana mustinya, oleh karena beberapa sebab yang cukup komplek. Kredibilitas guru perlu ditingkatkan sehingga dapat diwujudkan kewibawaan guru dimata anak didiknya, hal ini pula yang pada umumnya menjadi penyebab sering tidak dipatuhinya ketentuan dan peraturan sekolah.

Usahkan pendekatan dan hubungan yang bersifat mendidik pada semua anak didik secara merata dan berikan perhatian sepenuhnya terhadap permasalahan yang dihadapinya dan berikan bantuan pemecahannya. Bangkitkan minat belajar anak didik

dengan mengusahakan suasana belajar yang menguntungkan, sehingga anak didik dapat mampu menerima "*School Formal Culture*" dengan baik. Para guru dan suasana belajar ini perlu diwujudkan agar dapat menjamin kelancaran dan keberhasilan tugas pendidikan di sekolah.

2. Pemantapan peranan wali kelas sebagai pengganti orang tua murid di sekolah.

Peranan wali kelas adalah sangat penting sebagai tempat curahan hati anak didiknya. Seorang wali kelas tidak hanya bertugas mengajar saja namun harus secara cepat mengenal dengan baik semua anak didiknya, latar belakang keluarganya, memiliki catatan tentang keinginan, aspirasi, kegemaran yang menonjol serta memiliki pula catatan yang menyangkut perilaku, watak dan pribadi, keistimewaan dan kelainan anak didiknya. Dengan pengetahuan ini melalui hubungan yang erat dengan anak didiknya, para wali kelas akan mampu memberikan saran pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi anak didik dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyimpangan tingkah laku anak didiknya.

3. Peningkatan efektifitas dan partisipasi aktif dari kegiatan lembaga bimbingan dan penyuluhan (BP).

Hal ini dikaitkan dengan lingkup kegiatan lembaga ini yang orientasi hanya terbatas kepada usaha yang bersifat kuratif terhadap permasalahan yang timbul dikalangan murid sehubungan dengan pelajaran disekolahnya. Lingkup kegiatan ini sebaiknya diperlukan pula dengan usaha yang bersifat preventif terhadap predisposisi-pradisposisi yang dapat berkembang kearah pentimpangan tingkah laku para pelajar di sekolahnya.

4. Pemantapan mekanisme hubungan orang tua dan guru.

Mekanisme hubungan orang tua dan guru dalam bentuk wadah Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3) tidak dapat berlangsung sebagai mana yang diharapkan. Pada kenyataannya lembaga ini kegiatannya lebih berorientasi pada usaha untuk membantu pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan saja. Usaha saling isi mengisi kekurangan pendidikan di sekolah dan dirumah tidak terbayangkan oleh kegiatannya.

Dengan demikian wadah yang pernah ada sebelumnya yaitu persatuan orang tua murid dan guru (POMG) lebih akan memenuhi

kebutuhan, tentunya dengan adanya penyempurnaan-penyempurnaan.

5. Pemantapan dan pemanfaatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS).

Melalui seorang guru yang dirujuk sebagai pembimbing osis dapat dibina dan diarahkan kearah pemanfaatan sub kelompok ini untuk mempengaruhi sub kelompok pelajarnya yang bersifat destruktif dilingkungan sekolah agar menjadi baik.

Cara ini akan dirasakan efektif mengingat mereka akan mengemukakan cara pendekatan dan bahasa khas mereka. Pemanfaatan osis dengan menciptakan rangkaian-rangkain kegiatan untuk dapat menyalurkan gejolak dan kreativitas remaja/pelajar dilingkungan sosial.

6. Pelaksanaan penyeragaman peraturan tata tertib dan disiplin sekolah.

Hal ini dihubungkan dengan adanya kemungkinan bahwa dapat saja terjadi satu sekolah dengan disiplin yang baik, terlibat suatu perkelahian antar pelajar, dengan adanya sekolah lain yang kurang disiplin. Tiap sekolah berusaha agar peraturan disiplin

sekolah harus dimengerti, diterima dan dipatuhi oleh seluruh anak didiknya serta adanya sanksi yang tegas terhadap para pelanggar dengan hukuman yang bersifat edukatif.

7. Pelaksanaan sistim rayonisasi secara ketat.

Pengetrapan sistim rayonisasi secara ketat tanpa pandang bulu, akan mencegah tertumpuknya anak didik disekolah tertentu saja serta dapat mengikis pandangan yang salah tentang adanya sekolah favourite yang dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap hasil pendidikannya.

8. Pemantapan pelajaran agama dan budi pekerti di sekolah.

Hal ini dirasakan penting dan kemanfaatannya dalam ikut membentuk sifat dan tingkah laku anak didik, dan perlu ditimbulkan motivasi lain sehingga memperkuat minat dan perhatian murid pada pelajaran-pelajaran tersebut.

3. Pencegahan melalui lingkungan masyarakat.

Lingkungan masyarakat merupakan tempat yang berpengaruh dalam pencegahan penyimpangan tingkah laku. Kebanyakan waktu remaja/pelajar dihabiskan dalam pergaulan lingkungan masyarakat. Lingkungan dalam masyarakat harus diciptakan untuk mampu

berperan positif dan memberikan pengaruh yang konstruktif bagi perkembangan kejiwaan remaja/pelajar.

Peranan yang dapat diharapkan dari lingkungan masyarakat terutama kalau dikaitkan dengan usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, yang dititik beratkan kepada usaha-usaha sebagai berikut;

- a. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan yang ketat dan kesadaran untuk mengurangi dan membatasi pesan-pesan, contoh-contoh dan rangsangan negatif dari kehidupan orang dewasa yang tidak bersifat mendidik.
- b. Peningkatan pengawasan sosial dari masyarakat terhadap kehidupan remaja dan pelajar dilingkungan sekitarnya dan usaha membantu pemerintah dalam penyalurannya pada kegiatan remaja yang sehat.
- c. Partisipasi dan peranan mass media perlu ditingkatkan secara terarah. Pemberitaan secara meluas harus dilaksanakan secara seimbang baik yang menyangkut penyimpangan tingkah laku maupun prestasi positif yang telah dicapai oleh remaja/pelajar yang sedang menuju kedewasaannya tidak merasa dihukum secara

sepihak namun harus juga merasa ada penghargaan atas prestasinya.

D. Evaluasi Penanggulangan Kejahatan Yang Telah Ditempuh Oleh POLRI Selama Ini, Serta Prospeknya Dimasa Yang Akan Datang.

Seperti yang telah penulis uraikan dalam Sub C angka 1 dan 2, bahwa strategi kebijakan penanggulangan kejahatan yang telah dilakukan oleh POLRI selama ini, adalah adanya keterpaduan dan keterjalinan antara kebijakan pre-emptif, kebijakan preventif dan kebijakan represif, khususnya kebijakan yang telah dilaksanakan POLRI lebih menekankan pada usaha preventif dibanding dengan usaha represif dengan berbagai pertimbangan sifat, karakter, kausa kejahatan serta akibatnya. Hal ini pun dapat dilihat dari tanggapan anggota POLRI terhadap pelajar yang melakukan kejahatan seperti dalam tabel 29 dan 30.

Selanjutnya untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan yang telah ditempuh POLRI selama ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan titik tolak timbulnya kejahatan, hal ini penulis anggap penting karena dengan mengetahui latar belakang kenapa pelajar melakukan kejahatan. Dari hasil wawancara dengan sejumlah pelajar

dan anggota POLRI, dapat ditetapkan dua hal yang merupakan timbulnya masalah kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Dengan diketahuinya sebab-sebab kenapa pelajar melakukan kejahatan, pada gilirannya akan bisa menjawab apakah kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini telah dirasakan tepat atau tidak, seperti yang telah penulis uraikan dibagian lain bab III ini. Untuk mengetahui hal tersebut dibawah ini akan penulis uraikan dua hal yang merupakan titik tolak timbulnya masalah tersebut, yaitu ;

1. Problema khas remaja yang bersifat universal pada kehidupannya yang berkaitan dengan perkembangan kejiwaan yang terjadi dimanapun juga.

Masa pancaroba sebagai suatu masa yang selalu sedang dialami oleh setiap pelajar dalam usia remaja, yang penuh dengan berbagai macam keanehan dan gejala kejiwaan yang meminta perhatian dimana secara universal akan dialami oleh setiap remaja dimanapun.¹²⁷

Keadaan ini merupakan masa peralihan dari menerima otoritas orang

¹²⁷ Para psikolog menggolongkan usia pelajar SLTA sedang mengalami perubahan kejiwaan secara vertikal (*vertical mobility*), pada tahap mana mereka ingin diakui oleh lingkungannya. Brigjen TNI. Ir. Soetomo, *Mengatasi Tawuran Secara Komprehensif*, Majalah Dharma Sena, Jakarta, 1996, Halaman 83

tua menjadi kritis dan tidak menghendaki segala hal yang bersifat tradisi, ingin bebas, ingin berdiri sendiri dan bertanggungjawab. Demikian pula keadaan ini merupakan suatu masa pembentukan identitas pribadinya melalui usaha mengadakan penilaian dengan caranya sendiri terhadap kenyataan hidup dan lingkungannya.

Selama berlangsungnya proses perkembangan ini selalu ditandai dengan timbulnya berbagai kebutuhan emosional dasar dan dorongan-dorongan tertentu yang selalu menuntut usaha pemenuhan dan penyalurannya. Kegagalan dalam penyaluran dan pemenuhan tersebut akan mempengaruhi perkembangan kepribadian dan identitasnya, yang tercermin dalam sifat dan pola tingkah laku yang sering menyimpang serta mempengaruhi kemampuan penyesuaian dirinya dalam lingkungan pergaulan sosial yang lebih luas.¹²⁸

Apabila diperhatikan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar khususnya perkelahian antar kelompok pelajar, akan memberikan petunjuk adanya kegagalan dalam usaha pemenuhan dan penyaluran kebutuhan emosional dasar dan dorongan-dorongan kejiwaan tersebut.

¹²⁸A. Qirom Syamsudin Meliala & E. Sumaryono, *Kejahatan Anak (suatu tinjauan dari psikologi dan hukum)*, Yogyakarta, Liberty, 1985, Halaman 37.

Kegagalan ini merupakan predisposisi yang tumbuh dan berkembang karena adanya kegagalan pula terhadap peranan yang diharapkan dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, yang kemudian akan dicetuskan dalam bentuk penyimpangan tingkah laku. Kepuasan akan didapatkan manakala mereka merasa terpenuhi dan tersalurkan kebutuhan dan dorongan kejiwaan ini. Dan kepuasan itu akan selalu dicari dilingkungan lainnya, dengan caranya sendiri. Hal ini yang sering menyebabkan terjerumusny kesesatan tingkah laku, meskipun demikian kepuasan itu akan senantiasa diulangnya. Proses ini akan selalu terjadi dan berlangsung dengan sendirinya serta dapat terjadi pada diri remaja dimanapun juga apabila mengalami hambatan serupa.

2. Problema remaja yang timbul karena keadaan tertentu dilingkungan sosialnya baik yang terjadi dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.¹²⁹

¹²⁹ R. Soetarno, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta, Kanisius, 1989, Halaman 47. "Manusia senantiasa hidup dalam suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, psikis maupun spiritual. Di dalam lingkungan-lingkungan itu, sejak dilahirkan manusia mengadakan hubungan timbal balik itu terjadi saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungannya. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Remaja dan Masalah-Masalahnya (sebab-sebab dan pemecahannya)*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, Halaman 13.

Pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi pada lingkungan sosial dimana remaja itu hidup, tumbuh dan berkembang akan nampak dalam wujud pertentangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mendorong terjadinya kesalahan proses belajar pada kehidupan remaja. Demikian pula dengan semakin hilangnya "*Role of Expectation*" lingkungan sosialnya, akan dapat menjurus pada kesalahan proses imitasi¹³⁰ dan identifikasi¹³¹ remaja yang akan menyesatkan kehidupan selanjutnya.

Bentuk-bentuk frustasi yang selalu terjadi dalam kehidupan remaja sebagai akibat dari pada kegagalan pendidikan yang dilakukan dilingkungan sekolah dan keluarga serta pengaruhnya yang menyesatkan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, dimana keadaan frustasi yang tidak dapat disalurkan ini akan selalu nampak dalam sikap penolakan terhadap setiap keadaan yang ada, sikap iri hati dan persaingan yang kurang sehat dan tindakan-tindakan kekerasan

¹³⁰ Ibid, Halaman 21. "Imitasi dapat diartikan peniruan. Dalam interaksi sosial faktor imitasi sangat penting jika yang dimitasi adalah sesuatu yang baik. Imitasi positif dapat merangsang perkembangan kepribadian seseorang dan dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik".

¹³¹ Ibid, Halaman 24. "Identifikasi ialah suatu proses penyamaan diri oleh seseorang individu terhadap pribadi lain secara aktif, tetapi berlangsung tanpa disadari. Pribadi yang dijadikan objek identifikasi adalah tokoh yang dikagumi, disegani dll.

dalam melampiaskan kekecewaan sebagai usaha penyaluran dengan caranya sendiri.

Kerenggangan hubungan orang tua dan anak semakin nampak dan ditandai oleh semakin berkurangnya kewibawaan orang tua dimata anaknya, sehingga peranan pengaruh ini akan diambil alih oleh lingkungan sosial lainnya sebagai "*Secondary Groupnya*".¹³² Orang tua semakin banyak menentukan larangan-larangannya, tanpa memberikan contoh-contoh yang baik yang pada gilirannya dapat ditiru. Dan pengawasan orang tua terhadap teman atau kawan bergaul nampaknya semakin menipis dan cenderung diserahkan sepenuhnya pada kemampuan penilaian anaknya. Dengan perkataan lain situasi ini mencerminkan keadaan semakin menipisnya peranan yang dapat diharapkan dari orang tua sebagai pendidik kodrat anak-anaknya, yang

¹³² Kurang terpenuhinya kebutuhan anak akan hal-hal yang berupa ikatan kasih sayang dan nilai-nilai konvensional di sekolah, mendorong anak untuk mencarinya di lingkungan lain. Biasanya si anak akan lari pada kelompok seusianya (peer group) dengan tanpa memperhatikan kualitas perilaku kelompoknya itu. Dalam kelompoknya ini, anak merasa lebih nikmat, dan akan berusaha menyesuaikan diri dengan aturan permainan yang biasanya berlaku pada kelompok itu. Yang menjadi masalah ialah manakala anak menanggapi lingkungannya yang baru beserta tata nilai kulturalnya sebagai satu-satunya tata nilai yang benar dan cocok bagi dirinya, sedangkan sesungguhnya tata nilai yang baru itu tidak selaras dan bahkan bertentangan dengan norma-norma kelayakan di masyarakat. Paulus Hadisuprpto, *Kenakalan Remaja dan Lingkungannya*, Dalam Majalah Masalah-masalah Hukum, Edisi No. 5, 1990, FH UNDIP. Halaman 6.

mampu membawa pada pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan secara wajar.¹³³

Didalam kehidupan lingkungan sekolah nampaknya kurang dikembangkan suasana belajar yang sehat, yang kurang mampu membangkitkan gairah dan minat anak didiknya. Nampaknya timbul penyimpangan pemanfaatan kehadiran dirinya di sekolah, hanya sekedar terbatas sebagai cara untuk menyenangkan hati orang tuanya saja. Serta terdapat kecenderungan merosotnya kredibilitas dan kewibawaan guru dimata anak didiknya, yang nampaknya dengan seringnya pelanggaran terhadap tata tertib disiplin sekolah serta mengabaikan penugasan-penugasan yang diberikan guru. Sikap demikian menurut Paulus Hadisuprpto, merupakan indikator mula terlepasnya ikatan anak pada sekolahnya dan gurunya.¹³⁴ Seorang guru bukan lagi sepenuhnya dapat dijadikan tokoh ideal yang dapat dipercaya dan ditiru, karena kurang sempat berperan sebagaimana mestinya. Perhatian sepenuhnya tidak dicurahkan pada anak didiknya, mengingat dengan kesibukan lain dalam mengejar tingkat kehidupan

¹³³ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, Halaman 115

¹³⁴ Paulus Hadisuprpto, *Opcit*, Halaman 6.

yang lebih baik. Dan fungsi wali kelas sebagai pengganti orang tua disekolah kurang dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan, pendekatan dan penguasaan terhadap latar belakang kehidupan kurang mendapat perhatian, hanya terbatas pada mereka yang dekat dengannya. Titik berat orientasinya hanya terbatas kepada memberikan tambahan pengetahuan saja tanpa mencoba mengenal dan mengerti terhadap permasalahan yang dihadapi anak didiknya. Demikian pula guru bimbingan dan penyuluhan hanya membatasi usaha kegiatan yang bersifat kuratif, sehingga terhadap kemungkinan timbulnya problema remaja disekolah tidak dapat dideteksi.

Mekanisme hubungan orang tua dan guru nampak semakin renggang,¹³⁵ Hal ini diakibatkan oleh intensitas kesibukan orang tua semakin menyita waktu dengan adanya rangsangan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan hidupnya, akan berakibat kepada semakin sempitnya waktu dalam memberikan perhatian, bimbingan dan kasih sayang pada anak-anaknya. Kebutuhan remaja untuk mendapatkan

¹³⁵ Hal ini didasarkan pada jawaban responden pelajar, "bahwa tidak pernah sama sekali ada pertemuan khusus antara orang tua murid dan guru yang membahas masalah-masalah yang menyangkut pelajar, paling-paling pertemuan pada saat pembagian raport". Wawancara dengan 10 pelajar, Tanggal 15 Maret 1997. SMUN VII Kodya Bandung.

perhatian ini merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang ingin mendapatkan pemenuhan dan penyalurannya. Lembaga BP-3 kurang berfungsi dalam membantu perkembangan anak didik, orientasi hanya terbatas pada usaha membantu terselenggaranya fasilitas-fasilitas pendidikan. Begitu juga Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang ada hanya terbatas pada kemampuan kreatifitas dan aspirasi dan penyaluran gejala-gejala remaja dilingkungan sekolah. Dan masih terciptanya kerawanan tertentu yang menyebabkan anak didik terlalu eksklusif akan sekolahnya.

Dalam lingkungan kehidupan masyarakat pada umumnya masih sering nampak contoh-contoh pesan dan rangsangan-rangsangan negatif dari kehidupan dunia orang dewasa, yang meracuni perkembangan kejiwaan remaja. Terbatasnya penyediaan fasilitas sekolah yang tidak seimbang dengan kebutuhan laju perkembangan usia anak didik yang membutuhkannya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap lokasi sekolah yang dekat dengan pusat-pusat keramaian ternyata siswanya sering terlibat dalam perbuatan menyimpang, dibanding dengan lokasi

sekolah yang jauh dari pusat keramaian.¹³⁶ Dimana perencanaan lokasi bangunan sekolah yang favoureble (dekat dengan pusat-pusat perkotaan, terminal bus), sehingga secara tidak langsung memberikan kesempatan berbuat kenakalan bagi pelajar pada waktu jam-jam pelajaran berlangsung atau sepulangnya dari sekolah. Demikian pula masih dirasakan adanya kesempatan bagi remaja/pelajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak konstruktif, mengingat masih terbatasnya kegiatan yang dapat terarah dalam menyalurkan potensi dan kreativitasnya, hal ini berkaitan dengan terbatasnya sarana dan fasilitas pembinaan remaja/pelajar serta kurangnya program-program yang menarik dan bersifat menantang.

Disamping itu pula adanya kecenderungan menipisnya pengawasan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kota besar, mendorong remaja/pelajar berbuat sekehendak hati menurut caranya sendiri. juga dilain pihak media pers (elektronika maupun cetak) kurang memberikan prestasi-prestasi remaja yang menonjol, tapi lebih banyak mengetengahkan kasus-kasus kriminalitas yang

¹³⁶ Sekolah (SMUN VII dan STM Merdeka) yang menjadi tempat penelitian, berlokasi dipusat keramaian, dekat dengan pusat perbelanjaan modern atau tradisional, bioskop, terminal, stasiun kereta api, perkantoran dll.

melibatkan remaja/pelajar yang bersifat sensasional hingga merangsang untuk ditiru yang dianggap sebagai mode.

Setelah mengevaluasi, bahwa kebijakan yang telah ditempuh oleh POLRI selama ini dan dikaitkan dengan mengetahui latar belakang kenapa mereka melakukan kejahatan (yang didasarkan dari hasil penelitian penulis), dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut dirasakan sangat tepat dan mempunyai prospek yang baik. Hal ini didasarkan pada kondisi dan kedudukan seorang pelajar yang sangat strategis. Kebijakan faktual yang bersifat persuasif edukatif dirasakan akan lebih berhasil ketimbang dengan kebijakan normatif. Karena tidak bisa dipungkiri walau bagaimanapun bahwa sanksi hukum pidana sampai sekarang masih diragukan efektivitasnya dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Untuk itu menurut hemat penulis bahwa mengetahui pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab tersebut sangatlah penting, karena tanpa mengetahui sebab-sebab tersebut, usaha penanggulangan tidak akan berhasil.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan Umum, yaitu memuat beberapa hal yang berdasarkan pada penemuan peneliti dilapangan, yang sama sekali tidak menjawab permasalahan di dalam identifikasi masalah tesis ini, antara lain :

a. Kejahatan yang dilakukan pelajar bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dari sisi kuantitatif, namun dari sisi kualitatif cenderung adanya peningkatan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi dua hal yang merupakan titik tolak timbulnya masalah tersebut, yaitu :

1. Problema khas remaja/pelajar yang bersifat universal pada kehidupannya yang berkaitan dengan perkembangan kejiwaan yang terjadi dimanapun juga.
2. Problema remaja/pelajar yang timbul karena keadaan tertentu dilingkungan sosialnya baik yang terjadi dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

b. Pemahaman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelajar berbeda dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa pada umumnya, karena pelajar pada umumnya dan pelaku kejahatan pelajar khususnya masih berada dalam tahap perkembangan remaja. Oleh karena itu kejahatan yang dilakukan oleh pelajar pada umumnya jarang ditemui adanya motif khusus mengapa pelajar melakukan kejahatan, serta mengingat sifat, karakter serta kausa kejahatan.

B. Kesimpulan khusus, memuat beberapa jawaban terhadap identifikasi masalah dalam tesis ini, yaitu :

1. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang telah ditempuh selama ini oleh POLRI C.q. Polwiltabes Bandung dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar baik dengan saran penal dan non penal, tidak akan terlepas dari peranan Polisi itu sendiri, yaitu :
 - a. Peranan Normatif, yaitu peranan Polisi yang didasarkan atas tugas dan kewajiban menurut ketentuan perundangan-undangan, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Peranan Kepolisian sebagai organisasi formal tertentu yang telah ditetapkan, mempunyai peranan *prescribed* (ditetapkan) oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban Kepolisian dalam

penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement* yang bersumber pada substansi (*substansi of criminal law*).

- b. Peranan Faktual, yaitu peranan Polisi dalam tugas kamtibmas yang lebih menekankan kepada peranan nyata yang bersifat situasional sehingga nampak di dalam pelaksanaan peran tersebut lebih mengarah kepada diskresi di dalam mencapai ketertiban masyarakat.
- c. Peranan Ideal, dapat diartikan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Yaitu peranan Kepolisian sebagai organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peranan itu tidak tercantum di dalam *prescribed roles*.

Dari ketiga peranan tersebut, ternyata peran normatif polisi tidak sepenuhnya melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI, karena adanya kesenjangan yang

sangat besar antara penangkapan dan penahanan dibanding dengan penyelesaian perkara (vide, tabel 28),

Adanya kesenjangan tersebut didasari oleh :

- a. Bahwa peran normatif dalam wujudnya lebih menekankan pada sarana hukum pidana dibanding dengan sarana lainnya dalam mencapai ketertiban.
- b. Polisi mengadakan seleksi perkara melalui wewenang diskresi.

Selanjutnya kebijakan sarana penal yang telah ditempuh POLRI C.q. Polwiltabes Bandung terhadap pelajar yang melakukan kejahatan, dari sejumlah 897 orang yang ditangkap, yang selanjutnya dilakukan penahanan sejumlah 427 orang dan dilimpahkan ke Penuntut Umum sejumlah 39 orang. Latar belakang kebijakan terhadap sejumlah 897 pelajar yang ditangkap didasarkan pada bukti permulaan patut diduga bahwa pelajar tersebut telah melakukan tindak pidana. Dalam melakukan pemrosesan selanjutnya (dari 897 menjadi 427) Polisi melakukan beberapa kebijakan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara (diskresi), baik berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan maupun atas dasar pertimbangan sosiologis. Selanjutnya kebijakan Polri C.q. Polwiltabes Bandung terhadap perkara yang tidak diproses

lebih lanjut (tidak diajukan ke penuntut umum), selain didasarkan kepada tindak pidana yang dilakukan dianggap tidak terlalu mengawatirkan serta perbuatan tersebut sebagai ekses dari kenakalan, juga didasarkan pada kebutuhan praktek, bukan saja dipandang dari segi hukum semata-mata tetapi segi manfaat efisiensi dan tujuan hukum itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa kebijakan yang telah ditempuh oleh POLRI C.q. Polwiltabes Bandung terhadap sejumlah 39 pelajar diajukan ke Penuntut Umum adalah didasarkan pada tindak pidana yang dilakukannya sudah diluar batas toleransi, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba jenis putaw, narkoba jenis suntikan dan narkoba jenis ekstasi, dan perkeltahan pelajar yang menimbulkan korban mati atau luka berat, serta penganiayaan. Pertimbangan tersebut penulis kaitkan dengan data pelaku pelajar yang dilimpahkan kepenuntut umum (vide, tabel 27), jika diprosentasekan menggambarkan rata-rata pelaku pelajar tersebut melakukan tindak pidana yang sejenis (dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat dan bukan sebagai ekses dari kenakalan).

Hal lain yang seyogianya/sebaiknya ditempuh oleh POLRI C.q. Polwiltabes Bandung dalam menggunakan sarana penal terhadap pelajar yang melakukan kejahatan harus benar-benar memperhatikan latar belakang baik yang menyangkut sosial ekonomi, mengapa mereka melakukan kejahatan serta sifat dan karakter kepribadiannya, maka diharapkan bahwa dengan mengetahui latar belakang tersebut penerapan sanksi pidana (sarana penal) terhadap pelajar yang melakukan kejahatan akan dirasakan lebih efektif dan efisien.

Namun jika kasus itu merupakan manifestasi dari suatu perbuatan kenakalan remaja (tidak jelas motivasinya) maka dianggap bukan sebagai tindak pidana biasa. Sedangkan strategi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal mencakup pengertian keterpaduan antara kebijakan pre-emptif, kebijakan preventif dan upaya treatment (vide tabel 31).

2. Kebijakan yang telah ditempuh oleh POLRI C.q. Polwiltabes Bandung mempunyai prospek yang sangat baik, karena kebijakan yang diterapkan tidak semata-mata melihat dari aspek tindak pidana yang dilakukannya tetapi juga didasarkan kepada kondisi dan kedudukan seorang pelajar dalam suatu bangsa merupakan sumber

daya terdidik yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan bangsa dimasa yang akan datang. Kebijakan faktual yang bersifat persuasif edukatif serta adanya keterpaduan dan keterjalinan antara kebijakan pre-emptif, preventif, dirasakan akan lebih berhasil dibanding dengan peran normatif. Oleh karena itu, semakin banyak sumber daya manusia terdidik yang dimiliki oleh suatu bangsa, diharapkan akan semakin ringan beban bangsa tersebut dalam memikul tantangan kehidupan berbangsa.

4.2. Rekomendasi

1. Dalam upaya mengurangi dan mengatasi kualitas kejahatan yang dilakukan oleh pelajar, seyogianya penerapan sanksi pidana agar lebih diintensifkan dengan beberapa pertimbangan dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mewujudkan seperti dalam angka 1 diatas, seyogianya POLRI dalam menggunakan sarana penal terhadap pelajar yang melakukan kejahatan senantiasa memperhatikan berbagai aspek. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut diharapkan bahwa penggunaan sarana penal bisa lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

3. Pendidikan agama melalui lingkungan sosial dalam masyarakat, perlu dikaitkan dengan usaha penanggulangan terhadap masalah ini. Demikian pula perlu diusahakan penyebaran pengetahuan tentang psikologi, psikiatri dan kesehatan jiwa secara praktis, sampai mampu menjangkau lingkungan orang tua, mengingat fungsinya sebagai basis pembinaan remaja/pelajar.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara merata dalam rangka penanggulangan masalah ini, dengan memberikan prioritas utama dalam bentuk :
 - a. Mengurusi pesan-pesan negatif dari kehidupan dunia orang dewasa.
 - b. Mengurangi contoh-contoh dan rangsangan negatif lainnya.
5. Peningkatan aktivitas dan memperbanyak fasilitas pembinaan remaja serta pusat keterampilan remaja/pelajar, sebagai sarana penyaluran minat, bakat kreativitas remaja/pelajar secara utuh.
6. Kemungkinan pemanfaatan kerawanan-kerawanan yang terjadi dalam kehidupan pelajar disekolah, untuk kepentingan-kepentingan politis golongan-golongan tertentu dengan memperuncing eksklusifisme antar sekolah. Hal ini diperlukan

adanya aparat keamanan untuk mampu mendekteksi perkembangan situasi secara dini.

7. Mengingat Kejahatan yang dilakukan oleh pelajar banyak mengakibatkan korban, kejahatan itu bukan lagi sebagai eksese dari kenakalan harus diselesaikan sampai tuntas ke pengadilan.
8. Agar ditingkatkan lagi koordinasi lintas sektoral supaya lebih efektif, untuk lebih meningkatkan daya guna dalam upaya penanggulangan kejahatan/pelanggaran yang melibatkan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Banurusman, **Identifikasi Faktor-faktor Stimulan Timbulnya Gangguan Kamtibmas dan Upaya Penanggulangannya**, Makalah Pada Seminar Faktor-faktor Stimulan Timbulnya Gangguan Kamtibmas, Surabaya, 1990.
- Bittner, Egon, **The Functions of the Police in Modern Society**, Cambridge, Massachusset, Oelgeschlager, Grun and Hain, 1980.
- Blau, Peter M & Meyer, Marshall, **Birokrasi Dalam Masyarakat Modern**, Edisi Kedua, UI-Press, 1981
- , **Faktor-faktor yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda**, Bandung, Bina Cipta, 1985
- Daradjat, Zakiah, **Problema Remaja di Indonesia**, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- , **Remaja Harapan dan Tantangan**, Jakarta, Ruhama, 1994.
- , **Kesehatan Mental**, Jakarta, Gunung Agung, 1983.
- Echols M, John & Hassan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia**, Jakarta, Gamedia, 1981.
- Faal. M, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)**, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987
- Faisal, Sanapiah, **Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**, YA3 Malang, 1990.
- Gibbon, Don C, **Sociaty Crime and criminal Careers**, New Jersey, 1977, Englewood Cliffts.
- Gunarsa, Singgih G, **Psikologi Remaja**, Jakarta, Gunung Mulia, 1980

- Hadisuprpto, Paulus, **Kenakalan Remaja dan Lingkungannya, (Suatu Tinjauan Kriminologik)**, Dalam Majalah Masalah-masalah Hukum, edisi No. 5, 1990, FH UNDIP.
- Hanitijo, Ronny, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia, 1990.
- Hoefnagels, G Peter, **The Other Side of Criminology (An Invention of the concept of Crime)** Holland, Kluwer Deventer, 1969.
- Husin, Kadri, **Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP (Tesis)** Program Pasca Sarjana UI, Jakarta., 1992
- Islamy, M. Irfan, **Prinsip-prinsip Prumusan Kebijakanaksanaan Negara**, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Ismail, Chaerudin, **Polisi dan Masyarakat**, Bandung, TP, 1996.
- Kusumah W. Mulyana, **Kenakalan Remaja dalam Perspektif Kriminologi**, Jakarta, Prisma, 1985.
- , **Perspektif, Teori, dan Kebijakanaksanaan Hukum**, Jakarta, Rajawali, 1986.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Jakarta, 1990.
- Kartono, Kartini, **Psikologi Anak**, Bandung, Alumni,, 1979
- **Patologi Sosial 2 kenakalan Remaja**, Jakarta Rajawali, 1986.
- Kelana, Momo, **Memahami UU No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI**, Jakarta, PTIK, Radinas Ekasapura, 1998.
- , **Konsepsi Kepolisian Negara RI**, Jakarta, Radinas Ekasaputra, 1998
- Margono, Slamet, **Mahasiswa dalam Pembangunan**, Bandar Lampung, UNILA Press, 1986.

Moleong, Lexy J, **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994.

Muladi, **Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Dari Aspek Instrumen Internasional**, Kertas Kerja pada Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September 1996,

Nasution, S. **Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif**, Bandung, Tarsito, 1990

Nawawi, Arief Barda, **Pemidanaan**, Dalam Masalah-Masalah Hukum No. 16 FH. UNDIP, 1979

-----, **Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Makalah Seminar Kriminologi VI. Fakultas Hukum UNDIP, 1991

-----, dan Muladi, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Bandung, Alumni, 1992.

-----, **Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)** Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994.

-----, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Semarang, Ananta, 1994

-----, **Tugas Yuridis POLRI Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum**, Dalam Masalah-masalah Hukum, Edisi 12, 1994, FH. UNDIP.

-----, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, PT. Aditya Bakti, 1996

- , **Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Makalah Seminar "Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan", Semarang, 1996.
- , **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Packer, Herbert L, **The Limits of the Criminal Sanction**, Stanford, California University Press, 1968
- Rahardjo, Satjipto, **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi**, Bandung, Sinar Baru TT.
- , **Hukum dan Masyarakat**, Bandung Angkasa, 1980.
- , **Hukum dan Perubahan Sosial**, Bandung, Alumni, 1983.
- & Anton Tabah, **Polisi, Pelaku dan Pemikir**, Jakarta, Gramedia, 1993.
- Resolusi PBB NO. 44/25 ; **United Nations Childrens Funds, Convention on the Right of The Child**.
- Sahetapy, J.E., **Teori Kriminologi Suatu Pengantar**, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, JE & Reksodiputro, Mardjono, **Parados Dalam Kriminologi**, Jakarta, Rajawali, 1989.
- Saleh, Roeslan, **Mencari Asas-Asas Umum Yang Sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional**, Kumpulan Upgrading Hukum Pidana, Jilid 2, 1971.
- Sastrawidjaya, Safiyudin, **Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja**, Bandung, Karya Nusantara, 1977.
- Syamsudin A. Qirom & E. Sumaryono, **Kejahatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum)**, Jogjakarta, Liberty, 1985.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, 1983.

Sanusi, M, **Kejahatan Dewasa ini Ditinjau dari Sudut Pandang Kepolisian**, Bandar Lampung, Sagitarius, 1987.

Sixth United Nations Congress on **The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders**, Report, 1980.

Soesilowindradini, **Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)**, Surabaya, Usaha Nasional.

Soetarno, R. , **Psikologi Sosial**, Yogyakarta, Kanisius, 1989.

Soekanto, Soerjono, **Penguasaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Bandung, Alumni, 1980.

-----, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali Press, 1982.

-----, **Remaja dan Masalah-Masalahnya (sebab-sebab dan pemecahannya)**, Yogyakarta, Kanisius, 1982.

-----, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, Rajawali, 1983.

-----, **Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi**, Bandung, Remaja Karya, 1985.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 1986

-----, **Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989

-----, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1990.

-----, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Jakarta, Rajawali, 1990

-----, & Mamudji, Sri, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta, Rajawali, 1994.

-----, **Penegakan hukum**, Bandung, Bina Cipta, Tanpa Tahun.

Soeriatmaja, Soeparno, **Perkembangan Sejarah Kepolisian Dari Zaman Klasik Sampai Zaman Modern**, Jakarta, PTIK, 1971.

Sudarto, **Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung, Sinar Baru, 1983

-----, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 1983.

-----, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 1986.

Skolnick, Jerome, **Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society**, New York : John Wiley dan Sons, 1975

-----, **Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society** dalam Lawrence M Freidman dan Stewart Macaulay (ed). **Law and the Behavioral Science**. The Bobbs Merrill, 1969

Widjaja, A.W., **Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika**, Bandung, Armico, 1985.

Walkel, Nigel, **Sentencing in a Rational Society**, 1972.

Wisaksono, Budi, **Masalah Polisi dan Bantuan Hukum, Suatu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana**, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Edisi No. 3, FH UNDIP, 1989.

Media Masa.

Dharma Sena, Edisi Bulan Juni 1996

Pikiran Rakyat, 1995

Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 1 Tahun 1946, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 9 Tahun 1976, Tentang Narkotika.

UU No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 20 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemanan Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke 16, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.

UU No. 2, Tahun 1989, Tentang Pendidikan Tinggi.

UU No. 28 Tahun 1997, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak.

Tap MPR RI No. II/MPR/1993, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.